



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Pendapatan-LRA TA 2020 TA 2019 **Rp12.916.359.750.490,99** **Rp13.079.598.635.469,31**

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp13.077.362.353.824,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp12.916.359.750.490,99 atau 98,77 dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.434.682.028.854,00	5.531.237.378.774,99	101,78	5.761.270.412.051,31
Pendapatan Transfer – LRA	7.585.386.627.261,00	7.347.748.112.410,00	96,87	7.300.647.588.241,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	57.293.697.709,00	37.374.259.306,00	65,23	17.680.635.177,00
Jumlah	13.077.362.353.824,00	12.916.359.750.490,99	98,77	13.079.598.635.469,31

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 tersebut menurun sebesar Rp163.238.884.978,31 atau 1,24% dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp13.079.598.635.469,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.531.237.378.774,99	5.761.270.412.051,31	230.033.033.276,32	3,99
Pendapatan Transfer – LRA	7.347.748.112.410,00	7.300.647.588.241,00	47.100.524.169,00	0,64
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	37.374.259.306,00	17.680.635.177,00	19.693.624.129,00	52,69
Jumlah	12.916.359.750.490,99	13.079.598.635.469,31	(163.238.884.978,31)	1,24

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Daerah selama



Tahun Anggaran 2020 ditambah dengan pendapatan yang dikelola tersendiri oleh RSU Haji Medan sebesar BLUD sebesar Rp49.521.751.907,00.

Pendapatan terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2019 khususnya dari pos pendapatan asli daerah sebesar Rp230.033.033.276,32 meskipun dibandingkan dengan target realisasi penerimaan Tahun 2020 mengalami peningkatan. Penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya penerimaan dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan/badan usaha milik daerah (BUMD) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan/badan usaha milik negara (BUMN).

	TA 2020	TA 2019
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	Rp5.531.237.378.774,99	Rp5.761.270.412.051,31

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.531.237.378.774,99 atau mencapai 101,78% dari anggaran P.APBD sebesar Rp5.434.682.028.854,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	4.926.456.652.305,00	5.071.597.922.390,00	102,95	5.058.443.944.654,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	25.877.029.900,00	30.218.319.711,00	116,78	38.408.031.263,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	248.362.356.856,00	242.309.156.856,78	97,56	436.284.942.769,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	233.985.989.793,00	187.111.979.817,21	79,97	228.133.493.365,31
Jumlah	5.434.682.028.854,00	5.531.237.378.774,99	101,78	5.761.270.412.051,31

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 tersebut menurun sebesar Rp230.033.033.276,32 atau 3,99% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

Menurunnya penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah yang paling dominan dipengaruhi oleh penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu berkurang sebesar Rp193.975.785.912,22 dibandingkan dengan Tahun 2019. Terutama penerimaan dari PT. Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp0,00 sebelumnya Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2.706.000.000,00. PT. Dirga Surya Sumatera Utara Tahun 2020 terealisasi Rp0,00 sebelumnya Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp145.000.000,00. PT. Bank Sumut berkurang sebesar Rp221.107.394.671,00 dibandingkan Tahun 2019. PT. Asuransi Bangun Askrida berkurang sebesar Rp101.878.855,00. Kemudian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara memberikan penerimaan lebih baik dari Tahun 2019 sebesar Rp818.597.653,00. PDAM Tirtanadi sebesar Rp28.461.724.366,00 dan PT. Kawasan Industri Medan memberikan kontribusi penerimaan sebesar Rp804.165.594.78,00.



Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp8.189.711.552,00 dari Tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan retribusi dari sektor Retribusi Jasa Umum seperti pelayanan kesehatan, pengganti biaya cetak peta, pelayanan pendidikan dan pengujian mutu barang. Retribusi Jasa Usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan, tempat rekreasi, pelayanan tempat olahraga, penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu seperti izin trayek, pemberian izin usaha perikanan dan perpanjangan izin mempekerjakan TKA.

Untuk pos Lain-lain PAD Yang Sah kekurangan realisasi didominasi oleh penerimaan Jasa Giro yang terealisasi hanya Rp22.202.305.234,00 dari anggaran Rp43,818,888,000.00 atau 57,67%.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	Rp5.071.597.922.390,00	Rp5.058.443.944.654,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.071.597.922.390,00 atau mencapai 102,95% dari anggaran P.APBD sebesar Rp4.926.456.652.305,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	2.060.552.596.410,00	2.129.303.940.098,00	103,34	1.995.480.813.304,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	983.131.112.260,00	1.000.119.789.912,00	101,73	1.315.420.245.168,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	882.786.893.431,00	812.843.402.651,00	92,08	889.959.158.091,00
Pajak Air Permukaan – LRA	62.489.854.175,00	68.595.314.040,00	109,77	43.851.582.047,00
Pajak Rokok – LRA	937.496.196.029,00	1.060.735.475.689,00	113,15	795.163.307.893,00
Jumlah	4.926.456.652.305,00	5.071.597.922.390,00	102,95	5.058.443.944.654,00

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp13,153,977,736.00 atau 0,26% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

Meskipun pos Pajak Kendaraan Bermotor telah mencapai target dan melebihi penerimaan dari Tahun 2019, masih ada yang belum terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.890.584.913,00 dan pos Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-2 sebesar Rp30.287.149.304,00 tidak dicatat karena Surat Ketetapan Pajak diterbitkan setelah mendapat pelunasan dari wajib pajak.

Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2020 mengalami penurunan pada Perubahan APBD 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini dalam upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat memenuhi kewajiban membayar



pajak kendaraan, mengingat di masa pandemi Covid-19, penerimaan daerah dari sektor ini menurun seiring kondisi ekonomi rakyat yang kurang baik.

Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada APBD Murni TA. 2020 sebesar Rp749.700.000.000,00 dan pada Perubahan APBD TA. 2020 bertambah menjadi Rp882.786.893.431,00 dengan realisasi Rp812.843.402.651,00 atau sebesar 92.08%. Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan rancangan Perubahan APBD TA. 2020, BPPRD telah menyusun dan menyampaikan draft Peraturan Gubernur mengenai kenaikan tarif PBBKB, yang diasumsikan Peraturan Gubernur tersebut dapat mulai dilaksanakan pada September 2020, hal inilah yang menjadi dasar untuk menambah target pada PBBKB, namun sampai dengan Desember 2020 Peraturan Gubernur tersebut masih dalam pembahasan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terkait hal tersebut diatas yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan PBBKB di tahun 2020.

Target Pajak Rokok pada APBD TA. 2020 sebesar Rp927.496.196.029,00 dan pada Perubahan APBD TA. 2020 bertambah menjadi Rp937.496.196.029,00 dengan realisasi Rp1.160.735.475.689,00 atau sebesar 113.15%. Hal ini terjadi karena pada saat realisasi Pajak Rokok Triwulan III (masa Pajak Juli s.d September) 2020 diinformasikan oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-185/PK.4/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Perihal Penyetoran Pajak Rokok (PR) Periode Penerimaan TW. III TA. 2020 Tahap I bahwa sisa potongan (kontribusi program jaminan kesehatan yang disetor ke BPJS Kesehatan) yang diperhitungkan pada triwulan berikutnya sudah tidak ada lagi, artinya Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memenuhi kontribusi kepada BPJS sebesar 37.5%, hal ini yang menyebabkan terjadinya over target pada saat transfer Realisasi Pajak Rokok Triwulan IV (masa Pajak Oktober s.d Nopember) 2020.

Untuk Sektor Pajak Air Permukaan, target dan realisasi Tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2019. Hal ini terjadi karena PT. Inalum melakukan pembayaran untuk pajak tahun berjalan 2020. Penerimaan dari PT. Inalum yang cukup signifikan ini mendorong peningkatan penerimaan daerah. Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.102.802.481.666,00 terdiri dari Piutang Wajib Pajak Air Permukaan yang tersebar di Kabupaten/Kota sebesar Rp2.306.225.485,00 dan Piutang PT. Inalum (Persero) sebesar Rp3.100.496.256.181,00, piutang PT. Inalum ini merupakan akumulasi piutang atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) masa pajak November 2013 sampai dengan Oktober 2020 yang kurang dibayar oleh PT. Inalum.

Realisasi penerbitan SKPD PT. INALUM (Persero) Per 31 Desember 2020 (Masa Pajak Nopember 2013 s.d Oktober 2020 / 84 SKPD).

➤ Nilai Pajak Air Permukaan Terutang = Rp.3.805.079.366.693



- Realisasi Pembayaran :
 - a. Menurut Perhitungan PT. INALUM = Rp. 168.524.961.631
 - b. Pembayaran saat Banding = Rp. 536.058.148.881
 - Jumlah Pembayaran = Rp. 704.583.110.512
 - i. SKPD Yang Kurang Dibayar (Piutang) = Rp.3.100.496.256.181

	TA 2020	TA 2019
4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	Rp30.218.319.711,00	Rp38.408.031.263,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp30.218.319.711,00 atau 116,78% dari anggaran P.APBD sebesar Rp25.877.029.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Retribusi Jasa Umum	15.115.490.600,00	15.547.706.617,00	102,86	22.841.010.277,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	14.615.490.600,00	14.660.559.117,00	100,31	21.846.603.327,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA	200.000.000,00	249.012.500,00	124,51	303.282.500,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan – LRA	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00
Retribusi Pengujian Mutu Barang - LRA	300.000.000,00	638.135.000,00	212,71	443.500.000,00
Retribusi Pemakaian Alat Berat - LRA	0,00	0,00	0,00	226.124.450,00
Retribusi Jasa Usaha	7.361.539.300,00	9.768.894.764,00	132,70	10.986.584.957,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	3.102.382.500,00	4.690.759.194,00	151,20	4.095.124.185,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	1.695.382.600,00	1.609.320.000,00	94,92	2.379.605.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi - LRA	65.851.200,00	97.505.000,00	148,07	159.065.000,00
Retribusi Tempat Pariwisata - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olah raga- LRA	793.800.000,00	382.160.250,00	48,14	1.647.605.250,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.704.123.000,00	2.989.150.320,00	175,41	2.705.185.522,00
Retribusi Perizinan Tertentu	3.400.000.000,00	4.901.718.330,00	144,17	4.580.436.029,00
Retribusi Izin Trayek – LRA	250.000.000,00	254.510.000,00	101,80	322.940.000,00
Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan – LRA	1.650.000.000,00	2.646.450.630,00	160,39	2.151.613.102,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Tanah Milik Jalan – LRA	0,00	0,00	0,00	344.401.627,00
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan TKA – LRA	1.500.000.000,00	2.000.757.700,00	133,38	1.761.481.300,00
Jumlah	25.877.029.900,00	30.218.319.711,00	116,78	38.408.031.263,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.189.711.552,00 atau 21,32% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

Dari uraian penerimaan pos retribusi, yang sangat signifikan terlihat pada pos penerimaan retribusi jasa usaha pelayanan tempat olah raga yang terealisasi sebesar 48,14% dari target. Hal ini terjadi karena sesuai peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait percepatan penanganan penanggulangan pandemi Covid-19 untuk menutup sementara tempat-tempat yang dapat memperluas penyebaran Covid-19, sehingga lebih kurang 9 (sembilan) bulan



sejak April sampai Desember 2020, tempat pelayanan olahraga dibawah lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ditutup sementara.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	Rp242.309.156.856,78	Rp436.284.942.769,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp242.309.156.856,78 atau 97,56% dari anggaran P.APBD sebesar Rp248.362.356.856,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 13 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA. 2020 dan 2019**

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LRA:	243.671.183.349,00	237.617.983.349,00	97,52	432.296.056.001,00
PT. Perkebunan Sumatera Utara	5.953.200.000,00	0,00	0,00	2.706.000.000,00
PT. Dhirga Surya	100.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00
PT. Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Bank Sumut	188.037.661.330,00	188.037.661.330,00	100,00	409.145.056.001,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	1.118.597.653,00	1.118.597.653,00	100,00	300.000.000,00
PDAM Tirtanadi	48.461.724.366,00	48.461.724.366,00	100,00	20.000.000.000,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN – LRA:	4.691.173.507,00	4.691.173.507,78	100,00	3.988.886.768,00
PT. Asuransi Bangun Askrida	67.716.826,00	67.716.826,00	100,00	169.595.681,00
PT. Kawasan Industri Medan	4.623.456.681,00	4.623.456.681,78	100,00	3.819.291.087,00
Jumlah	248.362.356.856,00	242.309.156.856,78	97,56	436.284.942.769,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp193,975,785,912.22 atau 44,46% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 tidak memenuhi pencapaian sesuai target yang ditetapkan karena beberapa BUMD tidak memberikan kontribusi realisasi penerimaannya yaitu PT. Perkebunan Sumatera Utara, PT. Dhirga Surya dan PT. Aneka Industri dan Jasa. Hal ini terjadi karena ketiga perusahaan daerah tersebut mengalami kerugian, seperti diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara. Alasan lainnya



adalah karena operasional perusahaan yang tidak/ belum berjalan dengan baik serta banyaknya beban yang harus diselesaikan dalam rangka pengembangan usaha.

4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA

	TA 2020	TA 2019
	Rp187.111.979.817,21	Rp228.133.493.365,31

Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp187.111.979.817,21 atau 79,97 % dari P.APBD sebesar Rp233.985.989.793,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	350.000.000,00	636.457.676,00	181,85	86.190.000,00
Penerimaan Jasa Giro – LRA	43.818.888.000,00	22.202.305.234,00	50,66	33.154.847.351,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	300.000.000,00	503.299.375,00	167,77	2.269.050.882,82
Pendapatan Denda Pajak – LRA	55.408.784.871,00	60.004.552.267,00	108,29	70.314.829.731,00
Pendapatan dari Pengembalian – LRA	76.268.316.922,00	53.919.401.008,21	70,70	52.181.532.629,49
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat – LRA	0,00	0,00	0,00	3.050.525.000,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LRA	240.000.000,00	324.212.350,00	135,09	326.128.496,00
Pendapatan BLUD – LRA	57.600.000.000,00	49.521.751.907,00	85,97	66.750.389.275,00
Jumlah	233.985.989.793,00	187.111.979.817,21	79,97	228.133.493.365,31

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp41.021.513.548,10 atau 17,98% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

Yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan dari pos Lain-lain PAD Yang Sah adalah penerimaan Jasa Giro Tahun 2020, terealisasi sebesar Rp22.202.305.234,00 atau 50,66% dari anggaran sebesar Rp43.818.888.000,00. Hal ini terjadi karena penganggaran yang dibuat berdasarkan kepada besaran suku bunga giro Bank dan perhitungan saldo terendah setiap bulan (satu bulan takwim) atas posisi saldo uang di RKUD. Besaran tingkat suku bunga giro pada Bank Sumut adalah sebesar 3% sesuai dengan surat direksi Bank Sumut Nomor: 053/DIR/DPEM-TS/SE/2003 dengan formulasi perhitungan yaitu : $Jasa\ Giro = Saldo\ Terendah\ Setiap\ Bulan \times Hari/365$.

Selain itu pos Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp53.919.401.008,21 atau 70,70% dari anggaran sebesar Rp76.268.316.922,00. Pos yang sangat mempengaruhi tidak tercapainya target adalah pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dana Hibah, hal ini karena masyarakat penerima hibah belum mengembalikan kelebihan pembayaran hibah tersebut. Kemudian pengembalian dari kelebihan pembayaran asuransi kesehatan yang terealisasi sebesar Rp135.683.189,00 atau 67,84% dari anggaran.



Kemudian pendapatan BLUD yang terealisasi sebesar Rp49.521.751.907,00 atau 85,97% dari anggaran sebesar Rp57.600.000.000,00 dipengaruhi dengan berkurangnya penerimaan dari beberapa pos pendapatan seperti Instalasi Rawat Jalan Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp10.664.366.660,00 sedangkan Tahun 2019 Rp13.178.647.277,00, Instalasi Rawat Inap Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp34.679.752.917,00 sedangkan Tahun 2019 Rp50.923.291.151,00 dan Hasil Kerjasama Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.350.824.500,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp1.740.733.425,00.

4.1.1.2 Pendapatan Transfer **TA 2020** Rp7.347.748.112.410,00 **TA 2019** Rp7.300.647.588.241,00
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp7.347.748.112.410,00 atau mencapai 96,87% dari anggaran P.APBD sebesar Rp7.585.386.627.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	7.585.386.627.261,00	7.347.748.112.410,00	96,87	7.300.647.588.241,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.585.386.627.261,00	7.347.748.112.410,00	96,87	7.300.647.588.241,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp47.100.524.169,00 atau 0,64% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019.

4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer **TA 2020** Rp7.347.748.112.410,00 **TA 2019** Rp7.300.647.588.241,00
Pemerintah Pusat – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp7.347.748.112.410,00 atau mencapai 96,87% dari anggaran P. APBD sebesar Rp7.585.386.627.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Bagi Hasil Pajak – LRA	524.668.702.884,00	426.453.173.226,00	81,28	322.412.067.550,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	46.795.009.377,00	42.230.415.196,00	90,25	58.892.050.331,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	2.483.124.579.000,00	2.474.465.343.000,00	99,65	2.713.750.553.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	4.530.798.336.000,00	4.404.599.180.988,00	97,21	4.205.592.917.360,00
Jumlah	7.585.386.627.261,00	7.347.748.112.410,00	96,87	7.300.647.588.241,00



Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp47,100,524,169.00 atau 0,64% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

4.1.1.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
	Rp426.453.173.226,00	Rp322.412.067.550,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp426.453.173.226,00 atau mencapai 81,28% dari anggaran P.APBD sebesar Rp524.668.702.884,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	130.634.258.476,00	69.156.066.942,00	52,94	115.464.306.029,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	389.085.172.511,00	352.726.692.106,00	90,66	201.341.476.998,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	4.949.271.897,00	4.570.414.178,00	92,35	5.606.284.523,00
Alokasi Biaya Pemungutan PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	524.668.702.884,00	426.453.173.226,00	81,28	322.412.067.550,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp104,041,105,676.00 atau 32,27% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

Untuk penerimaan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp69.156.066.942,00 atau 52,94% dari anggaran sebesar Rp130.634.258.476,00. Hal ini terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

4.1.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
	Rp42.230.415.196,00	Rp58.892.050.331,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp42.230.415.196,00 atau mencapai 90,25% dari anggaran P.APBD sebesar Rp46.795.009.377,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Bantuan Operasional Kesehatan	13.806.205.000,00	14.016.205.000,00	101,52	4.246.474.000,00
Akriditas Labkesda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	567.359.000,00	322.579.640,00	56,85	2.284.570.831,00
Bantuan Operasional Sekolah - Afirmasi	169.124.000.000,00	169.080.000.000,00	99,97	231.625.000.000,00
Bantuan Operasional Sekolah - Kinerja	87.199.370.000,00	87.180.000.000,00	99,97	92.302.695.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Museum	1.673.200.000,00	1.588.466.223,00	94,93	1.800.000.000,00
Jumlah	4.530.798.336.000,00	4.404.599.180.988,00	97,21	4.205.592.917.360,00

Realisasi DAK Tahun Anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp199,006,263,628.00 atau 4,73 % dibandingkan dengan realisasi TA 2019.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	Rp37.374.259.306,00	Rp17.680.635.177,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp37.374.259.306,00 atau 65,23% dari anggaran P.APBD sebesar Rp57.293.697.709,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan Hibah	47.421.018.709,00	27.501.580.306,00	57,99	17.680.635.177,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	38.853.018.709,00	18.953.199.351,00	48,78	9.757.229.677,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LRA	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	100,00	5.568.000.000,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan – LRA	3.000.000.000,00	2.980.380.955,00	99,35	2.355.405.500,00
Dana Insentif Daerah – LRA	9.872.679.000,00	9.872.679.000,00	100,00	0,00
Dana Insentif Daerah – LRA	9.872.679.000,00	9.872.679.000,00	100,00	0,00
Jumlah	57.293.697.709,00	37.374.259.306,00	65,23	17.680.635.177,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp19,693,624,129.00 atau 111,39 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.1.2 Belanja – LRA	Rp10.935.643.264.218,05	Rp10.170.845.213.205,25

Tahun Anggaran 2020, realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp10.953.863.324.758,10 atau mencapai 95,13% dari anggaran sebesar Rp11.494.671.486.409,20 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 22 Realisasi Belanja – LRA TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Operasi	8.337.330.773.600,82	8.287.005.336.991,98	99,40	8.899.945.553.856,85
Belanja Modal	1.861.148.260.522,43	1.497.944.969.133,07	80,48	1.249.600.483.637,40
Belanja Tak Terduga	1.296.192.452.286,00	1.168.497.609.591,00	90,15	21.299.175.711,00
Jumlah	11.494.671.486.409,25	10.935.643.264.218,05	95,13	10.170.845.213.205,25

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp764.798.051.012,80 atau 7,51 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

TA 2020

TA 2019

4.1.2.1 Belanja Operasi Rp8.287.005.336.991,98 Rp8.899.945.553.856,85

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp8.287.005.336.991,98 atau mencapai 99,40% dari anggaran belanja P.APBD sebesar Rp8.337.330.773.600,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Realisasi Belanja Operasi TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Pegawai	3.436.553.553.503,42	3.337.823.171.792,00	97,13	3.527.528.304.319,00
Belanja Barang dan Jasa	2.121.916.048.175,40	1.882.423.096.799,98	88,71	2.392.374.120.437,85
Belanja Hibah	2.778.861.171.922,00	3.066.759.068.400,00	110,36	2.972.714.748.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	7.328.381.100,00
Jumlah	8.337.330.773.600,82	8.287.005.336.991,98	99,40	8.899.945.553.856,85

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 tersebut menurun sebesar Rp612.940.216.864,87 atau 6,88 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

TA 2020

TA 2019

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp3.337.823.171.792,00 Rp3.527.528.304.319,00

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.337.823.171.792,00 atau mencapai 97,13% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.436.553.553.503,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Realisasi Belanja Pegawai TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.523.670.113.231,90	2.470.673.040.186,00	97,90	2.530.567.978.620,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	778.186.095.000,00	745.181.990.113,00	95,76	790.281.124.528,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	33.230.737.000,00	32.964.155.158,00	99,20	34.314.000.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	10.545.751.000,00	8.310.030.969,00	78,80	87.499.789.372,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Honorarium PNS	64.567.542.704,00	55.621.878.684,00	86,14	69.631.558.718,00
Honorarium Non PNS	25.967.927.067,52	24.719.239.182,00	95,19	14.443.553.081,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	313.200.000,00	280.650.000,00	89,60	790.300.000,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	72.187.500,00	72.187.500,00	100	0,00
Jumlah	3.436.553.553.503,42	3.337.823.171.792,00	97,13	3.527.528.304.319,00

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2020 tersebut menurun sebesar Rp189.705.132.527,00 atau 5,37% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

4.1.2.1.2 Belanja Barang - Dan Jasa

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
	Rp1.882.423.096.799,98	Rp2.392.374.120.437,85

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.882.423.096.799,98 atau mencapai 88,71% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp2.121.916.048.175,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Bahan Pakai Habis	52.552.918.864,59	47.568.879.014,00	90,52	68.768.928.992,50
Belanja Bahan/Material	75.072.318.524,95	69.170.072.681,78	92,14	89.971.233.877,00
Belanja Jasa Kantor	162.955.644.844,57	144.361.897.022,24	88,59	155.189.101.526,00
Belanja Premi Asuransi	139.127.747.242,00	136.223.415.227,00	97,91	93.678.269.965,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.502.607.167,50	17.505.355.966,00	85,38	20.307.877.385,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	30.378.969.528,20	26.204.644.896,00	86,26	38.160.563.779,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/	16.125.604.009,80	12.197.755.293,00	75,64	48.665.472.849,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.344.999.364,00	2.031.447.307,00	86,63	2.972.685.026,00
Belanja Sewa Alat Berat	440.831.153,60	215.163.906,00	48,81	79.382.900,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.821.286.700,00	20.220.003.770,00	88,60	25.291.403.180,00
Belanja Makanan dan Minuman	63.264.059.748,78	57.013.326.474,00	90,12	97.491.687.859,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.020.854.960,00	4.346.774.136,00	86,57	8.511.295.510,00
Belanja Pakaian Kerja	1.699.621.020,00	1.533.896.875,00	90,25	2.503.198.425,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.277.772.600,00	2.996.131.491,00	91,41	9.545.514.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	320.253.550.435,28	261.092.834.595,00	81,53	475.081.329.063,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	233.000.000,00	211.506.000,00	90,78	246.350.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.410.372.596,00	2.575.824.960,00	75,53	15.673.713.243,00
Belanja Pemeliharaan	148.492.996.940,89	143.813.496.519,60	96,85	174.696.356.102,35



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Jasa Konsultansi	64.057.736.545,00	48.808.068.502,00	76,19	66.982.431.000,00
Belanja Barang Dana BOS	471.969.524.478,00	389.202.569.720,00	82,46	386.300.545.435,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.668.170.318,00	63.853.286.848,00	92,99	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pendukung	368.640.372.005,24	359.012.841.849,50	97,39	345.081.037.513,00
Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	78.148.666.629,00	71.815.290.546,86	91,90	129.472.228.472,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	131.539.641.836,00
Belanja Jasa Event Organizer	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.456.422.500,00	448.613.200,00	18,26	6.163.872.000,00
Belanja Uang Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa Bos	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.121.916.048.175,40	1.882.423.096.799,98	88,71	2.392.374.120.437,85

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 tersebut menurun sebesar Rp509.951.023.637,87 atau 21,32% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

Sebagai catatan bahwa realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2019 berupa honorarium TAPD, terdapat permasalahan berupa uang hilang senilai Rp1.672.987.500,00 yang telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum dengan Tanda Bukti Lapor Nomor STTLP/1991/IX YAN.2.5/2019/SPKT POLRESTABES MEDAN dan telah selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan dokumen Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788 hingga 3791/Pid.B/2019/PN.Mdn diketahui barang bukti sebagaimana pada tabel di bawah ini dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat Laporan Keuangan Tahun 2020 ini diterbitkan, serah terima barang bukti tersebut belum dilaksanakan. Daftar barang bukti yang akan dikembalikan kepada BPKAD berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara uang hilang TA. 2019 senilai Rp1,6M adalah sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Uraian	Nilai
1.	Indra Haposan Nababan	Uang tunai	8.000.000,00
2.	Musa Hardianto Sihombing	Uang tunai	105.000.000,00
		1 buah jam tangan Alexander Christie	-
3.	Nico Demus Sihombing	1 unit mobil Avanza hitam BK 1417 IC beserta STNK dan BPKB	-
		1 unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam BK 5771 PBC beserta STNK	-
4.	Niksar Sitorus	uang tunai	3.428.000,00



Provinsi) ke Sekolah penerima menjadi dari Rekening Kas Umum Negara-RKUN (Pemerintah Pusat) langsung ke Rekening Sekolah. Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk Belanja Hibah Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp7.591.268.400,00 atau 100% kepada partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan belanja bantuan sosial pada APBD untuk Tahun Anggaran 2020.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp7.328.381.100,00

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan belanja bantuan keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	7.328.381.100,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	7.328.381.100,00

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2020 tersebut mengalami penurunan Rp7.328.381.100,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran untuk belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota pada tahun 2020.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.1.2.2 Belanja Modal	Rp1.497.944.969.133,07	Rp1.249.600.483.637,40

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.497.944.969.133,07 atau mencapai 80,48% dari total anggaran belanja P.APD sebesar Rp1.861.148.260.522,43 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Realisasi Belanja Modal TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Modal Tanah	197.027.482.847,00	185.356.708.726,00	94,08	35.324.222.041,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	681.827.430.428,00	421.144.729.678,00	61,77	302.487.781.004,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	258.864.794.344,77	240.314.232.826,07	92,83	218.045.649.622,40
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	555.428.674.416,66	538.515.511.860,00	96,95	584.709.449.585,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	167.999.878.486,00	112.613.786.043,00	67,03	109.033.381.385,00
Jumlah	1.861.148.260.522,43	1.497.944.969.133,07	80,48	1.249.600.483.637,40

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp248,344,485,495.67 atau 19,87% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah TA 2020 TA 2019
Rp185.356.708.726,00 **Rp35.324.222.041,00**

Realisasi belanja modal tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp185.356.708.726,00 atau mencapai 94,08% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp197.027.482.847,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	190.462.682.847,00	180.614.390.724,00	94,82	35.324.222.041,00
Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	6.564.800.000,00	4.742.318.002,00	72,23	0,00
Jumlah	197.027.482.847,00	185.356.708.726,00	94,08	35.324.222.041,00

Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp150.032.486.685,00 atau 424,73% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019. Peningkatan realisasi tanah ini disebabkan pengadaan tanah untuk Islamic center yang terletak di Dusun XI,VIII,VII,V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan luas 50 Hektar dengan nomor sertifikat 2.5/KPTS/338/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan TA 2020 TA 2019
Dan Mesin **Rp421.144.729.678,00** **Rp302.487.781.004,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp421,144,729,678.00 atau mencapai 61,76% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp681.827.430.428,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 30 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	7.145.578.000,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	926.944.641,00	850.846.275,00	91,79	812.329.125,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	10.714.462.700,00	10.521.456.398,00	98,19	23.098.940.218,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	422.510.000,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	138.463.150,00	112.997.500,00	81,60	2.190.770.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.531.250,00	1.500.000,00	97,95	0,00
Pengadaan Alat Ukur	2.550.311.000,00	2.510.219.580,00	98,42	333.073.351,00
Pengadaan Alat Pengolahan	618.282.200,00	595.529.773,00	96,32	1.684.369.134,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	605.166.450,00	489.690.575,00	80,91	228.503.000,00
Pengadaan Alat Kantor	9.396.526.750,00	2.081.475.000,00	22,15	3.184.645.170,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	42.940.703.990,00	39.288.391.677,00	91,49	40.937.249.590,00
Pengadaan Komputer	27.403.952.325,00	26.286.749.935,00	95,92	46.285.993.008,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	777.547.300,00	731.938.980,00	94,13	2.002.130.083,00
Pengadaan Alat Studio	9.849.319.655,00	4.473.334.021,00	45,41	4.969.777.366,00
Pengadaan Alat Komunikasi	426.989.583,00	423.019.500,00	99,07	583.386.100,00
Pengadaan Alat Kedokteran	26.866.291.014,00	20.266.010.272,00	75,43	33.171.413.989,00
Pengadaan Alat Kesehatan	699.861.822,00	658.892.370,00	94,14	1.294.149.417,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.898.880.000,00	1.483.396.350,00	78,12	9.003.588.570,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	166.589.150.198,00	145.006.187.875,00	87,04	63.848.775.440,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.090.800.700,00	1.090.800.700,00	100	570.000.000,00
Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	14.933.600,00	14.933.600,00	100	25.287.350,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	632.101.100,00	615.345.500,00	97,34	1.121.569.000,00
Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin – BOS	377.685.211.000,00	163.642.013.797,00	43,33	59.573.743.093,00
Jumlah	681.827.430.428,00	421.144.729.678,00	61,76	302.487.781.004,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp118,656,948,674.00 atau 39,23% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

Untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS realisasi sebesar Rp163.642.013.797,00 dari anggaran sebesar Rp377.685.211.000,00 atau 43,33% terdiri dari belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp73.705.248.473,00 dan belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 yang masih di rekening bendahara Dana BOS sebesar Rp89.936.765.324,00.



4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan **TA 2020** **TA 2019**
Rp240.314.232.826,07 **Rp218.045.649.622,40**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp240.314.232.826,07 atau mencapai 92,83% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp258.864.794.344,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	255.068.754.344,77	236.617.829.976,07	92,76	213.991.112.236,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.230.700.000,00	2.230.000.000,00	99,96	149.325.704,00
Pengadaan Bangunan Gedung Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan/Kemerdekaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.000.000,00	6.000.000,00	100	3.414.667.466,40
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.559.340.000,00	1.460.402.850,00	93,65	0,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Bangunan Monumen/Bersejarah lainnya	0,00	0,00	0,00	490.544.216,00
Jumlah	258.864.794.344,77	240.314.232.826,07	92,83	218.045.649.622,40

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp22,268,583,203.67 atau 10,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan **TA 2020** **TA 2019**
Rp538.515.511.860,00 **Rp584.709.449.585,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp538.515.511.860,00 atau mencapai 96,95% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp555.428.674.416,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pengadaan Jalan	370.039.600.427,40	359.356.502.821,00	97,11	390.838.856.586,00
Pengadaan Jembatan	25.361.560.720,00	20.200.577.949,00	79,65	41.889.978.153,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	76.315.330.248,76	75.674.568.198,00	99,16	53.844.985.550,00
Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Bangunan Air Rawa	0,00	0,00	0,00	960.728.245,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	72.499.118.651,77	72.368.972.663,00	99,82	57.998.347.106,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	89.924.458,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7.115.792.661,73	7.115.029.500,00	99,98	1.840.998.300,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	346.705.310,00	340.376.667,00	98,17	4.260.446.329,00
Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	777.299.397,00	773.242.542,00	99,47	24.680.623.319,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	250.000.000,00	223.018.339,00	89,20	0,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah	24.582.000,00	24.000.000,00	97,63	49.610.000,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	800.000.000,00	787.330.170,00	98,41	0,00
Pengadaan Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00	1.015.851.426,00
Pengadaan Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	6.677.081.562,00
Pengadaan Jaringan Listrik	1.898.685.000,00	1.651.893.011,00	87	514.046.051,00
Belanja Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	47.954.500,00
Jumlah	555.428.674.416,66	538.515.511.860,00	96,95	584.709.449.585,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2020 tersebut menurun sebesar Rp46,193,937,725.00 atau 7,90% dibandingkan dengan realisasi TA 2019.

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
	Rp112.613.786.043,00	Rp109.033.381.385,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp112.613.786.043,00 atau mencapai 67,03% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp167.999.878.486,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pengadaan Buku	231.199.620,00	229.871.000,00	99,42	1.036.193.800,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	6.104.460.000,00	5.894.595.724,00	96,56	858.100.000,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.179.285.000,00	3.114.771.800,00	97,97	6.930.272.009,00
Pengadaan Hewan	6.146.800.000,00	1.039.104.285,00	16,90	467.574.020,00
Pengadaan Tanaman	890.600.000,00	203.963.140,00	22,90	108.577.294,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	17.866.302.866,00	17.656.418.488,00	98,82	7.281.851.244,00
Pengadaan Aset Tetap	133.581.231.000,00	84.475.061.606,00	63,24	92.350.813.018,00



Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Lainnya - BOS				
Jumlah	167.999.878.486,00	112.613.786.043,00	67,03	109.033.381.385,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp3,580,404,658.00 atau 3,28% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

TA 2020

TA 2019

4.1.2.3 Belanja Tak Terduga Rp1.150.692.958.093,00 Rp21.299.175.711,00

Belanja tak terduga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.150.692.958.093,00 atau mencapai 88,77% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp1.296.192.452.286,00. Realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp1,129.393.782.382.00 atau 5302,52% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019. Belanja Tak Terduga ini melonjak sangat tinggi dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena relokasi anggaran atau refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid – 19 di Provinsi Sumatera Utara. Dari total Belanja Tak Terduga tersebut, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 dialokasikan untuk keperluan siaga darurat dan tanggap darurat bencana non alam pencegahan/penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp1.161.094.447.380,00 sesuai surat kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/269/BPKAD/2021 Tanggal 7 Januari 2021 Perihal Penyampaian Laporan Pencegahan/ Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Sisanya sebesar Rp7.403.162.211,00 dialokasikan untuk belanja diluar Covid-19.

Pada Tahap I rencana kebutuhan barang yang diusulkan OPD yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp512.100.000.000,00 dan terealisasi 100% yang terdiri dari Fungsi Kesehatan sebesar Rp61.508.715.591,00 Penunjang Kesehatan sebesar Rp201.797.800.000,00 Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp300.302.200.000,00 dan Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pada Tahap II rencana kebutuhan barang yang diusulkan OPD yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp500.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp418.195.365.850,00 atau 84% Fungsi Kesehatan sebesar Rp168.195.365.850,00 Penunjang Kesehatan sebesar Rp112.180.307.800,00 Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp2.500.000.000,00 dan Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp135.319.692.200,00.

Pada Tahap III rencana kebutuhan barang yang diusulkan OPD yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp240.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp230.799.081.530,00 atau 96% Fungsi Kesehatan sebesar Rp102.840.867.447,00 Penunjang Kesehatan sebesar Rp65.775.246.798,00 Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp625.000.000,00 dan Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp 61.557.967.285,00, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 34 Realisasi Belanja Tak Terduga TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Tanggal	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%
Covid-19		1.161.094.447.380,00	0,00	0,00
SP2D No. 507	20 Maret 2020	10.000.000.000,00	0,00	0,00
SP2D No. 1030	20 April 2020	22.626.398.791,00	0,00	0,00
SP2D No. 1158	24 April 2020	199.456.973.552,00	0,00	0,00
SP2D No. 1511	06 Mei 2020	260.000.000.000,00	0,00	0,00
SP2D No. 1811	15 Mei 2020	39.184.516.800,00	0,00	0,00
SP2D No. 2099	20 Mei 2020	40.000.000.000,00	0,00	0,00
SP2D No. 3717	14 Agustus 2020	150.000.000.000,00	0,00	0,00
SP2D No. 4429	21 September 2020	60.000.000.000,00	0,00	0,00
SP2D No. 4805	09 Oktober 2020	49.027.476.707,00	0,00	0,00
SP2D No. 7034	15 Desember 2020	100.000.000.000,00	0,00	0,00
SP2D No. 9609	30 Desember 2020	127.958.214.083,00	0,00	0,00
SP2D No. 9711	30 Desember 2020	102.840.867.447,00	0,00	0,00
Non Covid-19		7.403.162.211,00	21.299.175.711,00	64,33
Jumlah		1.168.497.609.591,00	21.599.175.711,00	5386,10

Penjelasan Belanja Tidak Terduga Khusus Penanganan Covid-19

Penggunaan dana BTT Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

- Laporan Kas Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk gugus tugas penanganan penanggulangan COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan	Rencana Kebutuhan	Realisasi SP2D	OPD
Tahap I			
<i>Fungsi Kesehatan Dan Penunjang Kesehatan</i>	201.797.800.000,00	201.797.800.000,00	
Fungsi Kesehatan/Medis	140.289.084.409,00	140.289.084.409,00	Dinkes
Fungsi Penunjang Kesehatan/Non Medis	61.508.715.591,00	61.508.715.591,00	BPBD
<i>Dampak Sosial (Jaring Pengaman Sosial)</i>	300.302.200.000,00	300.302.200.000,00	BPBD
<i>Penanganan Dampak Ekonomi</i>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	BPBD
Total Tahap I	512.100.000.000,00	512.100.000.000,00	
Tahap II			
<i>Fungsi Kesehatan Dan Penunjang Kesehatan</i>	280.375.673.650,00	280.375.673.650,00	
Fungsi Kesehatan/Medis	168.195.365.850,00	168.195.365.850,00	Dinkes
Fungsi Penunjang Kesehatan/Non Medis	112.180.307.800,00	112.180.307.800,00	BPBD
<i>Dampak Sosial (Jaring Pengaman Sosial)</i>	56.325.000.000,00	2.500.000.000,00	BPBD
<i>Penanganan Dampak Ekonomi</i>	163.299.326.350,00	135.319.692.200,00	BPBD
Total Tahap II	500.000.000.000,00	418.195.365.850,00	



Tahap III			
<i>Fungsi Kesehatan Dan Penunjang Kesehatan</i>	177.490.700.000,00	168.616.114.245,00	
Fungsi Kesehatan/Medis	111.000.000.000,00	102.840.867.447,00	Dinkes
Fungsi Penunjang Kesehatan/Non Medis	66.490.700.000,00	65.775.246.798,00	BPBD
<i>Dampak Sosial (Jaring Pengaman Sosial)</i>	625.000.000,00	625.000.000,00	BPBD
<i>Penanganan Dampak Ekonomi</i>	61.884.300.000,00	61.557.967.285,00	BPBD
Total Tahap III	240.000.000.000,00	230.799.081.530,00	
Tahap I, II dan III			
<i>Fungsi Kesehatan Dan Penunjang Kesehatan</i>	659.664.173.650,00	650.789.587.895,00	
Fungsi Kesehatan/Medis	419.484.450.259,00	411.325.317.706,00	Dinkes
Fungsi Penunjang Kesehatan/Non Medis	240.179.723.391,00	239.464.270.189,00	BPBD
<i>Dampak Sosial (Jaring Pengaman Sosial)</i>	357.252.200.000,00	303.427.200.000,00	BPBD
<i>Penanganan Dampak Ekonomi</i>	235.183.626.350,00	206.877.659.485,00	BPBD
Total Tahap I, II DAN III	1.252.100.000.000,00	1.161.094.447.380,00	
Pengembalian BTT		17.801.199.213,00	Dinkes
		3.452.285,00	BPBD
Total Pengembalian BTT		17.804.651.498,00	
Total Penggunaan BTT		1.143.289.795.882,00	

2. Kas di Bendahara Covid-19

Kas di Bendahara khusus Covid-19 per 31 Desember 2020 sebesar Rp190.636.399.371,00 adalah sebagai berikut:

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bank Sumut nomor rekening AC 11001020001366 sebesar Rp87.586.023.025,00. Pada tanggal 12 Januari 2021 telah bersaldo nihil.
- Dinas Kesehatan di Bank Sumut nomor rekening AC 10001020001431 sebesar Rp103.050.376.346,00. Pada tanggal 8 Januari 2021 telah bersaldo nihil.

3. Persediaan BTT per 31 Desember 2020 sebesar Rp98.397.747.531,00 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan BTT	Dinas Kesehatan	Badan
		Penanggulangan Bencana Daerah
<i>Bahan Pakai Habis</i>	43.519.938.608,00	54.877.808.923,00
<i>Bahan</i>	10.788.224,00	0,00
<i>Bahan Kimia</i>	10.788.224,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

<i>Suku Cadang</i>	7.263.105.202,00	806.162.683,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	5.127.232.526,00	631.162.683,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	2.135.872.676,00	175.000.000,00
<i>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</i>	6.971.085.941,00	26.296.243.740,00
Alat Tulis Kantor	48.046.985,00	557.997.500,00
Kertas dan Cover	34.272.150,00	28.400.000,00
Bahan Komputer	46.658.500,00	24.900.000,00
Perabot Kantor	6.814.924.106,00	25.684.946.240,00
Alat Listrik	23.786.200,00	0,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.398.000,00	
<i>Obat-Obatan</i>	27.160.709.241,0	27.695.402.500,00
	0	
Obat	922.426.861,00	156.247.500,00
Obat-Obatan Lainnya	26.238.282.380,0	27.539.155.000,00
	0	
<i>Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan</i>	0,00	80.000.000,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		80.000.000,00
<i>Natura dan Pakan</i>	2.114.250.000,00	0,00
Natura	2.114.250.000,00	0,00
<i>Bahan Tak Habis Pakai</i>	0,00	0,00
Pipa	0,00	0,00
<i>Jumlah Persediaan BTT</i>	43.519.938.608,0	54.877s.808.923,0
	0	0

4. Aset Tetap bersumber dari dana BTT per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.315.631.328,00 dengan rincian sebagai berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alat Kantor dan Rumah Tangga :		543.962.000
Mesin Fotokopi Kyoceria	12.000.000	
Lemari Arsip Besi 2 Pintu (10 unit)	50.000.000	
Filling Cabinet 4 Laci (5 unit)	12.500.000	
Conainer House 40 Feets	198.440.000	
Conainer House 20 Feets (2 unit)	264.022.000	
Kamera Fuji Film X-A20	7.000.000	
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar :		5.400.000
Printer Canon Pixma	1.400.000	
Printer Epson L3110 (1 unit)	4.000.000	
Komputer :		144.460.000



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Notebook Acer	5.600.000	
Laptop Acer Nitro 5 (3 unit)	82.500.000	
Macbook Air	30.360.000	
PC AIO HP200 (2 unit)	26.000.000	
<hr/>		
<i>Aset Tetap BTT BPBD</i>		<i>693.822.000</i>

Dinas Kesehatan

Alat Angkutan : 16.637.653.328

Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain BTT Covid (Mobil Operasional) BK 1534 J 600.000.000

Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain BTT Covid (Mobil Operasional) BK 1072 Z 495.000.000

Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) BTT Covid (Mobil Bus) BK 8638 J 4.253.000.000

Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) BTT Covid (Mobil Bus) BK 8639 J 4.253.000.000

Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) BTT Covid (Mobil Bus) 4.015.000.000

Mobil Ambulance BTT (Mobil Ambulans Bertekanan Negatif) BK 7898 J 750.000.000

Mobil Ambulance BTT (Mobil Ambulans Bertekanan Negatif) BK 7899 J 750.000.000

Mobil Ambulance BTT (Mobil Jenazah) BK 1533 J 555.000.000

Mobil Ambulance BTT (Mobil Jenazah) 425.000.000

Mobil Ambulance (Beretkanan Negatif) BK 1796 J 541.653.328

Bangunan Gedung : 766.006.000

Bangunan Gedung Laboratorium Permanen UPT. Laboratorium Kesehatan 317.049.000

Bangunan Gedung Kantor Permanen Gudang Veteran 149.531.000

Bangunan Gedung Kantor Permanen Rehab Gudang Lapema 299.426.000

Aset Tetap BTT Dinas Kesehatan 17.403.659.328

Dinas Tenaga Kerja

Komputer 141.900.000

P.C Unit 114.400.000

Printer (Peralatan Personal Komputer) 27.500.000

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 2.000.000

Megaphone 2.000.000

Aset Tetap BTT Dinas Tenaga Kerja 143.900.000



Dinas Komunikasi dan Informatika

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		74.250.000
Megaphone	3.900.000	
Megaphone	7.500.000	
Megaphone	3.600.000	
Telephone Mobile	35.000.000	
Telephone Mobile	20.000.000	
Megaphone	4.250.000	

Aset Tetap BTT Dinas Kominfo *74.250.000*

Total Aset Tetap Belanja Tak Terduga ***18.315.631.328***

5. Aset Lainnya bersumber dari dana BTT per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.210.773.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

Lemari Locker	5.000.000	RSU Haji Medan
Mesin Cuci	10.000.000	RSU Haji Medan
AC Split 1 PK 2 bh	7.450.000	RSU Haji Medan
Printer	21.000.000	RSU Haji Medan
Scanner	6.600.000	RSU Haji Medan
Laptop	8.000.000	RSU Haji Medan
Biosafety Cabinet Class II A	496.000.000	RSU Haji Medan
UV Chamber	95.200.000	RSU Haji Medan
Laminar Air Flow	52.500.000	RSU Haji Medan
Auto Clave	154.000.000	RSU Haji Medan
UPS 20 KV	155.000.000	RSU Haji Medan
Digital Vortex	14.375.000	RSU Haji Medan
Showcase Cooler 2 Pintu	22.850.000	RSU Haji Medan
mikro Centrifuge	95.000.000	RSU Haji Medan
Freezer-80	165.000.000	RSU Haji Medan
Freezer - 20 C To 8 C	21.500.000	RSU Haji Medan
Drybath	38.000.000	RSU Haji Medan
Spin Down Mini Centrifuge	9.240.000	RSU Haji Medan
Bioteke -PCR System	1.311.000.000	RSU Haji Medan
Bioteke - Extraction System	900.000.000	RSU Haji Medan
Unit AC Indoor outdoor low static	229.891.400	RSU Haji Medan
AC Split 1 PK	52.000.000	RSU Haji Medan
CCTV Komplit	127.745.000	RSU Haji Medan
CCTV Komplit	2.555.000	RSU Haji Medan
Televisi	149.400.000	RSU Haji Medan
Monitor Pasien	134.349.220	RSU Haji Medan
Enchocardiography	660.000.000	RSU Haji Medan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Defibrilator	313.500.000	RSU Haji Medan
Strecher	56.000.000	RSU Haji Medan
Trolley Emergency	51.700.400	RSU Haji Medan
Trolley Obat	47.400.800	RSU Haji Medan
Exhaust Udara	1.190.000.000	RSU Haji Medan
Exhaust Filter Portable	144.000.000	RSU Haji Medan
Pekerjaan Instalasi	164.200.000	RSU Haji Medan
Box Panel Exhaust	55.800.000	RSU Haji Medan
AC Split 1 Pk	10.400.000	RSU Haji Medan
AC Split 2 Pk	17.000.000	RSU Haji Medan
TV Ruangan Covid 19	45.000.000	RSU Haji Medan
Kursi Tunggu	155.000.000	RSU Haji Medan
Meja Nurse Station	27.720.000	RSU Haji Medan
Meja Nurse Station	30.800.000	RSU Haji Medan
Meja Nurse Station	20.597.000	RSU Haji Medan
Kursi Nurse Station	45.000.000	RSU Haji Medan
Komputer PC	82.500.000	RSU Haji Medan
Printer	38.500.000	RSU Haji Medan
Lemari Loker 2 Pintu	45.000.000	RSU Haji Medan
Lemari Loker 4 Pintu	34.000.000	RSU Haji Medan
Dispenser	119.700.000	RSU Haji Medan
Tensimeter Digital	9.000.000	RSU Haji Medan
Thermogun	17.000.000	RSU Haji Medan
Stetoscope Digital	42.000.000	RSU Haji Medan
Spil Kit	3.400.000	RSU Haji Medan
Nebulizer	33.000.000	RSU Haji Medan
Incubator	438.000.000	RSU Haji Medan
Blood Infusion Warmer	188.000.000	RSU Haji Medan
CPAP anak	221.455.291	RSU Haji Medan
Trolley Emergency	279.251.000	RSU Haji Medan
Stretcher brancard	16.000.000	RSU Haji Medan
Video laryngoscope dewasa dan neonatus	460.683.300	RSU Haji Medan
Monitoring Central	258.000.000	RSU Haji Medan
Ambu Bag	14.000.000	RSU Haji Medan
Film viewer	65.000.000	RSU Haji Medan
Dc Shock	409.600.000	RSU Haji Medan
Suction pupm	129.944.200	RSU Haji Medan
Lampu UV	19.956.591	RSU Haji Medan
Suction WSD	37.000.000	RSU Haji Medan
Neopuff	38.000.000	RSU Haji Medan
Fetal doppler	3.500.000	RSU Haji Medan
Bioteke - Real Time	655.500.000	RSU Haji Medan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

UPS 10KV	55.000.000	RSU Haji Medan
Bioteke - Sistem Ekstraksi	900.000.000	RSU Haji Medan
Vorter Mixer	4.620.000	RSU Haji Medan
Mini Centrifuge	9.240.000	RSU Haji Medan
Frezeer - 40C Until -86C	250.000.000	RSU Haji Medan
Frezeer - 25C Until -8C	21.500.000	RSU Haji Medan
Rotator Plate Machine	39.200.000	RSU Haji Medan
Centrifuge High Speed	158.450.000	RSU Haji Medan
Bioafety Cabinet Type Class II B (2 People)	606.000.000	RSU Haji Medan
Hepa Filter	304.000.000	RSU Haji Medan
Bangunan Gedung	18.490.400.388	RSU Haji Medan
Bangunan Gedung	6.100.000	RSU Haji Medan

31.820.274.590

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PC AIO HP200 (8 unit)	104.000.000	(5 unit Dinas Perindag, 1 unit Agus Tripriyono, 1 unit Dahler, dan 1 unit Dinas Sosial)
Laptop Acer Nitro 5	27.500.000	(Bidang Keuangan Satgas Covid-19)
LCD Projector (2 unit)	12.000.000	(Dinas Perindag)
Printer Epson L3110 (3 unit)	12.000.000	(Dinas Perindag)
Printer Epson L3110 (1 unit)	4.000.000	(Dinas Sosial)
Macbook Air 2018	26.050.000	(dr. Handoyo H)
Filling Cabinet 4 Tingkat (17 unit)	65.875.000	(Inspektorat)
Printer Epson L3110 (17 unit)	56.312.500	(Inspektorat)
Laptop Lenovo (22 unit)	363.256.250	(Inspektorat)
Lemari Besi	8.268.241	(Posko Gugus Tugas)
Alat Penghancur Kertas	9.470.286	(Posko Gugus Tugas)
Meja Kerja Kayu	159.585.195	(Posko Gugus Tugas)
Kursi Rapat	102.964.675	(Posko Gugus Tugas)
Kursi Putar	37.972.440	(Posko Gugus Tugas)
Kursi Biasa	188.773.760	(Posko Gugus Tugas)
Partisi	376.440.750	(Posko Gugus Tugas)
Pembatas Antrian	14.916.660	(Posko Gugus Tugas)
Sofa	48.248.475	(Posko Gugus Tugas)
Meja Kerja Staf	97.914.289	(Posko Gugus Tugas)
Meja Kerja Staf	19.286.575	(Posko Gugus Tugas)
Air Cleaner	83.264.184	(Posko Gugus Tugas)
Mesin Pengereng Tangan	9.483.100	(Posko Gugus Tugas)
Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	57.782.835	(Posko Gugus Tugas)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Kipas Angin	20.868.000	(Posko Gugus Tugas)
Printer	36.907.200	(Posko Gugus Tugas)
Alat Pemadam Kebakaran	12.302.400	(Posko Gugus Tugas)
PC Unit (15 unit)	309.952.875	(Posko Gugus Tugas)
Laptop (6 unit)	125.103.000	(Posko Gugus Tugas)
	2.390.498.690	
Jumlah Aset Lainnya BTT	34.210.773.280	

4.1.3 Transfer **TA 2020**
Rp1.717.964.170.000,00 **TA 2019**
Rp3.269.478.492.542,00
 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada 33 Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar Rp1.717.964.170.000,00 atau mencapai 100% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp1.717.964.170.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Transfer TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Kota Medan	414.168.796.427,00	414.168.796.427,00	100	1.245.070.749.711,00
Kota Binjai	32.158.873.195,00	32.158.873.195,00	100	50.910.082.579,00
Kota Tebing Tinggi	29.049.668.069,00	29.049.668.069,00	100	41.223.925.266,00
Kota Pematangsiantar	36.481.422.279,00	36.481.422.279,00	100	46.288.450.288,00
Kota Sibolga	18.175.748.730,00	18.175.748.730,00	100	24.486.276.018,00
Kota Tanjung Balai	23.418.237.738,00	23.418.237.738,00	100	36.516.025.064,00
Kabupaten Batubara	48.871.521.540,00	48.871.521.540,00	100	75.520.299.246,00
Kabupaten Asahan	83.668.269.894,00	83.668.269.894,00	100	117.227.609.674,00
Kabupaten Dairi	31.894.439.511,00	31.894.439.511,00	100	53.113.096.549,00
Kabupaten Deli Serdang	155.020.668.328,00	155.020.668.328,00	100	278.636.286.784,00
Kabupaten Serdang Bedagai	63.106.133.816,00	63.106.133.816,00	100	88.539.296.639,00
Kabupaten Karo	39.957.933.084,00	39.957.933.084,00	100	81.474.267.106,00
Kabupaten Labuhan Batu	63.009.442.964,00	63.009.442.964,00	100	87.080.489.425,00
Kabupaten Langkat	72.886.818.526,00	72.886.818.526,00	100	135.585.542.669,00
Kabupaten Mandailing Natal	41.338.635.806,00	41.338.635.806,00	100	88.307.907.250,00
Kabupaten Nias	16.260.913.654,00	16.260.913.654,00	100	27.598.430.859,00
Kabupaten Simalungun	70.856.000.377,00	70.856.000.377,00	100	102.972.917.965,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	34.020.496.422,00	34.020.496.422,00	100	59.477.611.279,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	40.976.116.899,00	40.976.116.899,00	100	58.210.474.473,00
Kabupaten Tapanuli Utara	44.839.871.597,00	44.839.871.597,00	100	52.486.381.654,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	25.411.707.455,00	25.411.707.455,00	100	47.872.738.053,00
Kabupaten Toba Samosir	35.739.631.034,00	35.739.631.034,00	100	48.065.422.313,00
Kabupaten Samosir	22.250.326.996,00	22.250.326.996,00	100	32.000.332.470,00
Kota Padang sidempuan	27.081.293.159,00	27.081.293.159,00	100	37.802.865.494,00
Kabupaten Padang Lawas	39.189.934.251,00	39.189.934.251,00	100	53.207.862.944,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	38.062.860.595,00	38.062.860.595,00	100	55.040.385.388,00
Kabupaten Pakpak Bharat	12.328.006.465,00	12.328.006.465,00	100	17.737.404.791,00
Kabupaten Nias Selatan	27.973.933.154,00	27.973.933.154,00	100	49.914.511.210,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	37.526.461.431,00	37.526.461.431,00	100	56.836.065.938,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	39.036.805.134,00	39.036.805.134,00	100	62.773.905.230,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Kabupaten Nias Utara	18.928.243.086,00	18.928.243.086,00	100	21.910.416.727,00
Kabupaten Nias Barat	14.562.779.022,00	14.562.779.022,00	100	13.031.533.149,00
Kota Gunungsitoli	19.712.179.362,00	19.712.179.362,00	100	22.558.928.337,00
Jumlah	1.717.964.170.000,00	1.717.964.170.000,00	100	3.269.478.492.542,00

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2020 tersebut menurun sebesar Rp1,551,514,322,542.00 atau 47,45% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019. Penurunan ini dikarenakan Provinsi Sumatera Utara telah membayar hutang Dana Bagi Hasil Pajak kepada 33 Kabupaten/ Kota.

4.1.4 Surplus/Defisit TA 2020 TA 2019
Rp262.752.316.272,94 **(Rp360.725.070.277,94)**

Realisasi Surplus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp262.752.316.272,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Surplus Defisit TA. 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi TA 2019
Pendapatan	13.077.362.353.824,00	12.916.359.750.490,99	98,77	13.079.598.635.469,31
Belanja + Transfer	13.212.635.656.409,25	12.653.607.434.218,05	95,76	13.440.323.705.747,25
Surplus/Defisit	(135.273.302.585,25)	262.752.316.272,94	194,24	(360.725.070.277,94)

Realisasi surplus Tahun Anggaran 2020 tersebut meningkat sebesar Rp623,477,386,550.88 atau mencapai 172,80% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

4.1.5 Pembiayaan Netto TA 2020 TA 2019
Rp236.597.738.158,25 **Rp697.322.808.436,19**

Realisasi pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp236.597.738.158,25 atau 174,90 % dari anggaran P.APBD sebesar Rp135,273,302,585.25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Pembiayaan TA 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Penerimaan Pembiayaan	235.273.302.585,25	336.597.738.158,25	143,10	981.167.561.436,19
Penggunaan (SiLPA)	235.273.302.585,25	336.597.738.158,25	143,10	981.167.561.436,19
Penerimaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100	283.844.753.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100	283.844.753.000,00
Pembiayaan Netto	135.273.302.585,25	236.597.738.158,25	174,90	697.322.808.436,19



4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan **TA 2020** **Rp336.597.738.158,25** **TA 2019** **Rp981.167.561.436,19**
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp336.597.738.158,25 atau mencapai 143,10% dari anggaran P.APBD sebesar Rp235.273.302.585,25.

4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan **TA 2020** **Rp100.000.000.000,00** **TA 2019** **Rp283.844.753.000,00**
Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp100.000.000.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran belanja P.APBD sebesar Rp100.000.000.000,00.

Tabel 38 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi TA 2019
Penyertaan Modal kepada PT Perkebunan	0,00	0,00	0,00	283.844.753.000,00
Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100	0,00
Jumlah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100	283.844.753.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp183.844.753.000,00 atau mencapai 64,77% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019.

4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran **TA 2020** **Rp499.350.054.431,19** **TA 2019** **Rp336.597.738.158,25**

SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp499.350.054.431,19 Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer, ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 39 Perhitungan SiLPA TA 2020 dan TA 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
PENERIMAAN				
Pendapatan	13.077.362.353.824,00	12.916.359.750.490,99	98,77	13.079.598.635.469,31
Pembiayaan	235.273.302.585,25	336.597.738.158,25	143,10	981.167.561.436,19
Jumlah Penerimaan	13.312.635.656.409,25	13.252.957.488.649,24	0,31	14.060.766.196.905,50
PENGELUARAN				
Belanja + Transfer	13.212.635.656.409,25	12.653.607.434.218,05	95,76	13.440.323.705.747,25
Pembiayaan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100	283.844.753.000,00
Jumlah Pengeluaran	13.312.635.656.409,25	12.753.607.434.218,05	4,23	13.724.168.458.747,25
SiLPA	0,00	499.350.054.431,19	0,00	336.597.738.158,25

Jumlah realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp13.252.957.488.649,24 atau 0,31% dari anggaran sebesar Rp13.312.635.656.409,25.



Selisih sebesar Rp59.678.167.760,01. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp807.808.708.256,26 atau 5,74%.

Jumlah realisasi pengeluaran belanja, transfer dan pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp12.753.607.434.218,05 atau 4,19% dari anggaran sebesar Rp13.312.635.656.409,25. Selisih sebesar Rp559.028.222.191,20. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp970.561.024.529,20 atau 7,07%.

4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL Akhir.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp336.597.738.158,25	Rp981.167.561.436,19
Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp336.597.738.158,25 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2019 sebesar Rp981.167.561.436,19 maka terdapat penurunan sebesar Rp644,569,823,277.94 atau 65,69%.		

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp336.597.738.158,25	Rp981.167.561.436,19
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp336.597.738.158,25 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp981.167.561.436,19 maka terdapat penurunan sebesar Rp644,569,823,277.94 atau 65,69%.		

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp499.350.054.431,19	Rp336.597.738.158,25

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp499.350.054.431,19 Merupakan selisih antara:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp 262.752.316.272,94
- Pembiayaan Netto	Rp 236.597.738.158,25
SiLPA Tahun berjalan	Rp 499.350.054.431,19

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp336.597.738.158,25 maka terdapat kenaikan sebesar Rp162.752.316.272,94 atau 65,69 %.

4.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
4.3.1 Aset	Rp17.694.490.981.578,69	Rp18.616.601.437.549,50
Saldo Aset per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp17.694.490.981.578,69 dan Rp18.616.601.437.549,50 disajikan dengan rincian sebagai berikut:		



Tabel 40 Rincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Aset Lancar	1.032.600.741.924,52	2.027.613.806.985,31	(995.013.065.060,79)	(49,07)
Investasi Jangka Panjang	3.688.650.513.148,55	3.469.649.740.656,10	219.000.772.492,45	6,31
Aset Tetap	11.021.348.370.947,60	11.345.694.757.369,30	(324.346.386.421,67)	(2,86)
Aset lainnya	1.951.891.355.557,98	1.773.643.132.538,79	178.248.223.019,19	10,05
Jumlah	17.694.490.981.578,69	18.616.601.437.549,50	(922.110.455.970,82)	(4,95)

Berdasarkan rincian pada Tabel 40 di atas, diketahui bahwa total Aset per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebanyak Rp922.110.455.970,82 atau 4,95%.

Penurunan paling besar adalah pada Aset Lancar sebesar Rp995.013.065.060,79 atau 49,07%. Selain Aset Lancar, Aset yang mengalami penurunan adalah Aset Tetap yaitu turun sebesar Rp324.346.386.421,67 atau 2,86%. Penurunan ini terjadi dikarenakan akumulasi penyusutan bertambah lebih besar dibanding penambahan nilai perolehan aset tetap.

Komposisi aset berdasarkan kelompok kode rekening adalah:

Aset	2020	2019
Aset Lancar	5,84%	10,89%
Investasi Jangka Panjang	20,85%	18,64%
Aset Tetap	62,29%	60,94%
Aset lainnya	11,03%	9,53%
<i>Jumlah</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

Dapat dilihat bahwa Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbesar pada tahun 2020 dan tahun 2019 paling besar adalah Aset Tetap yaitu 62,29% dan 60,94% dari total Aset.

4.3.1.1 Aset Lancar 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp1.032.600.741.924,52 **Rp2.027.613.806.985,31**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.032.600.741.924,52 dan Rp2.027.613.806.985,31 disajikan sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Kas di Kas Daerah	476.782.631.305,19	235.273.302.585,25
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.106.640.436,00	144.694.295,00
Kas di Bendahara BLUD	3.278.113.187,00	10.871.232.990,00
Kas di Bendahara BOS	18.193.697.903,00	90.320.563.026,00
Piutang pendapatan	195.785.862.266,79	2.687.320.509.627,00
Piutang lainnya	94.851.355.650,20	99.584.021.247,18
Penyisihan piutang	(24.253.029.581,99)	(1.244.362.707.992,12)
Beban dibayar dimuka	1.939.457.251,34	2.721.460.796,00
Persediaan	264.916.013.507,00	145.740.730.411,00
Jumlah Aset Lancar	1.032.600.741.924,52	2.027.613.806.985,31

Dibandingkan dengan saldo tahun 2019, aset lancar turun sebesar Rp995.013.065.060,78 atau 49,07%. Penurunan cukup besar tersebut disebabkan oleh Piutang Pendapatan yang turun sebesar Rp2.491.534.647.360,21 (92,71%) dan Penyisihan Piutang turun sebesar Rp1.220.109.678.410,13 (98,05%). Kenaikan terbesar pada Aset Lancar yaitu Kas di Kas Daerah Rp241.509.328.719,94 atau sebesar 102.65%.

4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah 31 Desember 2020 Rp476.782.631.305,19 31 Desember 2019 Rp235.273.302.585,25
Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah yang berada di rekening Bank Sumut : AC No 100.01.000623.0 sebesar Rp476.782.631.305,19. Saldo tersebut terdiri dari:

Uraian Kas di Kas Daerah	2020	2019
1. Sisa Dana BOS Reguler penyaluran	42.064.149.872,00	30.732.485.181,00
2. Sisa Dana BOS Afirmasi	1.000.000,00	1.000.000,00
3. Sisa Dana BOS Kinerja	84.695.000,00	84.695.000,00
4. Sisa Dana Pajak Rokok Triwulan IV yang belum disalurkan	93.267.495.760,00	0,00
5. Sisa Dana DAK Fisik (Reguler dan Penugasan)	14.382.666.296,00	23.529.844.339,00
6. Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	1.030.142.800,00	145.938.700,00
7. Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	15.016.842.960,00	7.124.544.120,00
8. Sisa Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	165.000.000,00	1.788.000.000,00
9. Sisa Dana PK2 dan UKM	467.097.000,00	184.490.000,00
10. Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	39.229.868,00	244.779.360,00
11. Sisa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	99.809.956,00	84.733.777,00
12. Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Tambahan	3.540.502.408,00	478.182.877,00
13. Sisa Dana Insentif Daerah	5.916.822.522,00	0,00
14. Dana eksekusi Kasus Pidana PDAM	3.073.607.605,00	0,00



Tirtanadi dari Kejari Belawan		
15. Lain-lain	297.633.569.258,19	170.874.609.231,25
<i>Jumlah Kas di Kas Daerah</i>	<i>476.782.631.305,19</i>	<i>235.273.302.585,25</i>

Terdapat saldo kas di Rekening penampungan (IA) Bank sumut yang belum disalurkan oleh Bank Sumut sebesar Rp39.649.589.479,86 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	No. Rekening	Jumlah (Rp)
1. HH IW/Taperum/Askes	100002240701047360	0,00
2. HH Transfer Kasda Pemprov	100002240701341360	39.198.751.211,86
3. HH Setoran Titipan Pajak Pemprov	10000240703304360	450.838.268,00
<i>Jumlah</i>		<i>39.649.589.479,86</i>

4.3.1.1.2 Kas di Bendahara	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan SKPD sampai dengan akhir periode 31 Desember 2020 namun telah disetor pada tahun 2020.

4.3.1.1.3 Kas di Bendahara	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pengeluaran	Rp1.106.640.436,00	Rp144.694.295,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UYHD, Hutang PFK dan sisa kas dan setara kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode.

Pada tahun 2019 masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor ke akun kas daerah pada tahun 2020 sebesar Rp144.694.295,00 yaitu:

- Dinas Pendidikan terdapat sisa UYHD sebesar Rp40.460.000,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 15 Januari 2020.
- Dinas Kesehatan terdapat pengembalian belanja barang dan jasa sebesar Rp11.623.797,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 9 Januari 2020.
- Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat sisa UYHD sebesar Rp71.224.336,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 7 Januari 2020 (Rp63.774.336,00), tanggal 14 Januari 2020 (Rp700.000,00) dan tanggal 15 Januari 2020 (Rp6.750.000,00).
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp9.331.424,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 1 Januari 2020.
- Rumah Sakit Umum Haji Daerah terdapat Hutang PFK sebesar Rp1.026.338,00.

Sampai dengan 31 Desember 2020 masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.106.640.436,00 yang terdiri dari:

- a. Sisa UYHD berupa sisa UP/GU/TU dan pengembalian belanja sebesar Rp1.095.612.036,00 terdiri dari:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp161.362.500,00 terdapat Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yg retur atau rekeningnya salah sehingga akhir tahun belum sempat disalurkan kembali, disetor ke Kas Daerah tanggal 11 Januari 2021.
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat sisa UYHD sebesar Rp929.775.039,00 terdiri dari sisa GU Rp847.300.458,00 dan sisa TU Rp82.474.581,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 5 Januari 2021.
 - iii. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdapat sisa GU sebesar Rp4.474.497,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 6 Januari 2021.
- b. Hutang PFK sebesar Rp11.028.400,00 Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu yang merupakan Hutang PFK Pajak sejak tahun 2016 belum disetor ke kas negara.

Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 Dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2019	Mutasi		Per 31 Desember 2020
		Penambahan	Pengurangan	
A. Sisa UP/GU/TU/LS				
Dinas Pendidikan	40.460.000,00	161.362.500,00	(40.460.000,00)	161.362.500,00
Dinas Kesehatan	11.623.797,00	0,00	(11.623.797,00)	0,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	71.224.336,00	0,00	(71.224.336,00)	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	929.775.039,00	0,00	929.775.039,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.331.424,00	0,00	(9.331.424,00)	0,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	4.474.497,00	0,00	4.474.497,00
<i>Jumlah A</i>	<i>132.639.557,00</i>	<i>1.095.612.036,00</i>	<i>(132.639.557,00)</i>	<i>1.095.612.036,00</i>
B. Utang Pajak				
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	1.026.338,00	0,00	(1.026.338,00)	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.028.400,00	0,00	0,00	11.028.400,00
<i>Jumlah B</i>	<i>12.054.738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(1.026.338,00)</i>	<i>11.028.400,00</i>
Jumlah A+ B	144.694.295,00	1.095.612.036,00	(133.665.895,00)	1.106.640.436,00



4.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

31 Desember 2020 **31 Desember 2019**
Rp3.278.113.187,00 **Rp10.871.232.990,00**

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 dan sebesar Rp3.278.113.187,00 dan Rp10.871.232.990,00 merupakan saldo Kas di Bendahara RSU Haji Medan yang berasal dari pendapatan jasa kesehatan yang diterima dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
· Saldo Kas	307.468,00	10.383.658,00
· BNI AC 0057865979	52.432.187,00	9.794.487,00
· Bank Mandiri AC 106.00.00808249	1.581.983.121,00	1.890.628.267,00
· Bank Sumut AC 109.0204.018428-8	0,00	157.561.640,00
· Bank Sumut (Giro) 109.0103.00000-44	353.078.821,00	48.395.284,00
· Bank Sumut (Deposito) 317069	0,00	1.000.000.000,00
· Bank Syariah Mandiri AC 7133877748	81.176.060,00	7.754.469.654,00
· Bank Muamalat AC 2140013984	209.135.530,00	0,00
· Bank Muamalat (Deposito) No. 4116871	1.000.000.000,00	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>3.278.113.187,00</i>	<i>10.871.232.990,00</i>

4.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2020 **31 Desember 2019**
Rp18.193.697.903,00 **Rp90.320.563.026,00**

Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan akun yang menampung dana BOS pada sekolah yang menjadi Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 722 sekolah terdiri dari 427 SMA Negeri, 268 SMK Negeri dan 29 SDLB/SMPLB/SLB Negeri.

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 dibelanjakan pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Peralatan dan Mesin SMA Negeri	51.362.398.983,00
Belanja Peralatan dan Mesin SMK Negeri	38.574.366.341,00
Belanja Barang dan Jasa SDLB-SMPLB-SLB Negeri	383.797.702,00
	<u>90.320.563.026,00</u>

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah mengubah tata cara pencatatan dan penyaluran dana BOS. Sebelumnya penyaluran dana BOS melalui Rekening Kas Umum Daerah-RKUD (Pemerintah Provinsi) ke Sekolah penerima menjadi dari Rekening Kas Umum Negara-RKUN (Pemerintah Pusat) langsung ke Rekening Sekolah.

Rekap penyaluran dana BOS melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan dan belanja BOS ke sekolah-sekolah di SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri adalah sebagai berikut:

	SLB	SMA	SMK	Jumlah
Total Penerimaan	6.283.000.000	351.177.300.000	207.732.480.000	565.192.780.000
Belanja Pegawai	1.340.490.000	30.958.453.515	21.019.887.750	53.318.831.265



- iv. Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp43.862.361.973,00 (Rincian pada Lampiran 6). Piutang PAP tahun 2020 turun sebesar Rp2.421.072.767.163,00 atau 98,22% dari tahun 2019. Total piutang PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebesar Rp41.556.137.088,00 atau 94,74% dari total keseluruhan total Piutang PAP Tahun 2020.

Terdapat sengketa antara Pemprov Sumut dengan PT. Inalum akibat perbedaan perhitungan tarif PAP. Perhitungan Pajak Air Permukaan berdasarkan Pergub Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara, pada :

1. Pasal Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
Pajak Air Permukaan dihitung secara Progresif berdasarkan Golongan Tarif Kriteria-II/Industri dengan satuan Rp/M3.
2. Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa:
Pajak Air Permukaan dihitung dengan menggunakan Tarif Khusus untuk pembangkit listrik seperti yang diterapkan kepada PT. PLN (Persero) dengan satuan Rp/KWh.

Secara rinci kronologi sengketa Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero) dapat kami jelaskan sebagai berikut:

I. Latar Belakang

Latar Belakang PT. Inalum (Persero) menjadi WP PAP

1. PT. Inalum (Persero) didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 di Jakarta, perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang, dengan status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
2. Perjanjian Induk (Master Agreements) berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013, terhitung tanggal 1 Nopember 2013 statusnya berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Sejak tanggal 1 Nopember 2013 PT. Inalum (Persero) menjadi Wajib Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Subjek Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero) adalah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

II. Dasar Hukum

Dasar Hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan :

1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. PERDA Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.



3. KEPMENDAGRI No. 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan BUMN, BUMD Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
4. Pergub Sumatera Utara No. 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.
5. Pergub Sumatera Utara No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.

III. Titik Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan PT. Inalum (Persero)

Terdapat 4 (empat) titik pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan PT. Inalum (Persero), yaitu :

1. Sungai Asahan di Kab. Tobasa :
 - a. Peruntukan tenaga listrik untuk Industri Peleburan Aluminium, dengan tarif Kriteria II/Industri (Rp./m³). *)
 - b. Peruntukan tenaga listrik dijual kepada PLN, dengan tarif Khusus PLN (Rp./KWh).
 2. Sungai Simanimbo di Kab. Tobasa, peruntukan Air Permukaan untuk Perumahan Karyawan, dengan tarif Kriteria II/Non Industri (Rp./m³).
 3. Sungai Tanjung di Kab. Batubara, peruntukan Air Permukaan untuk Kantor Perusahaan, dengan tarif Kriteria II/Non Industri (Rp./m³).
 4. Sungai Siparepare di Kab. Batubara, peruntukan Air Permukaan untuk Perumahan Karyawan, dengan tarif Kriteria II/Non Industri (Rp./m³).
- *) Menjadi Sengketa Banding di Pengadilan Pajak.

IV. Pokok Sengketa

Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero) dihitung berdasarkan Pergub No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara:

1. Menurut Pemprov. Sumatera Utara
Pajak Air Permukaan dihitung secara Progresif berdasarkan Gol. Tarif Kriteria-II/Industri dengan satuan Rp./M³.
(Tarif Pasal 9 ayat (2), Pergub No. 24 Tahun 2011).
2. Menurut PT. Inalum (Persero)
Pajak Air Permukaan dihitung dengan menggunakan Tarif Khusus sama seperti yang diterapkan kepada PT. PLN (Persero) dengan satuan Rp./KWh
(Tarif Pasal 9 ayat (3) Pergub No. 24 Tahun 2011).

V. Golongan Tarif Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Pergub No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara, Tarif Pajak Air Permukaan terdiri dari :
Pasal 9 ayat (1) :



Kriteria I : Sumber Air Permukaan Tergenang

No.	Peruntukan	0 – 50 M3 (Rp)	51-500 M3 (Rp)	501-1000 M3 (Rp)	1001-2500 M3 (Rp)	>2500 M3 (Rp)
1	Industri	2.100	2.184	2.268	2.352	2.436
2	Non Industri	1.680	1.722	1.764	1.804	1.848

Pasal 9 ayat (2) :

Kriteria II : Sumber Air Permukaan Mengalir

No.	Peruntukan	0 – 50 M3 (Rp)	51-500 M3 (Rp)	501-1000 M3 (Rp)	1001-2500 M3 (Rp)	>2500 M3 (Rp)
1	Industri *)	1.234	1.286	1.339	1.391	1.444
2	Non Industri	919	940	961	982	1.003

*) Tarif yang diterapkan untuk PT. Inalum (Persero)

Pasal 9 ayat (3) :

Khusus Penetapan Harga Dasar Air untuk pemakaian dan/atau pemanfaatan oleh PDAM, Pembangkit Listrik (PLN Persero) dan Pertamina/Explorasi ditetapkan sebagai berikut :

1. PDAM : Rp.150/M3
2. Pertamina : Rp.150/M3
3. Pembangkit Listrik : Rp. 75/M3

VI. PT. Inalum mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA)

PT. Inalum (Persero) telah mengajukan 3 (tiga) kali Permohonan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung RI terhadap Pasal 9 ayat (3) Pergub No. 24 Tahun 2011.

1. Pertama

Tgl. Diajukan/No.Reg. : 26 Januari 2016 / 4.P/HUM/2016
Objek Uji Materil : Pasal 9 ayat (3) PergubSU No. 24 Tahun 2011
Tgl. Putusan : 22 Maret 2016
Amar Putusan : Tidak Dapat Diterima
(Tidak Dapat Diterima karena PT. Inalum (Persero) tidak memiliki keterkaitan (Legal Standing) dengan Pasal 9 ayat (3) PergubSU No. 24 Tahun 2011).

2. Kedua

Tgl. Diajukan/No.Reg. : 22 Juli 2016 / 28.P/HUM/2016
Objek Uji Materil : Pasal 2, 8 dan 9 PergubSU No. 24 Tahun 2011
Tgl. Putusan : 05 Oktober 2016
Amar Putusan : Tidak Dapat Diterima
(Tidak dapat diterima karena tidak dibenarkan mengajukan Uji Materil terhadap Objek yang sama)

3. Ketiga

Tgl. Diajukan/No.Reg. : 15 September 2017 / 54.P/HUM/2017



Objek Uji Materil	: Lamp. I Tabel II No.5 & Lamp. II Tabel II No.1 PergubSU No. 24 Tahun 2011
Tgl. Putusan	: 04 Desember 2017
Amar Putusan	: Tidak Dapat Diterima (Tidak dapat diterima karena tidak dibenarkan mengajukan Uji Materiil terhadap Objek yang sama).

- VII. PT. Inalum (Persero) Mengajukan Banding Ke Pengadilan Pajak
- PT. Inalum (Persero) sebelumnya mengajukan SURAT KEBERATAN terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang kemudian ditolak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, atas penolakan tersebut PT. Inalum (Persero) mengajukan BANDING ke Pengadilan Pajak di Jakarta.
1. Majelis Hakim II-A
 - i. Masa Pajak :
 - A. Nopember 2013 s/d Nopember 2015 (25 MP)
 - B. Desember 2015 s/d Maret 2016 (4 MP)
 - C. April 2016 s/d April 2017 (13 MP)
 - ii. Pemeriksaan :
 - A. Syarat Formal :

Mewajibkan pemenuhan Syarat Formal Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Membayar 50% dari Pajak Terutang).
 - B. Pokok Sengketa (Tarif Pajak) :

Perhitungan Pajak menggunakan Tarif Pasal 9 ayat (2) Pergub No. 24 Tahun 2011, tarif untuk Industri kepentingan sendiri bukan untuk kepentingan umum.
 - iii. Tanggal Putusan dan Amar Putusan :
 - A. Masa Pajak Nopember 2013 s/d Nopember 2015, Diputus tanggal 30 Oktober 2018, Menolak Banding PT. Inalum (Persero).
 - B. Masa Pajak Desember 2015 s/d Maret 2016, Diputus tanggal 27 Nopember 2018, Menolak Banding PT. Inalum (Persero).
 - C. Masa Pajak April 2016 s/d April 2017, Diputus tanggal 02 Oktober 2018, Tidak Dapat Menerima Banding PT. Inalum (Persero).
 - iv. Keterangan Putusan Majelis Hakim :
 - A. Menolak Banding, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah tepat dan benar menggunakan Pasal 9 ayat (3) Pergub No. 24 Tahun 2011 dalam menghitung besaran Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero).
 - B. Banding Tidak Dapat Diterima, karena PT. Inalum (Persero) tidak memenuhi Syarat Formal Pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Membayar 50% dari Pajak Terutang).



2. Majelis Hakim I-B
 - i. Masa Pajak :
 - A. Mei 2017 s/d Agustus 2017 (4 MP)
 - B. September 2017 s/d Mei 2018 (9 MP)
 - C. Juni 2018 (1 MP)
 - ii. Pemeriksaan :
 - Syarat Formal :
Tidak Mewajibkan pemenuhan Syarat Formal Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Membayar 50% dari Pajak Terutang)
 - Pokok Sengketa (Tarif Pajak) :
Perhitungan Pajak menggunakan Tarif Pasal 9 ayat (3) Pergub No. 24 Tahun 2011, sama dengan Tarif untuk PLN.
 - iii. Tanggal Putusan dan Amar Putusan :
 - A. Masa Pajak Mei 2017 s/d Agustus 2017, Diputus tanggal 06 Nopember 2019, Mengabulkan Seluruhnya Banding PT. Inalum(Persero).
 - B. Masa Pajak September 2017 s/d Mei 2018, Diputus tanggal 06 Nopember 2019, Mengabulkan Sebagian Banding PT. Inalum (Persero).
 - C. Masa Pajak Juni 2018, Diputus tanggal 11 Desember 2019, Mengabulkan Sebagian Banding PT. Inalum (Persero).
 3. Majelis Hakim III-B
 - i. Masa Pajak :
 - A. Januari 2019 s/d Juli 2019 (7 MP)
 - ii. Pemeriksaan :
 - Syarat Formal :
Tidak Mewajibkan pemenuhan Syarat Formal Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Membayar 50% dari Pajak Terutang)
 - Pokok Sengketa (Tarif Pajak) :
Perhitungan Pajak menggunakan Tarif Pasal 9 ayat (3) Pergub No. 24 Tahun 2011, sama dengan Tarif untuk PLN.
 - iii. Progres Sidang :
Pemeriksaan Pokok Sengketa telah selesai dan dijadwalkan tanggal 23 Pebruari 2021 penyampaian Closing Statement (Keterangan Penutup) oleh masing-masing Pihak.
- VIII. PT. Inalum (Persero) Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Ke Mahkamah Agung
- i. Objek Pemeriksaan : Putusan Majelis Hakim II-A Pengadilan Pajak
 - ii. Masa Pajak :
 - A. Nopember 2013 s/d Nopember 2015 (25 MP)



- B. Desember 2015 s/d Maret 2016 (4 MP)
- C. April 2016 s/d April 2017 (13 MP)
- iii. Tgl. Putusan : 09 Desember 2019 dan 19 Pebruari 2020
- iv. Amar Putusan:
 - Mengabulkan PK PT. Inalum (Persero).
 - Membatalkan Putusan Majelis Hakim II-A Pengadilan Pajak
 - Mengabulkan Banding PT. Inalum (Persero)

Catatan:

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim MA dalam memutus PK ini, adalah bahwa Pajak Air Permukaan dipungut berdasarkan sistem Self Assesment, hal ini adalah KELIRU karena berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa Pajak Air Permukaan adalah jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment).

IX. PT. Inalum (Persero) Meminta Pengembalian Pembayaran Syarat Formal Pengajuan Banding

Berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”.

Realisasi Pembayaran 50% dari SKPD Sebagai Syarat Formal Pengajuan Banding

No.	Masa Pajak	Jumlah Masa Pajak	Jumlah SKPD	Pembayaran Saat Keberatan	Pembayaran Saat Banding	Jumlah Pembayaran
1	Nop 2013 - Nop 2015	25 MP	1.055.336.455.050	65.403.356.376	462.264.871.156	527.668.227.532
2	Des 2015 - Mar 2016	4 MP	168.839.449.077	10.626.446.814	73.793.277.725	84.419.724.539
	JUMLAH	29 MP	1.224.175.904.127	76.029.803.190	536.058.148.881	612.087.952.071

PT. Inalum (Persero) meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membayar sebesar Rp.739 Milyar, terdiri dari mengembalikan pembayaran saat banding sebesar Rp. 536 Milyar ditambah bunga sebesar Rp.203 Milyar.

Catatan:

- a. Pembayaran sebesar Rp.536 Milyar merupakan Syarat Formal Pengajuan Banding bukan Uang Titipan,yaitu untuk membayar 50% dari Pajak Terutang, sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak, sehingga tidak harus dikembalikan kepada PT. Inalum (Persero).
- b. Putusan Mahkamah Agung terkait PK yang diajukan PT. Inalum (Persero) tidak ada memerintahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 739 Milyar kepada PT. Inalum (Persero).



- X. Penerbitan Peraturan Menteri Dan Keputusan Menteri PUPR
Berdasarkan Pasal 8 ayat (7) PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, bahwa Pedoman Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan ditetapkan oleh Kementerian Teknis terkait (Dhi. Menteri PUPR) :
- Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.
 - Keputusan Menteri PUPR No. 568/KPTS/M/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.
 - Keputusan Menteri PUPR No. 12/KPTS/M/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan (mencabut Kepmen PUPR No. 568/KPTS/M/2017).
 - Keputusan Menteri PUPR No. 287.1/KPTS/M/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penundaan Pemberlakuan Kepmen PUPR No. 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.

- XI. Perbandingan Besaran Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero) Antara Pergub Dengan Kepmen PUPR

Peraturan	PAP Per Bulan (Rp)	PAP Per Tahun (Rp)
Pergub No. 24/2011 Pasal 9 ayat (2)	43 Milyar	516 Milyar
Pergub No. 24/2011 Pasal 9 ayat (3)	2,5 Milyar	30 Milyar
KEPMEN PUPR No. 568/2017	750 Juta	9 Milyar
KEPMEN PUPR No. 12/2019 HDA Sumut = Rp.300/KWh	6,98 Milyar	83 Milyar

- XII. Upaya Penyelesaian Sengketa Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya menyelesaikan Sengketa Pajak Air Permukaan PT.Inalum (Persero) di luar Persidangan, antara lain dengan menerbitkan :
- Keputusan Gubernur No. 188.44/381/KPTS/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pajak Air Permukaan PT. Inalum,
 - Keputusan Gubernur No. 188.44/452/KPTS/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur No. 188.44/381/KPTS/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pajak Air Permukaan PT. Inalum.
 - Gubernur Sumatera Utara menyurati Menteri PUPR dengan surat nomor : 974/1487/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Harga dasar Air Permukaan,



agar dapat segera menerbitkan KEPMEN PUPR tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.

Susunan Personalia Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa pada Keputusan Gubernur yang Pertama hanya memuat unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedangkan pada Keputusan Gubernur yang Kedua Susunan Personalia Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa telah melibatkan unsur dari PT. Inalum (Persero).

Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pajak Air Permukaan PT. Inalum telah beberapa kali mengadakan rapat dan pembahasan secara bersama-sama namun belum mendapat kesepakatan terkait besaran Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero).

XIII. Mediasi Jamdatun Kejaksaan Agung RI

Mediasi dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI pada tanggal 7 Desember 2015, salah satu kesimpulan pada saat mediasi dimaksud adalah “Kajian BPKP dapat menjadi rujukan dalam Penetapan Besaran Nilai PAP dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan besaran PAP berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan PT. Inalum dengan meminta pendapat BPKP”.

Penyesuaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Perhitungan Piutang Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero) per 31 Desember 2020

Bahwa terhadap sengketa Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero), beberapa masa pajak diantaranya telah memiliki putusan dan berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam rangka memenuhi Putusan Pengadilan tersebut diperlukan penyesuaian terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan terhadap sengketa Banding yang belum diputus oleh Pengadilan Pajak dan terhadap masa pajak yang belum berproses di Pengadilan Pajak maka perhitungan Pajak Air Permukaan dan Piutang PT. Inalum (Persero) menggunakan SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya.

A. Memenuhi Putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung

- 1) Bahwa terhadap Putusan Majelis II-A Pengadilan Pajak yang amar putusannya Menolak Banding (untuk masa pajak Nopember 2013 s/d Maret 2016) dan Banding Tidak Dapat Diterima (untuk masa pajak April 2016 s/d April 2017), PT. Inalum (Persero) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI.
- 2) Bahwa terhadap Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Inalum (Persero), Mahkamah Agung telah memutus dengan amar putusan “Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Inalum (Persero)”.
- 3) Penyesuaian SKPD dan piutang untuk masa pajak Nopember 2013 s/d Maret 2016 :
 - Nilai SKPD Semula : Rp1.224.175.904.127
 - Berkurang : (Rp1.148.146.100.937)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

- Menjadi : Rp 76.029.803.190
- Jumlah Pembayaran : Rp 76.029.803.190
- Piutang : Rp 0

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	MASA PAJAK	NO./TGL.SKPD		NILAI SKPD			DITERIMA PEMBAYARAN		JUMLAH PIUTANG
		NO.	TGL	SEMULA	BERKURANG	MENJADI	TGL.	Rp.	Rp.
				(Rp)	(Rp)	(Rp)			
1	Nop.2013	74256	Nov-14	3.848.079.331	1.398.935.405	2.449.143.926	11.12.14	2.449.143.926	
2	Des.2013	74254	Nov-14	3.161.203.187	0.556.581.817	2.604.621.370	11.12.14	2.604.621.370	
3	Jan.2014	74257	Nov-14	3.143.653.966	0.504.368.137	2.639.285.829	11.12.14	2.639.285.829	
4	Feb.2014	74258	Nov-14	0.812.435.529	8.369.082.270	2.443.353.259	11.12.14	2.443.353.259	
5	Mar.2014	74262	Nov-14	5.285.505.088	2.569.699.447	2.715.805.641	11.12.14	2.715.805.641	
6	Apr.2014	74263	Nov-14	2.620.644.386	9.978.289.752	2.642.354.634	11.12.14	2.642.354.634	
7	Mei.2014	74266	Nov-14	3.899.861.893	1.159.663.199	2.740.198.694	11.12.14	2.740.198.694	
8	Jun.2014	74265	Nov-14	2.771.900.498	0.131.835.330	2.640.065.168	11.12.14	2.640.065.168	
9	Jul.2014	74261	Nov-14	5.112.380.751	2.379.534.977	2.732.845.774	11.12.14	2.732.845.774	
10	Agu.2014	74267	Nov-14	4.365.824.953	1.645.879.392	2.719.945.561	11.12.14	2.719.945.561	
11	Sep.2014	74260	Nov-14	2.641.609.822	0.012.106.523	2.629.503.299	11.12.14	2.629.503.299	
12	Okt.2014	4619	Jun-15	3.288.819.430	0.565.269.085	2.723.550.345	07.09.15	2.723.550.345	
13	Nop.2014	4620	Jun-15	1.553.937.760	8.907.153.290	2.646.784.470	07.09.15	2.646.784.470	
14	Des.2014	68018	Jun-15	1.247.049.783	8.560.325.398	2.686.724.385	30.06.15	2.686.724.385	
15	Jan.2015	68019	Jun-15	8.835.798.224	6.290.058.974	2.545.739.250	30.06.15	2.545.739.250	
16	Feb.2015	68020	Jun-15	6.768.549.629	4.484.864.129	2.283.685.500	30.06.15	2.283.685.500	
17	Mar.2015	68021	Jun-15	2.418.973.469	9.838.791.421	2.580.182.048	30.06.15	2.580.182.048	
18	Apr.2015	68022	Jun-15	0.880.437.966	8.328.842.971	2.551.594.995	30.06.15	2.551.594.995	
19	Mei.2015	4628	Aug-15	0.413.138.483	7.760.896.510	2.652.241.973	10.09.15	2.652.241.973	
20	Jun.2015	4631	Aug-15	0.718.704.623	8.147.454.731	2.571.249.892	10.09.15	2.571.249.892	
21	Jul.2015	2139	Okt-15	3.474.588.009	0.812.733.759	2.661.854.250	03.11.15	2.661.854.250	
22	Agu.2015	4648	Okt-15	3.291.518.988	0.613.861.953	2.677.657.035	27.11.15	2.677.657.035	
23	Sep.2015	24666	Nov-15	1.445.999.771	8.858.498.736	2.587.501.035	22.12.15	2.587.501.035	
24	Okt.2015	24673	Jan-16	3.348.270.210	0.665.274.986	2.682.995.224	11.02.16	2.682.995.224	
25	Nov.2015	4834	Jan-16	9.987.569.301	7.393.096.482	2.594.472.819	04.02.16	2.594.472.819	
26	Des.2015	4849	Feb-16	2.053.916.262	9.360.272.227	2.693.644.035	01.03.16	2.693.644.035	
27	Jan.2016	24689	Mar-16	3.082.753.988	0.370.054.755	2.712.699.233	08.04.16	2.712.699.233	
28	Feb.2016	24698	Apr-16	9.883.683.032	7.358.920.359	2.524.762.673	13.05.16	2.524.762.673	
29	Mar.2016	27908	28-06-16	3.819.095.795	1.123.754.922	2.695.340.873	18.07.16	2.695.340.873	
		JUMLAH		224.175.904.127	148.146.100.937	6.029.803.190		6.029.803.190	

4) Penyesuaian SKPD dan Piutang untuk masa pajak April 2016 s/d April 2017 :

- Nilai SKPD Semula : Rp583.364.151.980
- Berkurang : (Rp553.064.752.928)
- Menjadi : Rp 30.299.399.052
- Jumlah Pembayaran : Rp 30.299.399.052
- Piutang : Rp 0

Dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

NO	MASA PAJAK	NO./TGL.SKPD		NILAI SKPD			DITERIMA PEMBAYARAN		JUMLAH PIUTANG
				SEMULA	BERKURANG	MENJADI	TGL.	Rp.	Rp.
		NO.	TGL	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
1	Apr. 2016	29999	24-11-16	50.611.593.098	7.982.873.510	2.628.719.588	22.12.16	2.628.719.588	
2	May. 2016	30000	24-11-16	2.068.861.436	9.364.452.703	2.704.408.733	22.12.16	2.704.408.733	
3	Jun. 2016	29851	24-11-16	9.966.078.312	7.370.886.154	2.595.192.158	22.12.16	2.595.192.158	
4	Jul. 2016	29852	24-11-16	9.638.367.855	7.060.196.670	2.578.171.185	22.12.16	2.578.171.185	
5	Agu. 2016	29853	24-11-16	6.166.664.789	3.768.810.591	2.397.854.198	22.12.16	2.397.854.198	
6	Sep. 2016	29854	24-11-16	4.204.647.984	1.908.699.091	2.295.948.893	22.12.16	2.295.948.893	
7	Okt. 2016	29855	24-11-16	4.112.859.257	1.821.677.784	2.291.181.473	22.12.16	2.291.181.473	
8	Nov. 2016	29878	17-12-16	0.288.862.356	8.196.295.681	2.092.566.675	13.01.17	2.092.566.675	
9	Des. 2016	18602	26-01-17	2.068.700.656	9.883.690.856	2.185.009.800	24.02.17	2.185.009.800	
10	Jan. 2017	18619	22-2-17	2.683.889.131	0.466.927.021	2.216.962.110	20.03.17	2.216.962.110	
11	Feb. 2017	18627	23-3-17	8.217.766.224	6.232.770.331	1.984.995.893	20.04.17	1.984.995.893	
12	Mar. 2017	18631	18-4-17	2.250.292.753	0.055.851.230	2.194.441.523	16.05.17	2.194.441.523	
13	Apr. 2017	18650	18-4-17	1.085.568.129	8.951.621.306	2.133.946.823	15.06.17	2.133.946.823	
JUMLAH				83.364.151.980	53.064.752.928	0.299.399.052		0.299.399.052	

B. Memenuhi Putusan Pengadilan Pajak (Majelis Hakim I-B)

1) Bahwa atas Banding diajukan PT. INALUM terhadap masa pajak Mei 2017 s/d Desember 2018, telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim I-B, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Masa Pajak Mei 2017 s/d Agustus 2017 : Mengabulkan Seluruhnya Banding.
- Masa Pajak September 2017 s/d Desember 2018 : Mengabulkan Sebagian Banding.

2) Penyesuaian SKPD dan Piutang untuk masa pajak Mei 2017 s/d Agustus 2017 :

- Nilai SKPD Semula : Rp174.355.827.552
- Berkurang : (Rp165.299.945.643)
- Menjadi : Rp 9.055.881.909
- Jumlah Pembayaran : Rp 9.055.881.909
- Piutang : Rp 0

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	MASA PAJAK	NO./TGL.SKPD		NILAI SKPD			DITERIMA PEMBAYARAN		JUMLAH PIUTANG
				SEMULA	BERKURANG	MENJADI	TGL.	Rp.	Rp.
		NO.	TGL	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
1	Mei. 2017	20741	13-7-17	3.640.734.216	1.374.074.473	2.266.659.743	10.08.17	2.266.659.743	
2	Jun. 2017	20745	13-7-17	3.169.820.112	0.927.619.204	2.242.200.908	10.08.17	2.242.200.908	
3	Jul. 2017	18589	18-10-17	4.409.329.352	2.102.749.502	2.306.579.850	16.11.17	2.306.579.850	
4	Agu. 2017	18592	18-10-17	3.135.943.872	0.895.502.464	2.240.441.408	16.11.17	2.240.441.408	
JUMLAH				74.355.827.552	65.299.945.643	9.055.881.909		9.055.881.909	

3) Penyesuaian SKPD dan Piutang untuk masa pajak September 2017 s/d Desember 2018 :

- Nilai SKPD Semula : Rp752.045.112.952
- Berkurang : (Rp712.984.580.332)
- Menjadi : Rp 39.060.532.621
- Jumlah Pembayaran : Rp 11.901.087.660
- Piutang : Rp 27.159.444.961



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dengan perincian sebagai berikut :

NO	MASA PAJAK	NO./TGL SKPD		NILAI SKPD		DITERIMA PEMBAYARAN		JUMLAH
		NO.	SKPD	SEMULA	MENJADI	TGL	Rp.	Rp.
				(Rp)	(Rp)			
1	Sept. 2017	37908	02-11-17	41.423.697.913	2.151.508.965	29.12.17	655.612.115	1.495.896.850
2	Okt. 2017	37936	23-11-17	43.725.138.326	2.271.043.613	29.12.17	692.036.952	1.579.006.661
3	Nov. 2017	37941	08-12-17	43.751.351.547	2.272.405.103	29.12.17	692.451.828	1.579.953.275
4	Des. 2017	04706	25-01-18	47.063.708.202	2.444.445.788	21.02.18	744.876.409	1.699.569.379
5	Jan. 2018	04727	15-02-18	48.598.051.629	2.524.138.140	14.03.18	769.160.422	1.754.977.718
6	Feb. 2018	04750	18-04-18	44.377.467.925	2.304.924.998	18.04.18	702.233.816	1.602.691.182
7	Mar. 2018	18627	24-05-18	49.778.585.165	2.585.453.940	08.06.18	787.701.634	1.797.752.306
8	Apr. 2018	18630	24-05-18	45.465.498.388	2.361.436.275	08.06.18	719.450.919	1.641.985.356
9	Mei. 2018	18505	02-08-18	47.904.705.065	2.488.126.373	20.08.18	758.049.169	1.730.077.204
10	Juni. 2018	18508	02-08-18	48.107.696.376	2.498.669.550	20.08.18	761.261.323	1.737.408.227
11	Juli. 2018	18513	06-09-18	50.562.538.830	2.626.171.755	03.10.18	800.106.995	1.826.064.760
12	Agust. 2018	18515	03-10-18	49.974.182.185	2.595.613.065	01.11.18	790.796.781	1.804.816.284
13	Sept. 2018	10095	21-12-18	46.552.910.963	2.417.915.460	11.01.19	736.658.244	1.681.257.216
14	Okt. 2018	10098	21-12-18	47.927.421.929	2.489.306.265	11.01.19	758.408.643	1.730.897.622
15	Nov. 2018	01872	24-01-19	47.450.651.395	2.464.543.253	15.02.19	750.864.178	1.713.679.075
16	Des. 2018	18560	19-02-19	49.381.507.114	2.564.830.080	11.03.19	781.418.232	1.783.411.848
			JUMLAH	752.045.112.952	39.060.532.623		11.901.087.660	27.159.444.963

C. Sengketa Banding Masih Dalam Proses Pemeriksaan Pengadilan Pajak

- 1) Bahwa sampai saat ini masih terdapat Sengketa Banding Pajak Air Permukaan PT. INALUM (Persero) yang masih dalam proses Pemeriksaan di Pengadilan Pajak oleh Majelis Hakim III-B, yaitu untuk masa pajak Januari 2019 s/d Juli 2019.
- 2) Bahwa terhadap masa pajak yang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak ini (belum diputus), maka perhitungan Nilai SKPD dan Piutang Pajak Air Permukaan PT. INALUM (Persero) adalah berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya dan realisasi pembayaran untuk masa pajak Januari 2019 s/d Juli 2019.
- 3) SKPD dan Piutang untuk masa pajak Januari 2019 s/d Juli 2019 :
 - Nilai SKPD Semula : Rp348.099.916.768
 - Berkurang : Rp330.019.927.175
 - Menjadi : Rp 18.079.989.593
 - Jumlah Pembayaran : Rp 5.508.370.165
 - Piutang : Rp 12.571.619.428

Dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

NO	MASA PAJAK	NO./TGL SKPD		NILAI SKPD		DITERIMA PEMBAYARAN		JUMLAH
		NO.	SKPD	SEMULA	MENJADI	TGL	Rp.	Rp.
				(Rp)	(Rp)			
1	Jan. 2019	18563	19-02-19	49.026.870.677	2.546.410.598	11.03.19	775.806.429	1.770.604.169
2	Feb. 2019	18832	12-06-19	45.226.885.619	2.349.042.953	03.07.19	715.675.087	1.633.367.866
3	Mar. 2019	18835	12-06-19	50.928.438.322	2.645.176.230	03.07.19	805.897.025	1.839.279.205
4	Apr. 2019	18838	12-06-19	49.979.677.471	2.595.898.485	03.07.19	790.883.739	1.805.014.746
5	Mei. 2019	30005	09-07-19	51.854.165.495	2.693.257.628	29.07.19	820.545.824	1.872.711.804
6	Jun. 2019	30011	23-07-19	49.967.078.427	2.595.244.103	08.08.19	790.684.370	1.804.559.733
7	Jul. 2019	30011	10-09-19	51.116.800.757	2.654.959.598	19.09.19	808.877.691	1.846.081.907
JUMLAH				348.099.916.768	18.079.989.593		5.508.370.165	12.571.619.428

D. Sengketa Pajak Air Permukaan Yang Belum Banding di Pengadilan Pajak

- 1) Bahwa terhadap Sengketa Pajak Air Permukaan PT. INALUM (Persero) yang belum menjadi sengketa Banding di Pengadilan Pajak adalah untuk masa pajak Agustus 2019 s/d Oktober 2020.
- 2) Bahwa terhadap masa pajak yang masih belum menjadi sengketa Banding di Pengadilan Pajak, maka perhitungan Nilai SKPD dan Piutang Pajak Air Permukaan PT. INALUM (Persero) adalah berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya dan realisasi pembayaran untuk masa pajak Agustus 2019 s/d Oktober 2020.
- 3) SKPD dan Piutang untuk masa pajak Agustus 2019 s/d Oktober 2020 :
 - Nilai SKPD Semula : Rp723.038.453.314
 - Berkurang : Rp685.482.942.212
 - Menjadi : Rp 37.555.511.102
 - Jumlah Pembayaran : Rp 35.730.419.655
 - Piutang : Rp 1.825.091.448

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	MASA PAJAK	NO./TGL SKPD		NILAI SKPD		DITERIMA PEMBAYARAN		JUMLAH
		NO.	SKPD	SEMULA	MENJADI	TGL	Rp.	Rp.
				(Rp)	(Rp)			
1	Agu. 2019	27966	25.10.19	50.535.588.447	2.624.771.978	14.10.19	799.680.530	1.825.091.448
2	Sept. 2019	27990	14.11.19	48.832.639.104	2.536.322.393	28.11.19	2.536.322.393	-
3	Okt. 2019	18757	06.12.19	48.447.230.994	2.517.862.830	16.12.19	2.517.862.830	-
4	Nov. 2019	18760	06.12.19	46.293.250.161	2.404.428.923	16.12.19	2.404.428.923	-
5	Des. 2019	18789	11.02.20	47.834.488.255	2.484.479.378	21.02.20	2.484.479.378	-
6	Jan. 2020	18792	11.02.20	47.563.103.328	2.470.383.900	21.02.20	2.470.383.900	-
7	Feb. 2020	04882	30.03.20	44.595.738.489	2.316.261.765	28.04.20	2.316.261.765	-
8	Mar. 2020	16933	11.06.20	48.463.056.978	2.517.126.645	18.06.20	2.517.126.645	-
9	Apr. 2020	16936	11.06.20	47.338.719.590	2.458.729.620	18.06.20	2.458.729.620	-
10	Mei. 2020	04662	22.07.20	49.397.224.332	2.565.646.418	06.08.20	2.565.646.418	-



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

11	Jun. 2020	04665	22.07.20	47.852.145.776	2.485.396.493	06.08.20	2.485.396.493	-
12	Jul. 2020	04688	27.08.20	48.897.220.993	2.539.676.715	07.09.20	2.539.676.715	-
13	Agu. 2020	17010	08.08.20	49.220.574.758	2.556.471.405	16.10.20	2.556.471.405	-
14	Sep. 2020	17013	08.10.20	48.194.368.433	2.503.171.215	16.10.20	2.503.171.215	-
15	Okt. 2020	0008523	02.12.20	49.573.103.676	2.574.781.425	16.12.20	2.574.781.425	-
			JUMLAH	723.038.453.314	37.555.511.102		35.730.419.655	1.825.091.448

Rekapitulasi Penyesuaian Skpd Dan Piutang Pajak Air Permukaan PT Inalum (Persero) Per 31 Desember 2020

NO	MASA PAJAK	NILAI SKPD		DITERIMA PEMBAYARAN	JUMLAH
		SEMULA	MENJADI		
		(Rp)	(Rp)		
1	Nopember 2012- Maret 2016	1.224.175.904.127	76.029.803.190	76.029.803.190	-
2	April 2016 - April 2017	583.364.151.980	30.299.399.052	30.299.399.052	-
3	Mei 2017 - Agustus 2017	174.355.827.552	9.055.881.909	9.055.881.909	-
4	September 2017 - Desember 2018	752.045.112.952	39.060.513.874	11.901.087.660	27.159.426.214
5	Januari 2019 - Juli 2019	348.099.916.768	18.079.989.593	5.508.370.165	12.571.619.428
6	Agustus 2019 - Oktober 2020	723.038.453.314	37.555.511.101	35.730.419.655	1.825.091.446
JUMLAH		3.805.079.366.693	210.081.098.719	168.524.961.631	41.556.137.088

Mengenai Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dan Imbalan Bunga Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero)

Bahwa PT. Inalum (Persero) melalui surat Direktur Pelaksana PT. Inalum (Persero) telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak dan Imbalan Bunga Pajak Air Permukaan PT. Inalum (Persero) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Pengadilan Pajak (Putusan Majelis Hakim II-A), surat permohonan PT. Inalum (Persero) ini tercatat diterima pada Agenda Surat Masuk Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Maret 2020, yang terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) :
 - 1) Nomor 180/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Nopember 2013 sd/ September 2014.
 - 2) Nomor 182/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Oktober 2014 s/d April 2015.
 - 3) Nomor 184/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Mei 2015.
 - 4) Nomor 600/L-Dirpel/ViII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Masa Pajak Juni 2015.



- 5) Nomor 186/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Juli 2015 s/d September 2015.
 - 6) Nomor 188/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Oktober 2015.
 - 7) Nomor 190/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Nopember 2015.
 - 8) Nomor 192/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Desember 2015.
 - 9) Nomor 194/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Januari 2016.
 - 10) Nomor 196/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Pebruati 2016.
 - 11) Nomor 198/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Mei 2016.
- b. Surat Permohonan Imbalan Bunga Sengketa Pajak Air Permukaan (PAP) :
- 1) Nomor 181/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Nopember 2013 sd/ September 2014.
 - 2) Nomor 183/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Oktober 2014 s/d April 2015.
 - 3) Nomor 185/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Mei 2015.
 - 4) Nomor 600/L-Dirpel/ViII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Masa Pajak Juni 2015.
 - 5) Nomor 187/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Juli 2015 s/d September 2015.
 - 6) Nomor 189/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Oktober 2015.
 - 7) Nomor 191/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Nopember 2015.
 - 8) Nomor 193/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Desember 2015.
 - 9) Nomor 195/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Januari 2016.
 - 10) Nomor 197/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Pebruati 2016.
 - 11) Nomor 199/L-Dirpel/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, Masa Pajak Mei 2016.

Bahwa terhadap surat Direktur Pelaksana PT. Inalum (Persero) tersebut diatas, telah dijawab oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur Sumatera Utara, yaitu masing-masing tertanggal 08 Maret 2021 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) dan Imbalan Bunga, yaitu:

- 1) Nomor 973/2029/2021, untuk Masa Pajak Nopember 2013 s/d September 2014.
- 2) Nomor 973/2030/2021, untuk Masa Pajak Oktober 2014 s/d April 2015.
- 3) Nomor 973/2031/2021, untuk Masa Pajak Mei 2015.



- 4) Nomor 973/2032/2021, untuk Masa Pajak Juni 2015.
- 5) Nomor 973/2033/2021, untuk Masa Pajak Juli 2015 s/d September 2015.
- 6) Nomor 973/2034/2021, untuk Masa Pajak Oktober 2015.
- 7) Nomor 973/2035/2021, untuk Masa Pajak Nopember 2015.
- 8) Nomor 973/2036/2021, untuk Masa Pajak Desember 2015.
- 9) Nomor 973/2037/2021, untuk Masa Pajak Januari 2016.
- 10) Nomor 973/2038/2021, untuk Masa Pajak Pebruari 2016.
- 11) Nomor 973/2039/2021, untuk Masa Pajak Maret 2016.

Bahwa surat jawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas, pada intinya menerangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak dapat memenuhi permohonan PT. Inalum (Persero), dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Agung tidak terdapat perintah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pengembalian Syarat Formal Pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak dan Pemberian Imbalan Bunga sengketa Pajak Air Permukaan kepada PT. Inalum (Persero).
- b) Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh PT. Inalum (Persero) adalah untuk memenuhi Syarat Formal Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Piutang PT. Inalum sebesar sebesar Rp41.556.137.088,00 merupakan penyesuaian atas jurnal koreksi dari BPK RI, sedangkan pelaksanaannya menunggu hasil keputusan Pengadilan Pajak Jakarta atas sengketa pajak tahun 2019-2020.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa, untuk tarif PAP masa pajak Januari 2019 s.d. Oktober 2020 di dalam Laporan Keuangan *Unaudited* tercatat piutang PT. Inalum (Persero) sebesar Rp1.057.059.025.225,00 adalah berdasarkan SKPD yang telah diterbitkan secara *Official Assessment* (sesuai Pergub Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (2) tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara) yang saat ini sedang dalam proses sengketa di Pengadilan Pajak Jakarta. Oleh karena itu, kepastian besarnya menunggu Putusan Pengadilan tersebut.

Jika Pemprovsumu dimenangkan dalam sengketa ini, maka Piutang Pajak PT Inalum akan kembali seperti semula sesuai Ketetapan secara *Official Assessment*. Dalam hal ini, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa Pajak Air Permukaan adalah jenis Pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau *Official Assessment* bukan *Self Assessment*. (Pasal 3 PP No. 91 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2016 terlampir).



Terkait sengketa pajak dengan PT Inalum untuk tahun pajak 2019-2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mendorong segera menyelesaikannya untuk memperoleh kepastian, antara lain:

- a) Bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memohon fasilitasi penyelesaian sengketa pajak antara PT Inalum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b) Bersurat kembali kepada Kementerian PUPR untuk memohon segera menerbitkan surat keputusan Menteri PUPR untuk penentuan besaran tarif Pajak Air Permukaan (PAP) di daerah; dan
- c) Menyurati BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk meminta rekomendasi atas perhitungan PAP PT Inalum sebagaimana yang pernah mereka lakukan pada tahun 2015.

2. Piutang Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan adalah Klaim Peserta/Keluarga BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan. Piutang Dinas Kesehatan sebesar Rp384.005.100,00 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

i. UPT Rumah Sakit Khusus Mata	
Saldo 31 Desember 2019	579.504.800,00
Pelunasan selama tahun 2020	(579.504.800,00)
Klaim pending Nov 2020	243.500,00
November 2020	114.599.900,00
Desember 2020	160.401.700,00
Klaim pending Des 2020	243.500,00
Jumlah	275.488.600,00
ii. UPT Rumah Sakit Khusus Paru	
Saldo 31 Desember 2019	414.954.935,00
Koreksi Piutang 2019	(4.963.035)
Pelunasan selama tahun 2020	(409.991.900)
Piutang November 2020	56.161.900,00
Piutang Desember 2020	52.354.600,00
Jumlah	108.516.500,00
Piutang Dinas Kesehatan	384.005.100,00

3. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem sebesar Rp1.456.094.400,00 merupakan klaim dana atas pelayanan terhadap pasien BPJS, Piutang tersebut disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 karena adanya proses verifikasi yang harus dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan Pusat. Piutang RSJ Prof. Muhammad Ildrem per 31 Desember 2020 terdiri dari:

	Rawat Inap		Rawat Jalan		Jumlah	
	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya
Oktober	49	203.985.900	1.027	191.135.600	1.076	395.121.500



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

November	65	262.578.000	1.051	196.711.900	1.116	459.289.900
Desember	80	345.274.000	1.188	256.409.000	1.268	601.683.000
	194	811.837.900	3.266	644.256.500	3.460	1.456.094.400

4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 sebesar Rp201.392.737,00 terdapat pada UPT Laboratorium Lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 8.

	2019	Pelunasan	Penambahan	2020
Piutang 2013	37.570.737,00	0,00	0,00	37.570.737,00
Piutang 2014	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00
Piutang 2015	13.137.000,00	9.024.000,00	0,00	4.113.000,00
Piutang 2016	17.113.000,00	17.113.000,00	0,00	0,00
Piutang 2019	365.620.000,00	365.620.000,00	156.824.000,00	156.824.000,00
	436.325.737,00	391.757.000,00	156.824.000,00	201.392.737,00

5. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.144.600,00 merupakan sewa Kantin di Dinas Perkebunan yang sudah diperpanjang kontraknya untuk periode tahun 2020 s.d 2022 (2 tahun) namun belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Kantin Dinas Perkebunan	Periode	Nilai Kontrak	Sewa/Bln	Piutang
1. Ilmiah Sebayang (No. 012.6/513.a/UM)	03/08/2020-03/08/2022	5.820.480,00	242.520,00	1.212.600,00
2. Jumini (No. 012.6/512.a/UM)	03/08/2020-03/08/2022	9.273.600,00	386.400,00	1.932.000,00
<i>Jumlah Piutang</i>				<i>3.144.600,00</i>

6. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN tahun 2019 sebesar Rp118.029.478.261,00 terdiri dari:
- PMK 180/PMK.07/2019 tanggal 3 Desember 2020 hasil rekon dengan DJPK Kementerian Keuangan menjadi sebesar Rp22.881.895.290,00, telah direalisasikan melalui PMK 20/PMK.07/2020 16 Maret 2020.
 - PMK 36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 sebesar Rp95.147.582.971,00, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui PMK 113/PMK.07/2020 25 Agustus 2020.

Perhitungan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN tahun 2020 sebesar Rp68.548.109.081,00 dapat dilihat pada Lampiran 9. Sisa Kurang Bayar adalah sebagaimana penetapan PMK 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020, dikurangi dengan penyaluran Kurang Bayar di TA 2020 sebagaimana KMK 22/KMK.07/2020 tanggal 29 September 2020. Sehingga Kurang Bayar per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29	0,00
2. DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	68.006.059.152
3. Cukai Hasil Tembakau	207.361.235



4. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	300.081.944
5. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	0,00
6. DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	34.606.750
<i>Kurang Bayar per 31 Desember 2020</i>	<i>68.548.109.081,00</i>

7. Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp275.020.765,00. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 10. Rekap piutang RSU Haji adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

- Piutang Jasa Pelayanan – Pasien Umum	151.207.455,00
- Piutang Jasa Pelayanan – Pasien BPJS	123.813.310,00
<i>Jumlah</i>	<i>275.020.765,00</i>

4.3.1.1.7 Piutang Lainnya **31 Desember 2020**
Rp94.851.355.650,20 **31 Desember 2019**
Rp99.584.021.247,18

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp94.851.355.650,20 dan Rp99.584.021.247,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2019	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2020
		Penambahan	Pengurangan	
Kelebihan bagi hasil pajak ABT-SKPKD	26.750.865,00	0,00	0,00	26.750.865,00
Bagian lancar tagihan penjualan tanah-BPKAD	102.769.000,00	291.985.300,00	(307.640.300,00)	87.114.000,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan-BPKAD	113.620.000,00	0,00	0,00	113.620.000,00
Bagian lancar TGR Daerah – BPKAD	99.335.507.882,18	0,00	(4.717.010.596,98)	94.618.497.285,20
Bagian lancar penjualan rumah-Dinas Perkim	5.373.500,00	0,00	0,00	5.373.500,00
Jumlah	99.584.021.247,18	291.985.300,00	(5.024.650.896,98)	94.851.355.650,20

1. Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT– SKPKD per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.750.865,00 merupakan kelebihan pembayaran atas Pajak Air Bawah Tanah (ABT) oleh Biro Keuangan Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2012 kepada 32 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	Kelebihan Bagi Hasil ABT
Kota Medan	11.312.415,00
Kota Binjai	710.526,00
Kota Tebingtinggi	89.898,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Kota Pematang Siantar	144.364,00
Kota Sibolga	37.031,00
Kota Tanjung Balai	105.296,00
Kabupaten Batubara	284.516,00
Kabupaten Asahan	557.048,00
Kabupaten Dairi	262.689,00
Kabupaten Deli Serdang	3.929.524,00
Kabupaten Serdang Badagai	429.833,00
Kabupaten Labuhan Batu	411.786,00
Kabupaten Langkat	598.995,00
Kabupaten Mandailing Natal	948.365,00
Kabupaten Nias	268.232,00
Kabupaten Simalungun	532.243,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	326.212,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	872.210,00
Kabupaten Tapanulai Utara	665.526,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	390.998,00
Kabupaten Toba Samosir	347.429,00
Kabupaten Samosir	335.216,00
Kabupaten Padang Sidempuan	160.216,00
Kabupaten Padang Lawas	374.189,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	680.030,00
Kabupaten Pakpak Barat	168.390,00
Kabupaten Nias Selatan	328.994,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	463.652,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	386.948,00
Kabupaten Nias Utara	258.782,00
Kabupaten Nias Barat	172.888,00
Kota Gunung Sitoli	196.424,00
<i>Jumlah</i>	<i>26.750.865,00</i>

2. Bagian lancar tagihan penjualan tanah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah adalah nilai piutang angsuran yang jatuh tempo pada 12 bulan ke depan (terhitung dari tanggal pelaporan) untuk penjualan tanah Eks PRPTE Dinas Perkebunan sebanyak 15 unit. Sedangkan nilai piutang yang belum jatuh tempo dalam tahun berjalan dicatat sebagai Aset Lainnya.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 11. Rekapitulasi perhitungan bagian lancar penjualan angsuran per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Bagian Lancar 31 Desember 2019	102.769.000,00
Koreksi Pelunasan Bagian Lancar 2019	(27.197.000,00)
Alokasi Bagian Lancar 2020	113.556.000,00



Pelunasan Bagian Lancar 2020	(102.014.000,00)
<i>Saldo Bagian Lancar 31 Desember 2020</i>	<i>87.114.000,00</i>

Terdapat pula pelunasan angsuran sampai dengan 2027 sebesar Rp178.429.300,00.

3. Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2020 adalah merupakan piutang kas penjualan aset daerah berupa kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.024/2324/K/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp113.620.000,00.

4. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Piutang TGR adalah Rekapitulasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembebanan Ganti Rugi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 715 SK, dan 95 SK hasil LHP BPK Tahun 2018. Piutang TGR per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.618.497.285,20 dilihat rinciannya pada Lampiran 12:

Tahap I	(276 SK)	74.508.893.804,42
Tahap II	(402 SK)	35.621.817.144,75
Tahap III	(37 SK)	6.411.225.817,43
Koreksi BPK 2018	(95 SK)	3.466.904.402,00
Total	(810 SK)	120.008.841.168,60
Setor Sebelum 2018		(19.519.738.682,42)
Setor 2019		(1.003.062.258,00)
Per 31 Desember 2018		99.486.040.228,18
Setor 2019		(150.532.346,00)
Per 31 Desember 2019		99.335.507.882,18
Setor sebelum 2020 (koreksi)		(4.686.173.307,98)
Setor 2020		(30.837.289,00)
<i>Per 31 Desember 2020</i>		<i>94.618.497.285,20</i>

5. Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Penataan Ruang dan Permukiman per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.373.500,00 adalah sebagai berikut:

Nilai kontrak/tagihan	399.969.797,00
Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2014	120.469.067,00
Pembayaran selama tahun 2015	(115.095.567,00)
<i>Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2020</i>	<i>5.373.500,00</i>

4.3.1.1.8 Penyisihan Piutang 31 Desember 2020 31 Desember 2019
(Rp24.253.029.581,99) (Rp1.244.362.707.992,12)

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya. Saldo penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp24.253.029.581,99 dapat dilihat rinciannya pada Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 8 dan Lampiran 10. Rekap penyisihan piutang adalah sebagai berikut:



Tabel 46 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Piutang pendapatan					
PBBKB - BP2RD	364.661.561,00	0,00	0,00	8.123.421.410,00	8.488.082.971,00
Pajak Air Permukaan - BP2RD	5.274.239,74	1.789.380.179,80	11.831.167.645,00	1.251.376.938,00	14.877.199.002,54
Ret.Pelayanan Kesehatan – Dinkes	1.064.999,00	17.100.530,00	0,00	0,00	18.165.529,00
Ret. Pelayanan Kesehatan - RSJ	3.008.415,00	85.441.140,00	0,00	0,00	88.449.555,00
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – DLH	545.980,00	2.567.100,00	10.978.500,00	44.568.737,00	58.660.317,00
DBH Pajak dan Sumber Daya Alam – SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Pelayanan Kesehatan - RSUD Haji Medan (BLUD)	683.284,68	0,00	9.230.217,50	119.903.395,00	129.816.897,18
Penyisihan Piutang lainnya					
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	5.373.500,00	5.373.500,00
Bagian lancar penjualan tanah-BPKAD	435.570,00	0,00	0,00	0,00	435.570,00
Bagian lancar penjualan kendaraan-BPKAD	0,00	0,00	0,00	113.620.000,00	113.620.000,00
Bagian lancar TGR - BPKAD	473.092.486,43	0,00	0,00	0,00	473.092.486,43
Kelebihan bagi hasil pajak ABT - SKPKD	133.754,33	0,00	0,00	0,00	133.754,33
Jumlah	848.900.290,16	1.894.488.949,80	11.851.376.362,50	9.658.263.980,00	24.253.029.581,99

4.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp1.939.457.251,34 **Rp2.721.460.796,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat yang dibayar pada periode berjalan namun menjadi beban tahun berikutnya. Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat tahun 2020 yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.939.457.251,34 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 47 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Des 2019	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2020
		Penambahan	Pengurangan	
Sewa gedung/ kantor/tempat				
Dinas Tenaga Kerja	51.915.667,00	75.863.000,00	(51.915.667,00)	75.863.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	23.125.000,00	0,00	(23.125.000,00)	0,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	61.380.000,00	62.370.000,00	(61.380.000,00)	62.370.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.585.040.129,00	1.567.300.585,00	(2.403.074.796,00)	1.749.265.918,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	51.958.333,34	0,00	51.958.333,34
Jumlah	2.721.460.796,00	1.757.491.918,34	(2.539.495.463,00)	1.939.457.251,34

Rincian beban dibayar dimuka untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

	Periode		Nilai Sewa	Beban Dibayar Dimuka
Dinas Tenaga Kerja				
1. UPT Wasnaker 2	01/02/19	31/01/20	2.083,333,00	0,00
UPT Wasnaker 2	04/07/20	03/07/21	30.800.000,00	15.400.000,00
2. UPT Wasnaker 3	26/09/19	25/09/20	15.000.000,00	0,00
UPT Wasnaker 3	23/09/20	22/09/21	26.143.000,00	19.607.250,00
3. UPT Wasnaker 4	21/08/19	20/08/19	9.249.000,00	0,00
UPT Wasnaker 4	21/08/20	20/08/21	13.870.000,00	9.246.667,00
4. UPT Wasnaker 5	21/08/19	20/08/20	13.333.333,00	0,00
UPT Wasnaker 5	21/08/19	20/08/21	27.587.000,00	16.092.417,00
5. UPT Wasnaker 6	01/08/19	01/07/20	12.250.000,00	0,00
UPT Wasnaker 6	01/08/20	31/07/21	26.600.000,00	15.516.667,00
<i>Jumlah</i>			<i>174.832.333,00</i>	<i>75.863.000,00</i>
Dinas Lingkungan Hidup				
1. Sewa Rumah Dinas Pegawai Pria	22/08/19	21/08/20	7.500.000,00	0,00
2. Sewa Rumah Dinas Ka. UPT	06/08/19	06/08/20	15.000.000,00	0,00
3. Sewa Rumah Dinas Pegawai Wanita	02/09/19	01/09/20	7.500.000,00	0,00
4. Sewa Rumah Dinas Kasubbag	10/08/19	09/10/20	7.500.000,00	0,00
<i>Jumlah</i>			<i>37.500.000,00</i>	<i>0,00</i>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
1.	Tourist Information Center-KNO	20/05/19	19/05/20	61.380.000,00	0,00
2.	Tourist Information Center-KNO	20/05/20	19/05/21	149.688.000,00	62.370.000,00
<i>Jumlah</i>				<i>211.068.000,00</i>	<i>62.370.000,00</i>
Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
1.	UPT. PK. Sibolga	01/03/20	28/02/21	40.000.000,00	6.666.666,67
2.	UPT. PK. P. Siantar	07/04/20	06/04/21	40.000.000,00	10.000.000,00
3.	UPT. PK. Kisaran	27/11/20	27/11/21	38.500.000,00	35.291.666,67
<i>Jumlah</i>				<i>118.500.000,00</i>	<i>51.958.333,33</i>

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran 13.

4.3.1.1.10 Persediaan **31 Desember 2020**
Rp264.916.013.507,00 **31 Desember 2019**
Rp145.740.730.411,00
Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp264.916.013.507,00 dan Rp145.740.730.411,00 pada masing-masing SKPD dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan	125.182.010,00	169.362.075,00
Dinas Kesehatan	176.960.232.600,00	105.340.808.331,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	1.695.179.869,00	1.352.659.870,00
Rumah Sakit Haji Medan	3.714.303.038,00	1.932.763.244,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	15.851.328,00	21.796.778,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	12.158.000,00	16.646.000,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	17.266.931.403,00	32.976.302.828,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.153.378,00	5.230.780,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.914.000,00	4.226.570,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.899.986.823,00	25.187.236,00
Dinas Sosial	71.949.862,00	4.246.375,00
Dinas Tenaga Kerja	6.215.120,00	5.756.045,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.192.500,00	10.693.500,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	515.249.500,00	10.522.310,00
Dinas Lingkungan Hidup	83.666.100,00	126.969.402,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.209.500,00	2.389.106,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.922.000,00	1.821.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	1.928.355.200,00	8.525.800,00
Dinas Perhubungan	28.854.775,00	70.173.316,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.299.400,00	10.030.065,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	33.519.800,00	2.010.360,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.545.500,00	5.152.500,00
Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.841.317.900,00	3.852.283,00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	59.015.250,00	3.484.820,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip	5.277.000,00	6.407.200,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Kelautan Dan Perikanan	31.133.793,00	140.440.420,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	553.929.774,00	404.885.337,00
Dinas Perkebunan	39.757.124,00	4.087.500,00
Dinas Kehutanan	171.550.226,00	102.455.445,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.409.375,00	2.227.700,00
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	755.000,00	7.350.600,00
Biro Umum Dan Perlengkapan	324.305.900,00	48.726.450,00
Biro Pemerintahan Umum	4.332.400,00	4.385.138,00
Biro Bina Perekonomian	8.779.500,00	7.740.500,00
Biro Sosial Dan Kesejahteraan	841.700,00	9.748.870,00
Biro Organisasi	6.365.100,00	5.844.000,00
Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama	782.800,00	545.000,00
Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	2.595.545,00	1.616.800,00
Biro Hukum	1.325.000,00	1.828.125,00
Biro Humas Keprotokolan	3.662.600,00	2.267.300,00
Sekretariat DPRD	466.030.741,00	119.900.500,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	1.835.160,00	1.307.830,00
Inspektorat Daerah Provinsi	91.274.160,00	247.317.665,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	12.438.730,00	4.780.920,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	18.362.450,00	66.953.740,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	2.867.471.763,00	2.430.805.798,00
Badan Kepegawaian Daerah	7.342.010,00	5.856.844,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.447.600,00	1.106.000,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.803.200,00	1.533.935,00
Total Persediaan	264.916.013.507,00	145.740.730.411,00

Ringkasan persediaan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<i>Bahan Pakai Habis</i>	<i>264.896.052.657,00</i>	<i>145.735.172.911,00</i>
Bahan	1.634.147.970,00	1.289.085.280,00
Bahan Bangunan dan Kontruksi	3.844.020,00	291.720,00
Bahan Kimia	921.196.162,00	815.648.391,00
Bahan Bakar dan Pelumas	10.801.400,00	90.000,00
Bahan Baku	1.703.760,00	11.215.200,00
Bahan/ Bibit Tanaman	634.854.528,00	456.144.469,00
Isi Tabung Gas	61.060.600,00	5.695.500,00
Bahan Lainnya	687.500,00	0,00
Suku Cadang	9.667.378.830,00	1.620.321.734,00
Suku Cadang Alat Angkutan	19.683.600,00	2.607.500,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	6.529.935.791,00	631.378.269,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	2.950.601.481,00	976.580.965,00
Suku Cadang Alat Pertanian	167.157.958,00	9.755.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	41.798.535.409,00	5.591.533.385,00
Alat Tulis Kantor	5.905.160.342,00	3.203.337.701,00
Kertas dan Cover	337.652.461,00	301.261.178,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Bahan Cetak	9.049.300,00	6.921.000,00
Benda Pos	1.165.000,00	1.354.400,00
Bahan Komputer	1.108.344.460,00	545.558.528,00
Perabot Kantor	33.204.576.226,00	735.711.607,00
Alat Listrik	483.328.058,00	389.961.512,00
Perlengkapan Dinas	513.925.650,00	246.996.500,00
Suvenir/Cinder Mata	170.138.700,00	92.405.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	65.195.212,00	68.025.959,00
Obat-Obatan	119.349.535.084,00	32.605.322.828,00
Obat	3.172.472.699,00	1.705.247.849,00
Obat-Obatan Lainnya	116.177.062.385,00	30.900.074.979,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	90.053.418.744,00	102.508.924.574,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	90.053.418.744,00	102.508.924.574,00
Natura dan Pakan	2.393.036.620,00	2.119.985.110,00
Natura	2.393.036.620,00	2.119.985.110,00
<i>Bahan Tak Habis Pakai</i>	<i>19.960.850,00</i>	<i>5.557.500,00</i>
Pipa	19.960.850,00	5.557.500,00
Pipa Baja	19.960.850,00	-
Pipa Fiber Glass	0,00	135.000,00
Pipa Lainnya	0,00	5.422.500,00
<i>Jumlah Persediaan</i>	<i>264.916.013.507,00</i>	<i>145.740.730.411,00</i>

Terdapat persediaan yang merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Barang Pakai Habis

 Obat-obatan

 Mutasi Tambah 181.273.543.866,00

 Mutasi Kurang 130.540.980.995,00

Saldo Akhir Persediaan Hibah 50.732.562.871,00

Persediaan yang berasal dari dana Belanja Tak Terduga sebesar Rp98.397.747.531,00 dijelaskan pada Pos LRA - Belanja Tidak Terduga pada poin Penjelasan Belanja Tidak Terduga Khusus Penanganan Covid-19.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	Rp3.688.650.513.148,55	Rp3.469.649.740.656,10

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen dan non permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen (Penyertaan Modal)	3.688.650.513.148,55	3.469.649.740.656,10
<i>Jumlah</i>	<i>3.688.650.513.148,55</i>	<i>3.469.649.740.656,10</i>

Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 terdiri dari Dana Bergulir yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana Bergulir adalah Pinjaman Modal yang diberikan kepada koperasi dan UKM yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk digulirkan dalam bentuk pinjaman. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM) di Sumatera Utara serta PT. Bank Sumut sebagai Bank Pelaksana dengan pola channelling. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir. Pola Chanelling yaitu pola penyaluran kredit dengan cara bank hanya sebagai penyalur dan seluruh persyaratan peminjam telah ditetapkan oleh pihak pemilik dana Rincian dana bergulir per 31 Desember 2020 yang disalur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Uraian	Dana Bergulir TA 2019	Setor	Dana Bergulir TA 2020	Total Penyisihan > 4 tahun 100%	NRB
Syariah	3.249.000.000,00	0,00	3.249.000.000,00	(3.249.000.000,00)	0,00
Konvensional	4.200.000.000,00	0,00	4.200.000.000,00	(4.200.000.000,00)	0,00
UKM	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>7.949.000.000,00</i>		<i>7.949.000.000,00</i>	<i>(7.949.000.000,00)</i>	<i>0,00</i>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 14.

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1. Dana Bergulir Pola Syariah	3.249.000.000,00	3.249.000.000,00
2. Dana Bergulir Pola Konvensional	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
3. Dana Bergulir Pola UKM	500.000.000,00	500.000.000,00
4. Dana Bergulir Pola Penjaminan	0,00	0,00
5. Penyisihan Dana Bergulir	(7.949.000.000,00)	(7.949.000.000,00)
<i>Jumlah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Sampai dengan 31 Desember 2020 yang telah menyetorkan ke Kas Daerah adalah:

- Pada Tahun 2016, KSU Ar Ridho menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.000.000,00.



- Pada Tahun 2019, Kopwan Permata Hati menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp100.000.000,00.

Program Dana Bergulir tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dari Tahun 2004 s.d 2006 yang bekerjasama dengan PT Bank Sumut. Terdapat uang penjaminan dana bergulir sebesar Rp2.050.000.000,00. Pada tahun 2019 telah disetorkan ke Kas Daerah Dana Jaminan sebesar Rp. 2.050.000.000 dari PT. Bank Sumut ke Kas Daerah.

Penyebab Dana Bergulir Tidak Tertagih yaitu:

1. Terjadinya kemacetan pinjaman di anggota koperasi;
2. Tingginya permintaan permodalan anggota kepada koperasi sehingga koperasi terus menggulirkan dana tersebut ke anggota yang lain;
3. Rendahnya produktifitas koperasi penerima dana bergulir dikarenakan persoalan internal;
4. Tidak aktifnya koperasi penerima dana bergulir diakibatkan berbagai persoalan seperti: (1) aktivitas koperasi bertumpu kepada satu atau beberapa orang pengurus sehingga jika terjadi hal-hal seperti meninggal atau sakitnya pengurus, koperasi menjadi tidak berjalan/aktif, (2) rentannya koperasi menghadapi persaingan dan persoalan ekonomi, dan sebagainya.

Investasi Permanen (Penyertaan Modal)

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 adalah perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu Metode Biaya dan Metode Ekuitas. Metode Biaya digunakan pada PT Askrida karena kepemilikan kurang dari 20%. Metode Ekuitas digunakan pada BUMD/BUMN dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode Ekuitas diterapkan pada PDAM Tirtanadi, PD Perkebunan, PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Dhirga Surya, PD Aneka Industri dan Jasa, PT Bank Sumut serta PT Kawasan Industri Medan.

Rincian perhitungan penyertaan modal adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1. PDAM Tirtanadi	981.755.503.696,00	962.206.882.123,00
2. PT Perkebunan Sumatera Utara	311.627.233.048,19	333.202.683.479,95
3. PT Pembangunan Prasarana Sumut	39.634.083.435,59	36.453.337.657,71
4. PT Dhirga Surya	239.664.830.506,00	240.427.339.758,00
5. PD Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00
6. PT Bank Sumut	1.969.781.729.075,16	1.749.657.490.012,34
<i>BUMD</i>	<i>3.542.463.379.760,93</i>	<i>3.321.947.733.031,00</i>
7. PT Kawasan Industri Medan	145.737.133.387,62	147.252.007.625,10
8. PT Asuransi Bangunan Askrida	450.000.000,00	450.000.000,00
<i>BUMN</i>	<i>146.187.133.387,62</i>	<i>147.702.007.625,10</i>



Rp36.453.337.657,71. Besarnya investasi pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2020 dengan kepemilikan 99,50%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2019 (Unaudited)	36.636.520.259,00	99,50%	36.453.337.657,71
Koreksi Ekuitas Saldo Tahun 2019 (Audited)	(86.322.000,00)	99,50%	(85.890.390,00)
Keuntungan (Kerugian) Tahun 2020	3.283.051.425,00	99,50%	3.266.636.167,88
<i>Saldo 31 Desember 2020</i>	<i>39.833.249.684,00</i>	<i>99,50%</i>	<i>39.634.083.435,59</i>

Kepemilikan modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2020 terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 99,50% dan Pemkot Binjai sebesar Rp100.000.000,00 dan Saham yang dialihkan sebesar Rp150.000.000,00.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara Dinas Perhubungan Pemprov Sumut dengan PT PPSU tentang operasional Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sumut I dan Sumut II dengan rute lintasan Simanindo-Tigaras, Sipinggian-Muara dan Onan Runggu-Balige di Kawasan Danau Toba. Pada pasal 5 Hak dan Kewajiban Para pihak menyatakan bahwa antara lain Dinas Perhubungan Pemprov Sumut mendapatkan bagi hasil sebesar 50% setelah kelebihan atau selisih lebih antara pendapatan dan biaya, dana bagi hasil tersebut dapat disetorkan setelah audit akuntan publik. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada deviden.

PT Dhirga Surya

Penyertaan Modal PT Dhirga Surya Per 31 Desember 2020 dan 2019 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp239.664.830.506,00 dan Rp240.427.339.758,00. Besarnya investasi pada PT Dhirga Surya berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Setelah Audit Tahun 2020 dengan kepemilikan 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2019	240.427.339.758,00	100,00%	240.427.339.758,00
Laba rugi tahun berjalan	(762.509.252,00)	100,00%	(762.509.252,00)
Deviden	0,00	100,00%	0,00
<i>Saldo 31 Desember 2020</i>	<i>239.664.830.506,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>239.664.830.506,00</i>

Berdasarkan Surat Direktur Utama PT Dhirga Surya Nomor 002/SK/DS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, terdapat akumulasi kelebihan bayar deviden tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp533.037.790,00 ditambah kelebihan pembayaran tahun 2018 sebesar Rp150.000.000,00. Atas kelebihan tersebut disajikan di Laporan Keuangan PT Dhirga Surya di akun Uang Muka-Neraca sebesar Rp679.370.066,00. Rincian kelebihan bayar deviden adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan bayar tahun 2015	203.258.898
Kelebihan bayar tahun 2016	139.778.892
Kelebihan bayar tahun 2017	190.000.000



Kelebihan bayar tahun 2018	150.000.000
Kelebihan bayar tahun 2019	145.000.000
Kelebihan bayar tahun 2015-2019	828.037.790
Deviden Tahun 2018	(148.667.724)
<i>Akumulasi Kelebihan Bayar Deviden s.d Tahun 2019</i>	<i>679.370.066</i>

PD Aneka Industri dan Jasa

Penyertaan Modal pada PD Aneka Industri dan Jasa Per 31 Desember 2020 dan 2019 menurut metode ekuitas dicatat Nihil. Pencatatan Nihil disebabkan akumulasi kerugian PD Aneka Industri dan Jasa telah bernilai negatif. Ekuitas PD Aneka Industri dan Jasa sebesar (Rp10.562.852.320,00) menurut Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2020. Kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 100,00%.

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas AIJ 2020</i>	<i>Ekuitas AIJ 2019</i>
Saldo 31 Desember 2019	(9.568.798.309,00)	(6.082.320.334,00)
Koreksi Perubahan Ekuitas	1.290.563,00	(2.279.024.635,00)
(Kerugian) Tahun berjalan	(995.344.574,00)	(1.207.453.340,00)
<i>Saldo 31 Desember 2020</i>	<i>(10.562.852.320,00)</i>	<i>(9.568.798.309,00)</i>

PT Bank Sumut

Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut Per 31 Desember 2020 dan 2019 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp1.969.781.729.075,15 dan Rp1.749.657.490.012,34. Besarnya investasi pada PT Bank Sumut berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Audited* Tahun 2020 dengan kepemilikan 46,95% dengan ringkasan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu 2017</i>
Saldo 31 Desember 2019	3.501.065.484.000,00		1.749.657.490.012,34
Setoran Modal disetor	205.905.990.000,00		100.000.000.000,00
Tambahan modal disetor	41.908.496.822,00		54.625.731.786,00
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi atas Sekuritas yang Tersedia Untuk Dijual	178.267.925.705,00	46,95%	83.688.317.779,73
Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali Program Manfaat Pasti - Setelah Pajak Tangguhan	(36.466.853.624,00)	46,95%	(17.119.454.452,86)
Surplus Revaluasi	(9.476.795.358,00)	46,95%	(4.448.904.974,45)
Saldo Laba Cadangan ditentukan penggunaannya	27.237.771.206,00	46,95%	12.786.838.929,57
Dividen Tunai + Modal disetor dari laba 2019	(517.517.652.910,00)		(242.663.392.817,00)
Cadangan umum	(27.237.771.206,00)	46,95%	(12.786.838.929,57)
Laba Tahun Berjalan	514.627.258.282,00	46,95%	241.593.036.766,94
Pemindahan penyusutan aset tetap	9.476.795.358,00	46,95%	4.448.904.974,45



<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu 2017</i>
<i>Saldo 31 Desember 2020</i>	<i>3.887.790.648.275,00</i>		<i>1.969.781.729.075,15</i>

Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2020 Rp964.661.550.000,00 yaitu 46,38% dari total Saham PT Bank Sumut sebesar Rp2.054.865.220.000,00.

PT. Kawasan Industri Medan

Penyertaan Modal pada PT Kawasan Industri Medan (KIM) Per 31 Desember 2020 dan 2019 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp145.737.133.387,62 dan Rp147.252.007.625,10. Besarnya investasi pada PT Kawasan Industri Medan berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan *Unaudited* Tahun 2019 dengan kepemilikan 30,00%, dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2019	491.524.040.324,00		147.252.007.625,10
Koreksi Tahun Lalu	(6.225.063.204,00)	30,00%	(1.867.518.961,20)
Deviden TB 2019	(15.411.522.272,00)	30,00%	(4.623.456.681,78)
Laba Tahun Berjalan	16.587.004.685,00	30,00%	4.976.101.405,50
<i>Saldo 31 Desember 2020</i>	<i>486.474.459.533,00</i>		<i>145.737.133.387,62</i>

Setoran Modal dan persentase kepemilikan PT Kawasan Industri Medan sesuai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan PT KIM Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
Pemilik Saham

Pemerintah Republik Indonesia	60%	Rp	90.000.000.000,00
Pemerintah Provinsi Sum.Utara	30%	Rp	45.000.000.000,00
Pemerintah Kota Medan	10%	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah Modal disetor	100%	Rp	150.000.000.000,00

PT Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2020 menurut metode biaya adalah sebesar Rp450.000.000,00 yaitu 0,173% terdiri dari 45 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp7.966.962,00 belum dapat diakui sebagai penyertaan modal karena belum ada sertifikat sahamnya. Dari penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 diantaranya sebesar Rp80.000.000,00 merupakan penyetoran modal dalam tahun 2004 yang merupakan konversi dari Dividen tahun 2003 sebesar Rp80.000.000,00 menjadi penyertaan modal sebanyak 8 lembar saham senilai Rp80.000.000,00. Sampai Laporan Keuangan ini dibuat, PT KIM belum menyerahkan Laporan Keuangan karena masih dalam proses audit.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
4.3.1.3 Aset Tetap	Rp11.021.348.370.947,63	Rp11.345.694.757.369,30
Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp11.021.348.370.947,63 dan Rp11.345.694.757.369,30 pada Tabel 67 di bawah ini.		



Tabel 48 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Aset Tetap		Naik / (Turun)
	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	
Tanah	4.991.368.090.363,51	4.908.160.075.088,00	1,70%
Peralatan dan Mesin	3.026.924.050.342,67	2.779.673.553.888,03	8,89%
Gedung dan Bangunan	4.707.965.062.691,18	4.467.056.226.389,18	5,39%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.899.878.357.205,70	9.313.180.517.291,00	6,30%
Aset Tetap Lainnya	293.480.316.269,68	280.183.866.534,59	4,75%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.747.100.182,00	36.835.367.272,30	43,20%
Akumulasi Penyusutan	(11.951.014.606.107,11)	(10.439.394.849.093,80)	14,48%
Total Aset Tetap	11.021.348.370.947,63	11.345.694.757.369,30	(2,86%)

31 Desember 2020

31 Desember 2019

4.3.1.3.1 Tanah Rp4.991.368.090.363,51 Rp4.908.160.075.088,00

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp4.991.368.090.363,51 dan Rp4.908.160.075.088,00. Saldo tersebut merupakan rekapitulasi nilai tanah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

	31 Desember 2020 Audited	31 Desember 2019
Dinas Pendidikan	1.006.067.913.456,00	996.260.459.371,00
Dinas Kesehatan	172.910.287.945,00	229.910.287.945,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	15.264.300.000,00	15.264.300.000,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	214.347.959.830,00	214.347.959.830,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	109.876.135.637,00	78.997.223.696,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.850.320.000,00	2.780.020.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	8.810.900.000,00	8.810.900.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	62.554.804.500,00	62.554.804.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.801.701.850,00	10.801.701.850,00
Dinas Sosial	185.033.110.332,00	137.671.417.215,00
Dinas Tenaga Kerja	25.662.790.600,00	25.662.790.600,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.418.100.000,00	27.418.100.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	120.954.487.188,00	120.769.231.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	29.031.473.200,00	29.031.473.200,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.619.900.000,00	21.619.900.000,00
Dinas Perhubungan	69.728.389.250,00	82.635.952.250,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.299.500.000,00	8.299.500.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.857.200.000,00	5.857.200.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.027.641.787.972,00	873.467.740.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.047.464.544,00	19.913.106.542,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Perpustakaan dan Arsip	19.550.100.000,00	19.550.100.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	28.596.964.764,00	28.596.964.764,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	128.107.229.234,00	128.107.229.234,00
Dinas Perkebunan	120.182.850.600,00	129.082.850.600,00
Dinas Kehutanan	85.069.262.153,00	87.920.562.153,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26.242.200.000,00	26.242.200.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	55.452.873.000,00	107.667.575.250,00
Biro Umum dan Perlengkapan	686.881.595.630,00	686.853.175.630,00
Sekretariat DPRD	298.524.158.855,00	298.524.158.855,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	34.123.517.600,00	34.123.517.600,00
Inspektorat Daerah Provinsi	17.865.100.000,00	17.865.100.000,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	48.023.556.160,00	48.023.556.160,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	170.972.133.400,00	202.592.764.341,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	61.900.022.663,51	61.838.252.002,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.220.600.000,00	52.220.600.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.477.400.000,00	4.477.400.000,00
Total Tanah	4.991.368.090.363,51	4.908.160.075.088,00

Ringkasan mutasi tanah sebagai berikut :

Saldo Awal Tanah	Rp	4.908.160.075.088,00
Belanja Modal Tanah TA. 2020	Rp	185.356.708.726,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	107.755.953.877,51
Mutasi Kurang Antar SKPD dan Lainnya	(Rp)	209.904.647.328,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	4.991.368.090.363,51

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Tanah dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 15.

Saldo Awal Tanah 2020		4.908.160.075.088,00
Mutasi Penambahan	Kapitalisasi Belanja Modal Tahun 2020	185.356.708.726,00
	Reklasifikasi dari Bangunan dan Gedung	185.255.688,00
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2020	392.040.000,00
	Kurang Catat tindak lanjut LHP BPK RI TA 2019	10.696.704.087,00
	Pencacatan Tanah yang sebelumnya belum tercatat	2.500.000.000,00
	Hibah Tanah dari Kabupaten	957.550.661,51
	Koreksi atas jasa Konsultan Sports Centre	1.222.072.500,00
	Mutasi OPD 2020	91.802.330.941,00
	Total Mutasi Penambahan	293.112.662.603,51
Mutasi Pengurangan	Reklasifikasi dari Bangunan dan	(681.319.000,00)



Gedung	
Mutasi OPD 2020	(91.802.330.941,00)
Koreksi Belanja Modal 2020	(26.548.390.252,00)
Reklasifikasi ke Aset Non Operasional	(13.256.563.002,00)
Penghapusan	(73.934.709.133,00)
Koreksi atas tanah SMAN 6 Medan	(3.681.335.000,00)

Total Mutasi Pengurangan (209.904.647.328,00)

Saldo Akhir Tanah 2020 4.991.368.090.363,51

Terdapat sebidang tanah dalam sengketa dan sedang dalam proses sidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan lokasi di Desa Hajoran Pantai Kalangan Km.12-13 Tapanuli Tengah Luas tanah 49.210 m² Nilai Rp82.500,00 belum bersertifikat dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.

Belanja Modal Tanah pada TA 2020 paling besar adalah pengadaan tanah Sumut Sport Center Dinas Pemuda Dan Olahraga yang rencananya akan dipergunakan untuk sarana dan prasarana persiapan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024. Tanggal 23 Desember 2019 diterbitkan Hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan terhadap tanah, tanaman dan bangunan adalah Rp181.711.661.811,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Nilai Tanah	Rp152.951.975.472,00
b. Nilai Bangunan dan Tanaman	Rp 28.759.698.339,00
Total Realisasi untuk Sumut Sport Center adalah sebesar Rp179.500.365.724,00 yaitu:	
a. Tanah (6 April 2020)	Rp152.951.975.472,00
b. Tanaman dan Bangunan	Rp 26.548.390.252,00

Penjelasan kronologi pengadaan Sumut Sport Center dapat dilihat pada Lampiran 26.

Jasa konsultan penilai tanah Sports Centre Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah direalisasikan TA 2019 namun belum dikapitalisasi ke aset induknya tanah Sports Centre TA 2020 sebesar Rp 1.222.072.500,00.

Tanah SMAN 6 Dinas Pendidikan yang dinilai kembali dengan NJOP bukan tahun perolehan sebesar Rp3.681.335.000,00, dimana nilai awal sebesar Rp707.805.000,00 dinilai kembali Rp4.389.140.000,00 selisih Rp3.681.335.000,00.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Rp3.026.924.050.342,67	Rp2.779.673.553.888,03

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.026.924.050.342,67 dan Rp2.779.673.553.888,03. Rincian lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	<u>31 Desember 2020</u> <u>Unaudited</u>	<u>31 December 2019</u>
Dinas Pendidikan	1.217.747.357.664,41	982.991.708.630,03
Dinas Kesehatan	214.093.496.858,00	187.495.602.483,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	27.799.641.623,00	28.682.355.156,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	203.590.985.801,00	190.452.740.601,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	110.832.538.810,00	109.640.391.830,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	30.724.350.102,28	37.274.881.475,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.424.115.329,00	12.498.720.958,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	7.037.702.800,00	6.785.262.800,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.360.242.188,00	9.399.670.777,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.444.668.821,00	13.680.241.686,00
Dinas Sosial	53.499.944.526,98	56.874.324.803,00
Dinas Tenaga Kerja	9.742.742.753,00	9.735.065.997,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.146.987.595,00	5.118.208.595,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	25.815.409.570,00	28.563.162.729,00
Dinas Lingkungan Hidup	51.093.150.820,00	47.609.315.120,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.009.485.923,00	4.771.262.703,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.952.319.123,00	9.756.479.123,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	3.622.405.508,00	3.108.649.161,00
Dinas Perhubungan	147.051.923.580,00	143.546.277.338,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	25.577.006.794,00	36.720.944.091,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.789.719.999,00	14.465.042.999,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	14.126.096.141,00	16.870.286.359,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	56.365.015.184,00	47.751.626.824,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.726.353.468,00	9.028.333.468,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	39.053.564.789,00	39.032.478.789,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	36.717.937.073,00	36.213.519.173,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	58.230.848.838,00	64.946.938.520,00
Dinas Perkebunan	13.187.925.490,00	13.726.001.690,00
Dinas Kehutanan	46.612.315.520,00	44.495.596.620,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.063.748.897,00	6.591.993.771,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.565.090.645,00	26.889.842.282,00
Biro Umum dan Perlengkapan	166.874.387.290,00	144.426.683.591,00
Biro Pemerintahan Umum	9.559.337.434,00	9.559.337.434,00
Biro Bina Perekonomian	2.677.061.131,00	2.681.663.831,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	2.636.970.362,00	2.655.516.562,00
Biro Organisasi	2.374.702.079,00	2.393.008.779,00
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	2.769.759.918,00	2.766.510.918,00
Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	3.532.616.168,00	3.792.380.790,00
Biro Hukum	2.951.749.714,00	2.919.617.814,00
Biro Humas Keprotokolan	7.610.921.425,00	8.549.672.713,00
Sekretariat DPRD	52.910.330.296,00	57.430.979.410,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	16.239.402.295,00	17.709.689.278,00
Inspektorat Daerah Provinsi	6.806.494.892,00	7.300.084.017,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	12.100.599.065,00	15.402.338.565,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.572.918.417,00	34.924.229.706,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	185.107.052.202,00	198.187.033.058,00
Badan Kepegawaian Daerah	7.277.600.408,00	7.741.947.108,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.480.900.468,00	9.510.740.218,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.436.154.545,00	7.005.193.545,00
Total Peralatan dan Mesin	3.026.924.050.342,67	2.779.673.553.888,03

Ringkasan mutasi peralatan dan mesin sebagai berikut :

Saldo Awal Peralatan dan Mesin 2020	Rp	2.779.673.553.888,03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2020	Rp	421.144.729.678,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	55.642.640.975,03
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	229.536.874.198,39
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	3.026.924.050.342,67

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 16.

Saldo Awal Peralatan dan Mesin TA 2020		2.779.673.553.888,03
Mutasi Penambahan		
Kapitalisasi Belanja Modal 2020		421.144.729.678,00
Koreksi OPD		123.519.202,03
Koreksi Belanja Modal		16.920.904.328,00
Kapitalisasi Belanja Jasa 2020		327.289.000,00
Pendapatan Hibah/ Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT		22.050.596.327,00
Reklasifikasi Aset Tetap 2020		2.194.773.500,00
Mutasi OPD 2020		14.025.558.618,00
Total Mutasi Penambahan		476.787.370.653,03
Mutasi Pengurangan		
Koreksi OPD 2020		(123.519.202,17)
Koreksi Belanja Modal 2020		(9.853.018.475,00)
Reklasifikasi Aset Tetap 2020		(97.182.486.256,72)
Mutasi OPD 2020		(14.025.558.618,00)
Penghapusan		(4.546.590.942,00)
Mutasi ke Persediaan		(74.956.331.890,89)
Ekstrakomptable 2020		(28.849.368.813,61)
Total Mutasi Pengurangan		(229.536.874.198,39)
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin 2020		3.026.924.050.342,67



Pendanaan untuk penanganan pandemic Covid-19 yang bersumber dari hibah pihak ketiga dalam bentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut Alat Angkutan dari GAPKINDO yaitu Ambulance (BK 1794 J) dicatat pada OPD BPKAD senilai Rp232.400.000,00.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Rp4.707.965.062.691,18	Rp4.467.056.226.389,18

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp4.707.965.062.691,18 dan Rp4.467.056.226.389,18 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2020 Unaudited	31 December 2019
Dinas Pendidikan	2.602.106.868.679,11	2.501.708.586.722,18
Dinas Kesehatan	87.972.604.200,00	89.392.215.302,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	15.183.597.213,00	14.603.697.813,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	37.658.735.268,00	37.192.060.268,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	32.242.633.190,00	30.164.460.840,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	46.939.016.170,00	44.417.447.770,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.427.139.935,00	2.530.058.320,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	8.631.901.948,00	7.746.074.344,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.462.347.607,00	4.462.347.607,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.286.843.082,00	14.286.843.082,00
Dinas Sosial	100.030.660.024,00	96.053.893.122,00
Dinas Tenaga Kerja	13.610.234.214,00	13.356.563.214,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.985.683.701,00	8.877.404.701,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	59.340.443.200,00	40.227.299.150,00
Dinas Lingkungan Hidup	25.317.702.324,00	21.370.256.474,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.259.713.000,00	28.259.713.000,00
Dinas Perhubungan	60.995.943.318,00	30.099.415.294,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.713.038.421,00	4.713.038.421,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24.746.116.000,00	24.546.895.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	9.329.064.116,00	10.299.687.565,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	435.734.103.069,32	404.645.680.550,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21.364.896.516,00	19.842.120.048,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	24.124.320.906,00	24.124.320.906,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	35.856.768.760,00	35.680.477.802,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	121.060.914.881,00	122.572.146.811,00
Dinas Perkebunan	19.182.357.208,00	19.463.137.208,00
Dinas Kehutanan	36.215.485.738,00	37.000.945.738,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.926.241.090,00	11.014.244.900,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.440.198.229,50	16.588.064.088,00
Biro Umum dan Perlengkapan	282.839.587.347,00	232.944.622.317,00
Biro Pemerintahan Umum	462.075.141,00	462.075.141,00
Sekretariat DPRD	222.856.024.687,00	222.277.732.107,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	8.940.909.600,00	12.545.782.904,00
Inspektorat Daerah Provinsi	32.981.066.550,00	32.644.413.550,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	6.368.266.000,00	6.368.266.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25.151.774.322,00	26.777.587.572,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	172.148.647.970,25	171.127.196.338,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.751.275.366,00	40.596.243.700,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.319.863.700,00	6.073.210.700,00
Total Gedung dan Bangunan	4.707.965.062.691,18	4.467.056.226.389,18

Ringkasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Saldo Awal Bangunan dan Gedung 2020	Rp	4.467.056.226.389,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2020	Rp	240.314.232.826,07
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	126.398.866.836,45
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	125.804.263.360,52
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	4.707.965.062.691,18

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 17.

Saldo Awal Gedung dan Bangunan 2020 4.467.056.226.389,18

Mutasi Penambahan

Kapitalisasi Belanja Modal 2020	240.314.232.826,07
Koreksi OPD	0,25
Koreksi Belanja Modal	35.890.089.203,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2020	69.631.196.345,00
Pendapatan hibah	11.088.965.298,20
Reklasifikasi Aset Tetap	2.341.703.888,00
Mutasi opd 2020	7.446.912.102,00
Total Mutasi Penambahan	366.713.099.662,52

Mutasi Pengurangan koreksi OPD 0,52

Koreksi Belanja Modal	60.552.932.613,00
Reklasifikasi Aset Tetap	50.018.105.743,00
Mutasi OPD 2020	7.159.394.602,00
Penghapusan	6.428.225.202,00
Persediaan	3.287.850,00
Ekstrakomptabel	1.642.317.350,00
Total Mutasi Pengurangan	125.804.263.360,52



Saldo Akhir Gedung dan Bangunan 2020

4.707.965.062.691,18

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp9.899.878.357.205,70	Rp9.313.180.517.291,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp9.899.878.357.205,70 dan Rp9.313.180.517.291,00 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2020 Unaudited	31 Desember 2019
Dinas Pendidikan	80.768.262.498,60	42.503.325.939,00
Dinas Kesehatan	1.387.814.500,00	1.387.814.500,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	3.432.507.000,00	3.142.870.500,00
Rumah Sakit Umum Haji Medan (Blud)	6.251.578.649,00	6.251.578.649,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	7.418.222.683.855,10	7.025.589.086.267,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.886.368.414.270,00	1.734.428.034.519,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	412.607.829.298,00	412.607.829.298,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.259.160,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	776.448.289,00	776.448.289,00
Dinas Sosial	1.570.104.224,00	1.570.104.224,00
Dinas Tenaga Kerja	84.790.000,00	84.790.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	5.292.503.901,00	2.856.894.850,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.211.135.853,00	6.867.231.923,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	189.340.000,00	189.340.000,00
Dinas Perhubungan	2.466.446.750,00	2.267.291.750,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	550.175.180,00	550.175.180,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	147.250.000,00	147.250.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	326.828.400,00	326.828.400,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	20.811.206.887,00	19.306.898.887,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	718.850.000,00	1.959.461.200,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	174.352.000,00	174.352.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	12.331.321.147,00	12.160.096.502,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	24.114.755.221,00	24.156.723.971,00
Dinas Perkebunan	1.267.407.850,00	1.267.407.850,00
Dinas Kehutanan	2.188.885.377,00	2.188.885.377,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	165.090.900,00	165.090.900,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.959.950,00	9.959.950,00
Biro Umum dan Perlengkapan	1.356.073.550,00	1.356.073.550,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.978.380,00	37.978.380,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	799.441.000,00	799.441.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	631.701.000,00	631.701.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	64.000.000,00	64.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Sekretariat DPRD	2.166.046.325,00	2.166.046.325,00
Inspektorat Provinsi	706.031.300,00	507.103.300,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.484.435.651,00	4.484.435.651,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	196.708.000,00	196.708.000,00
Total Jalan Irigasi dan Jaringan	9.899.878.357.205,70	9.313.180.517.291,00

Ringkasan mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan Jaringan dan Irigasi 2020	Rp	9.313.180.517.291,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2020	Rp	538.515.511.860,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	65.862.357.267,50
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	17.680.029.212,80
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	9.899.878.357.205,70

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 18.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 9.313.180.517.291,00

Mutasi Penambahan	Kapitalisasi Belanja Modal Tahun 2020	538.515.511.860,00
	Koreksi OPD 2020	2,70
	Kapitalisasi Belanja Modal 2020	40.221.950.121,50
	Koreksi Belanja Modal 2020	16.372.744.734,00
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2020	404.647.635,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	8.863.014.774,30
Total Mutasi Penambahan	604.377.869.127,50	

Mutasi pengurangan	Koreksi Belanja Modal 2020	7.298.058.921,80
	Reklasifikasi Aset Tetap	6.811.560.931,00
	Penghapusan	3.570.409.360,00
	Total Mutasi Pengurangan	17.680.029.212,80

Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 9.899.878.357.205,70

4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp293.480.316.269,68 **Rp280.183.866.534,59**

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp293.480.316.269,68 dan Rp280.183.866.534,59. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u> <u>Unaudited</u>	<u>31 December 2019</u>
Dinas Pendidikan	147.608.152.301,68	137.593.335.693,59
Dinas Kesehatan	68.100.000,00	68.100.000,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	248.503.500,00	248.503.500,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	4.798.959.694,00	4.119.946.694,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	17.958.175.538,00	15.938.773.538,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.278.147.000,00	23.278.147.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	766.868.000,00	766.868.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
Dinas Sosial	25.955.250,00	25.955.250,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	2.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	2.736.894.105,00	2.581.974.520,00
Dinas Lingkungan Hidup	469.752.520,00	469.752.520,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.427.294,00	59.427.294,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	54.270.000,00	54.270.000,00
Dinas Perhubungan	2.370.058.000,00	2.809.958.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.960.000,00	9.960.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	86.400.000,00	83.800.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	14.915.600,00	18.280.200,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.327.232.000,00	4.183.709.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.277.005.000,00	4.083.005.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.175.972.725,00	4.173.917.725,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	8.083.435.140,00	8.083.435.140,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.166.098.500,00	2.096.485.000,00
Dinas Perkebunan	1.654.519.411,00	1.654.519.411,00
Dinas Kehutanan	1.614.831.500,00	1.444.177.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	159.520.500,00	159.520.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	133.717.145,00	133.717.145,00
Biro Umum dan Perlengkapan	1.790.098.400,00	1.784.420.288,00
Biro Pemerintahan Umum	1.332.918.000,00	1.142.598.000,00
Biro Organisasi	56.968.949,00	56.968.949,00
Biro Hukum	5.476.100,00	5.476.100,00
Biro Humas Keprotokolan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	3.238.016.750,00	3.238.016.750,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	321.180.000,00	380.162.706,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.562.445.575,00	2.562.445.575,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	101.171.236,00	20.839.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	56.805.861.456,00	56.731.591.456,00
Badan Kepegawaian Daerah	29.570.000,00	29.570.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.138.680,00	19.138.680,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.600.400,00	13.600.400,00
Total Aset Tetap Lainnya	293.480.316.269,68	280.183.866.534,59

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2020 Rp 280.183.866.534,59



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2020	Rp	112.613.786.043,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	11.365.678.929,21
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	110.683.015.237,12
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	293.480.316.269,68

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 19.

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2020	280.183.866.534,59
------------------------------------	--------------------

Mutasi Penambahan

Kapitalisasi Belanja Modal 2020	112.613.786.043,00
Koreksi OPD	17,21
Koreksi Belanja Modal	7.442.342.426,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2020	2.615.431.236,00
Reklasifikasi Aset Tetap	1.121.153.000,00
Mutasi OPD 2020	186.752.250,00
Total Mutasi Penambahan	123.979.464.972,21

Mutasi Pengurangan

Koreksi OPD	(0,12)
Koreksi Belanja Modal	(20.729.077.288,00)
Reklasifikasi Aset Tetap	(8.383.800.870,00)
Mutasi OPD 2020	(226.265.250,00)
Penghapusan	(317.320.000,00)
Mutasi ke Persediaan	(4.691.827.068,08)
Ekstrakomtable 2020	(76.334.724.760,92)
Total Mutasi Pengurangan	(110.683.015.237,12)

Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya 2020	293.480.316.269,68
-------------------------------------	--------------------

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp52.747.100.182,00	Rp36.835.367.272,30

Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp52.747.100.182,00 dan Rp36.835.367.272,30. Rincian KDP berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

Jumlah KDP berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020 Unaudited	31 Desember 2019
Dinas Pendidikan	23.795.932.984,00	17.315.410.641,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	10.952.440.957,00	10.952.440.957,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	4.371.515.674,30
Satuan Polisi Pamong Praja	13.802.726.241,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Biro Umum dan Perlengkapan	4.196.000.000,00	4.196.000.000,00
Total Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.747.100.182,00	36.835.367.272,30

Jumlah KDP berdasarkan jenis aset tetapnya adalah

1. KDP Tanah	13.802.726.241,00
2. KDP Gedung dan Bangunan	27.991.932.984,00
3. KDP Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.952.440.957,00
<i>Jumlah</i>	<u>52.747.100.182,00</u>

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 20.

Saldo Awal KDP TA 2019		36.835.367.272,30
Mutasi Penambahan	Revitalisasi Gedung	6.280.522.344,00
	Kapitalisasi belanja modal Konstruksi	13.802.726.241,00
	Kurang Catat LHP BPK RI Ta 2019	199.999.999,00
		<u>20.283.248.584,00</u>
Mutasi Pengurangan	Reklasifikasi Aset Tetap	(4.371.515.674,30)
	Total Mutasi Pengurangan	<u>(4.371.515.674,30)</u>
Saldo Akhir KDP TA 2020		52.747.100.182,00

4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2020** (Rp11.951.014.606.107,11) **31 Desember 2019** (Rp10.439.394.849.093,80)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan KDP. Akumulasi Penyusutan tahun per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp11.951.014.606.107,11 dan Rp10.439.394.849.093,80. Ringkasan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Peralatan Dan Mesin	(2.327.248.040.495,88)	(2.015.621.168.009,13)
Gedung Dan Bangunan	(1.525.786.653.626,55)	(1.253.092.014.576,66)
Jalan,Irigasi Dan Jaringan	(8.080.125.518.584,60)	(7.162.050.903.451,16)
Aset Tetap Lainnya	(17.854.393.400,08)	(8.630.763.056,83)
<i>Total Akumulasi Penyusutan 2020</i>	<i>(11.951.014.606.107,11)</i>	<i>(10.439.394.849.093,80)</i>

Rincian per SKPD adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

	31 Desember 2020 Unaudited	31 December 2019
Dinas Pendidikan	(1.677.582.653.298,79)	(1.219.287.421.106,88)
Dinas Kesehatan	(227.622.707.852,48)	(209.494.433.365,76)
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	(28.607.666.537,36)	(27.429.148.305,07)
Rumah Sakit Haji Medan	(173.332.446.871,93)	(149.089.650.682,55)
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	(6.899.338.729.878,61)	(6.147.915.450.636,74)
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	(953.791.058.759,04)	(851.285.817.742,25)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(287.620.003.552,46)	(267.264.734.565,53)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(8.127.661.612,78)	(7.733.834.888,62)
Satuan Polisi Pamong Praja	(9.105.258.947,41)	(10.431.606.024,01)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(14.098.818.015,44)	(11.724.075.685,92)
Dinas Sosial	(115.153.420.144,55)	(109.974.125.677,33)
Dinas Tenaga Kerja	(13.749.009.480,28)	(13.650.644.451,39)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(5.201.056.123,76)	(4.225.708.381,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	(31.756.481.405,23)	(32.334.325.826,48)
Dinas Lingkungan Hidup	(44.721.534.673,99)	(38.280.891.789,51)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.164.796.943,19)	(2.208.712.568,93)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(9.442.433.815,01)	(7.956.662.739,91)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	(2.137.847.987,51)	(1.508.069.381,64)
Dinas Perhubungan	(140.987.965.321,80)	(132.682.592.944,14)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(25.558.222.096,14)	(35.393.132.062,52)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(19.218.962.779,98)	(17.294.068.917,42)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	(15.426.183.974,80)	(18.289.328.026,42)
Dinas Pemuda dan Olah Raga	(117.334.893.513,93)	(101.320.846.891,15)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(18.470.062.380,27)	(15.255.972.951,47)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(39.241.201.446,56)	(35.323.929.611,03)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(44.415.702.471,21)	(39.280.668.757,96)
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	(102.322.926.898,04)	(99.858.255.775,04)
Dinas Perkebunan	(19.413.204.596,61)	(18.722.659.806,15)
Dinas Kehutanan	(58.863.393.276,44)	(54.880.527.565,46)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(9.542.546.097,30)	(8.290.542.178,70)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(26.572.031.810,61)	(27.771.744.301,52)
Biro Umum dan Perlengkapan	(389.926.781.611,56)	(301.338.302.955,90)
Biro Pemerintahan Umum	(9.773.428.815,02)	(9.242.462.582,20)
Biro Bina Perekonomian	(2.493.897.521,71)	(2.309.766.056,71)
Biro Sosial dan Kesejahteraan	(2.444.274.397,71)	(2.346.845.681,57)
Biro Organisasi	(2.142.777.536,14)	(2.026.521.619,71)
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	(2.495.218.846,57)	(2.326.949.703,71)
Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	(3.288.074.635,50)	(3.343.855.025,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Biro Hukum	(2.670.898.390,42)	(2.418.387.859,00)
Biro Humas Keprotokolan	(5.540.984.731,00)	(5.139.034.862,36)
Sekretariat DPRD	(80.943.039.619,45)	(83.239.656.620,21)
Badan Penghubung Daerah Provinsi	(14.546.627.081,56)	(18.712.692.043,07)
Inspektorat Daerah Provinsi	(8.465.619.717,99)	(7.513.059.042,60)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	(17.038.946.869,70)	(18.445.152.044,37)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(35.219.387.494,15)	(39.872.161.957,82)
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	(203.394.073.372,15)	(199.820.738.008,91)
Badan Kepegawaian Daerah	(6.933.777.667,55)	(7.034.540.356,27)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(12.949.526.771,60)	(10.644.482.866,09)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(8.826.388.463,82)	(7.460.656.199,76)
Total Akumulasi Penyusutan	(11.951.014.606.107,11)	(10.439.394.849.093,80)

4.3.1.4 Aset Lainnya **31 Desember 2020**
Rp1.951.891.355.557,98 **31 Desember 2019**
Rp1.773.643.132.538,79
Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.951.891.355.557,98 dan Rp1.773.643.132.538,79 terdiri dari:

Tabel 49 Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Aset Lainnya	
	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Tagihan Jangka Panjang	2.087.746.424,00	2.379.731.724,00
Aset Tidak Berwujud	22.478.194.317,24	15.021.588.915,00
Aset Lain-lain	1.927.325.414.816,74	1.756.241.811.899,79
Total Aset Lainnya	1.951.891.355.557,98	1.773.643.132.538,79

Rincian lebih lanjut dari saldo Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp2.087.746.424,00 dan Rp2.379.731.724,00 terdiri dari:

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Tagihan Penjualan Angsuran		
Angsuran Penjualan Tanah	604.058.525,00	896.043.825,00
Pemprovsu pada BPKAD		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Daerah	1.483.687.899,00	1.483.687.899,00



Saldo Tagihan Jangka Panjang 2.087.746.424,00 2.379.731.724,00

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD adalah pembayaran angsuran penjualan tanah eks PRPTE Dinas Perkebunan Dinas Provinsi Sumatera Utara. Keterangan dapat dilihat pada Lampiran 11.

Ringkasan perhitungan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran Tanah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran 2019	896.043.825,00
Bagian Lancar 2020	(113.556.000,00)
Pelunasan angsuran sampai dengan 2027	(178.429.300,00)
<i>Tagihan Penjualan Angsuran 2020</i>	<i>604.058.525,00</i>

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah - SKPKD

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masih pada angka yang sama sebesar Rp1.483.687.899,00 merupakan tagihan akibat adanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP/TGR), yang akan jatuh tempo setelah tahun 2017 atau lebih dari satu tahun terhitung dari tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

1. Musleh	9.749.999,00
2. Drs.Gunadi Napitupulu	23.800.000,00
3. Drs.Bonar Lumban Gaol	20.000.000,00
4. Zainuddin Syah Lubis	1.426.000,00
5. Bendahara Biro Bina Sosial	1.428.711.900,00
<i>Jumlah</i>	<i>1.483.687.899,00</i>

Berikut penjelasan lebih lanjut:

- Tuntutan ganti rugi kepada Musleh merupakan ketekoran kas karena penggunaan uang penerimaan/pendapatan RSUD Pirngadi. Pada waktu itu yang bersangkutan sebagai Bendaharawan Khusus Penerimaan.
- Tuntutan ganti rugi kepada Drs. Gunadi Napitupulu mantan PNS pada Biro Hukum Setdaprovsumerupakan kerugian daerah karena pembebasan tanah pertapakan Sekolah Dasar Negeri Nomor 173525 pada tahun 1995 di Kabupaten Tapanuli Utara (Kab.Tobasa).
- Tuntutan ganti rugi kepada Drs. Bonar Lumban Gaol Cs. merupakan kerugian daerah atas hilangnya kendaraan dinas milik Kantor PDE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, merk Toyota Kijang Standar (SX) BK785 H pada tanggal 7 Februari 2000.



- Tuntutan ganti rugi kepada Zainuddin Syah Lubis merupakan kerugian daerah atas kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha pada tahun 1993.
- Tuntutan ganti rugi kepada Sdr. Nurintan (Bendaharawan Proyek Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2013 pada Biro Bina Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.428.711.900,00 adalah merupakan kerugian daerah atas dana proyek yang belum dipertanggungjawabkan. Terhadap permasalahan Sdr.Nurintan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan No:1.814/Pid.B/2004/PN-Mdn tanggal 11 November 2004, yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 150.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/609/2005 tanggal 21 Maret 2005, menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sdr. Nurintan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Atas tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1.428.711.900,00 kepada Sdr.Nurintan oleh Tim TP/TGR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dalam proses.

b. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp22.478.194.317,24 dan Rp15.021.588.915,00. Nilai aset tidak berwujud merupakan nilai netto yang telah dikurangi dengan akumulasi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2030 sebagai berikut.

	2020	2019
Aset Tidak Berwujud	60.933.440.628,00	60.000.997.720,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(38.455.246.310,76)	(44.979.408.805,00)
Nilai Bersih Aset Tidak Berwujud	22.478.194.317,24	15.021.588.915,00

Berikut ini rekapitulasi aset tak berwujud pada SKPD:

	Per 31 Desember 2020 Unaudited	Per 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan	16.913.050.144,33	8.449.011.025,00
Dinas Kesehatan	353.791.299,41	248.164.000,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	70.271.428,57	98.314.286,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	0,00	6.857.143,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	0,00	21.175.000,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	6.302.214,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	832.010.571,43	1.036.762.145,00
Dinas Sosial	6.097.142,86	12.194.286,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46.071.428,57	61.428.572,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	133.437.857,14	165.718.286,00
Dinas Lingkungan Hidup	136063902,86	35.330.623,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	136.063.902,86	181.418.542,00
Dinas Perhubungan	503.062.815,13	261.683.571,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	118.250.178,57	219.972.857,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	28.073.428,57	42.110.144,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	14.314.286,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	383.891.034,35	28.521.430,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14.000.000,00	42.000.000,00
Dinas Kehutanan	140.082.352,94	63.300.000,00
Biro Umum dan Perlengkapan	6.914.285,71	31.596.429,00
Biro Pemerintahan Umum	0,00	27.430.638,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	82.000.000,00	707.143,00
Inspektorat Daerah Provinsi	368.969.285,72	406.398.571,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	27.771.429,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	189.060.190,48	356.604.723,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.936.684.264,71	3.154.594.429,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	19.071.429,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.835.714,00
TOTAL	22.478.194.317,24	15.021.588.915,00

c. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.927.325.414.816,74 dan Rp1.756.241.811.899,79. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Lain-lain	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Aset Non Operasional	1.516.936.660.669,79	1.422.742.355.254,00
Kondisi Rusak berat	405.475.678.418,95	328.586.380.917,79
Dan Lain-Lain	4.913.075.728,00	4.913.075.728,00
<i>Total Aset Lain – lain</i>	<i>1.927.325.414.816,74</i>	<i>1.756.241.811.899,79</i>

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 Rp1.927.325.414.816,74 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

SKPD	Aset Non Operasional	Kondisi Rusak berat	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lainnya
Dinas Pendidikan	52.819.152.968,79	125.013.974.699,95	0,00	177.833.127.668,74
Dinas Kesehatan	65.385.259.003,00	52.007.032.266,00	0,00	117.392.291.269,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	0,00	2.878.498.876,00	0,00	2.878.498.876,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	19.635.613.541,00	4.708.449.255,00	0,00	24.344.062.796,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.187.564.919.691,00	10.920.216.909,00	0,00	1.198.485.136.600,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata	40.522.133.647,00	3.837.941.036,00	0,00	44.360.074.683,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

SKPD	Aset Non Operasional	Kondisi Rusak berat	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lainnya
Ruang				
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	5.422.686.662,00	0,00	5.422.686.662,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	7.001.502.159,00	0,00	7.001.502.159,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.460.340.065,00	1.007.370.900,00	0,00	3.467.710.965,00
Dinas Sosial	0,00	3.781.610.405,00	0,00	3.781.610.405,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	9.794.407.850,00	0,00	9.794.407.850,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	578.903.300,00	0,00	578.903.300,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	139.521.000,00	11.753.532.192,00	0,00	11.893.053.192,00
Dinas Lingkungan Hidup	9.161.816.325,00	310.200.000,00	0,00	9.472.016.325,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	398.555.000,00	0,00	398.555.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah		91.507.750,00		91.507.750,00
Dinas Perhubungan	14.877.797.000,00	5.757.897.480,00	0,00	20.635.694.480,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	13.302.556.212,00	0,00	13.302.556.212,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	133.498.900,00	0,00	133.498.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	488.140.000,00	5.289.376.452,00	0,00	5.777.516.452,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	26.565.413.252,00	611.067.153,00	0,00	27.176.480.405,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.765.361.700,00	6.089.182.000,00	0,00	15.854.543.700,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	192.216.000,00	0,00	192.216.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	9.448.245.903,00	0,00	9.448.245.903,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.673.701.000,00	12.510.859.591,00	0,00	14.184.560.591,00
Dinas Perkebunan	0,00	7.931.308.900,00	0,00	7.931.308.900,00
Dinas Kehutanan	0,00	1.927.208.500,00	0,00	1.927.208.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.596.449.000,00	7.863.614.675,00	0,00	10.460.063.675,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	3.999.189.865,00	0,00	3.999.189.865,00
Biro Umum dan Perlengkapan	2.240.635.623,00	9.511.000,00	0,00	2.250.146.623,00
Biro Pemerintahan Umum	0,00	808.936.010,00	0,00	808.936.010,00
Biro Bina Perekonomian	0,00	733.883.500,00	0,00	733.883.500,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	0,00	706.513.700,00	0,00	706.513.700,00
Biro Organisasi	0,00	217.107.000,00	0,00	217.107.000,00
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	0,00	133.041.870,00	0,00	133.041.870,00
Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.525.412.300,00	0,00	1.525.412.300,00
Biro Hukum	0,00	202.208.800,00	0,00	202.208.800,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

SKPD	Aset Non Operasional	Kondisi Rusak berat	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lainnya
Biro Humas Keprotokolan	0,00	1.369.343.410,00	0,00	1.369.343.410,00
Sekretariat DPRD	0,00	9.654.175.614,00	0,00	9.654.175.614,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	0,00	6.195.553.991,00	0,00	6.195.553.991,00
Inspektorat Daerah Provinsi	0,00	700.554.327,00	0,00	700.554.327,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	3.708.045.500,00	0,00	3.708.045.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80.978.828.778,00	19.175.185.599,00	4.913.075.728,00	105.067.090.105,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	41.596.159.256,00	0,00	41.596.159.256,00
Badan Kepegawaian Daerah	61.578.076,00	2.408.711.300,00	0,00	2.470.289.376,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	336.150.000,00	0,00	336.150.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1.432.574.351,00	0,00	1.432.574.351,00
Jumlah	1.516.936.660.669,79	405.475.678.418,95	4.913.075.728,00	1.927.325.414.816,74

Aset Lain-lain pada kolom Dan Lain-lain di BPKAD sebesar Rp4.913.075.728,00 pada table di atas terdiri dari:

- Reklas dari Aset Tetap Rp2.138.852.500,00
- Hak Tagih kepada KPPN TA.2010 Rp 94.747.729,00
- Pajak Pusat yang tidak disetor Bendahara Rp2.679.475.499,00.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
4.3.2 Kewajiban	Rp1.563.986.566.796,97	Rp481.658.220.742,27
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.		
Saldo kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.563.986.566.796,97 dan Rp481.658.220.742,27 terdiri dari:		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.027.928.417.915,97	481.658.220.742,27
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	536.058.148.881,00	0,00
Jumlah Kewajiban	1.563.986.566.796,97	481.658.220.742,27

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.027.928.417.915,97 dan Rp481.658.220.742,27 terdiri dari:



Tabel 51 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	11.028.400,00	12.054.738,00
Pendapatan diterima dimuka	1.033.942.589,97	1.177.181.089,97
Utang beban	964.471.263.302,00	424.561.718.638,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	62.412.183.624,00	55.907.266.276,30
<i>Jumlah Kewajiban</i>	<i>1.027.928.417.915,97</i>	<i>481.658.220.742,27</i>

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp11.028.400,00	Rp12.054.738,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Utang PFK pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp11.028.400,00 dan Rp12.054.738,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	Mutasi (+)	Mutasi (-)	31 Desember 2020
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	1.026.338,00	-	1.026.338,00	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.028.400,00	-	-	11.028.400,00
Jumlah	12.054.738,00	-	1.026.338,00	11.028.400,00

Hutang PFK sebesar Rp11.028.400,00 pada Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu yang merupakan Hutang PFK Pajak sejak tahun 2016 yang belum disetor ke kas negara.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	Rp1.033.942.589,97	Rp1.177.181.089,97

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.033.942.589,97 dan Rp1.177.181.089,97 yang terdiri dari (dalam Rupiah):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	679.370.066,00	679.370.066,00
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	354.572.523,97	497.811.023,97
<i>Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka</i>	<i>1.033.942.589,97</i>	<i>1.177.181.089,97</i>

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III



Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III menampung kelebihan pembayaran deviden oleh PT. Dhirga Surya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2020 yaitu sebesar Rp679.370.066,00. Ringkasan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan pembayaran deviden tahun 2015	203.258.898
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2016	139.778.892
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2017	190.000.000
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2018	150.000.000
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2019	145.000.000
	<hr/>
	828.037.790
Deviden perhitungan Laporan Keuangan 2018	(148.667.724)
<i>Jumlah Kelebihan pembayaran deviden</i>	<hr/> <i>679.370.066</i>

Pendapatan Diterima Dimuka lainnya

Saldo Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp641.049.523,97 sebesar Rp497.811.023,97. Pendapatan diterima dimuka tersebut berupa:

- i. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut, gedung sayap kanan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, sesuai SK Gubernur Nomor 821.28/2272/2019 tanggal 9 Agustus 2019. Pembayaran oleh PT Bank Sumut telah diterima pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp377.055.000,00 untuk masa sewa lima tahun dihitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 s.d. 21 Agustus 2023.
- ii. Penerimaan sewa dari PT Indosat, Lantai XII Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/204/KPTS/2016 tanggal 22 Maret 2016. Telah diterima sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 15 Juli 2016, untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 22 Maret 2016 s.d 22 Maret 2021.
- iii. Penerimaan sewa dari PT Pelindo I, Tanah dan Bangunan Jl. Gunung Krakatau No. 112 Medan, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2016 tanggal 13 September 2016. Telah diterima sebesar Rp360.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 13 September 2016 s.d 13 September 2021.
- iv. Penerimaan sewa dari PT Sinar Belitang Utama, Tanah/lahan Milik Pemprov di Jalan TPI Bagan Deli Belawan Lingk.III, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/550/KPTS/2016 tanggal 13 September 2016. Telah diterima sebesar Rp10.080.000,00 untuk masa sewa 1 tahun dihitung sejak tanggal 7 Januari 2020 s.d 7 Januari 2021.
- v. Telah habis masa kontrak dengan PT Atra Kana Perkasa, Tanah di Jalan Soekarno Hatta KM 21 Nomor 45 Kota Binjai, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/72/KPTS/2014 tanggal 20 Januari 2014. Telah diterima sebesar



Rp344.400.000,00 pada tanggal 25 Februari 2014 untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 27 Januari 2014 s.d 27 Januari 2019.

- vi. Penerimaan sewa dari Yayasan Kasih Arga Putra, Tanah dan Bangunan Jl. Merdeka 22 Dolok Sanggul, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/91/KPTS/2018 tanggal 22 Februari 2018. Senilai Rp51.187.500,00 untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 22 Februari 2018 s.d 22 Februari 2023.
- vii. Penerimaan sewa dari Kantin Dharma Wanita Bappeda Provsu Jl. Diponegoro No. 21A sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 028/9864 tanggal 1 Oktober 2018. Senilai Rp4.800.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 s.d 1 Oktober 2020.
- viii. Penerimaan sewa dari Kantin Inspektorat Provsu Jl. K.H.Wahid Hasym No.8 Medan, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 028/9863 tanggal 1 Oktober 2018. Senilai Rp10.200.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 s.d 1 Oktober 2020.
- ix. Penerimaan sewa bangunan kantin Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. M. Ildrem Medan Jl. Letjend. Jamin Ginting KM.10 Jl. Tali Air No.21 Medan (Luas bangunan 112 M2), sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 011/9899/2018. Senilai Rp13.440.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2019 s.d 1 Oktober 2020.
- x. Penerimaan sewa dari PT. Bank Sumut Cabang Jakarta, tempat ATM Bank Sumut Cabang Jakarta di Jl. Jambu Nomor 29 Kelurahan Gondangdia Kantor Penghubung Daerah Provsu, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/8411 tanggal 10 Oktober 2020. Telah diterima sebesar Rp52.500.000,00 untuk masa sewa 5 tahun dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2020 s.d 10 Oktober 2025
- xi. Penerimaan sewa dari Koperasi Serba Usaha Panla Mandiri, tanah milik Pemprovsu Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu Eks. TPI Pantai Labu Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 593/8260 tanggal 6 November 2020. Telah diterima sebesar Rp20.160.000,00 untuk masa sewa 2 tahun sejak 6 November 2020 s.d 6 November 2022.
- xii. Penerimaan sewa kantin di lingkungan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 104 Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/4060 tanggal 1 September 2020. Senilai Rp5.040.000,00 untuk masa sewa 2 tahun dihitung sejak 1 September 2020 s.d 1



September 2022. Pembayaran sewa masih 1 tahun sebesar Rp2.520.000,00 sampai dengan September 2021.

Tabel 53 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2019	Mutasi		Per 31 Desember 2020
		Penambahan	Pengurangan	
PT Bank Sumut	276.507.000,00	0,00	(75.411.000,00)	201.096.000,00
PT Indosat	60.958.904,11	0,00	(50.000.000,00)	10.958.904,11
PT.PELINDO 1	122.301.369,86	0,00	(72.000.000,00)	50.301.369,86
PT.Sinar Belitang Utama	0,00	10.080.000,00	(10.080.000,00)	0,00
Yayasan Kasih Arga Putra	32.418.750,00	0,00	(10.237.500,00)	22.181.250,00
Gedung Kantin Bappeda	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00
Gedung Kantin Inspektorat	3.825.000,00	0,00	(3.825.000,00)	0,00
Sewa ATM Bank Sumut Cab Jakarta	0,00	52.500.000,00	(2.625.000,00)	49.875.000,00
Koperasi Serba Usaha Panla Mandiri	0,00	20.160.000,00	(1.680.000,00)	18.480.000,00
Gedung Kantin Disbudpar	0,00	2.520.000,00	(840.000,00)	1.680.000,00
Jumlah	497.811.023,97	85.260.000,00	(228.498.500,00)	354.572.523,97

4.3.2.1.3 Utang Beban 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp964.471.263.302,00 **Rp424.561.718.638,00**

Utang beban timbul karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima hak atas barang/jasa, dan harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Utang beban per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp964.471.263.302,00 dan Rp424.561.718.638,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Utang Beban Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Utang beban pegawai	728.047.200,00	1.501.783.500,00
2	Utang beban barang jasa :		
	Utang beban telepon	98.671.131,00	89.715.440,00
	Utang beban air	240.564.144,00	212.595.709,00
	Utang beban listrik	1.390.352.960,00	1.210.388.683,00
	Utang beban kawat/faksimili/internet	30.274.250,00	-
	Utang beban pemeliharaan jaringan	14.000.000,00	-
	Utang beban sewa	15.516.138,00	-
	Utang beban obat	4.108.369.705,00	8.144.621.319,00
	Utang beban jasa dokter	89.496.328,00	777.042.260,00
	Utang beban cetak	547.367.500,00	611.937.500,00
	Utang beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	18.094.520,00
3	Utang beban transfer	957.208.603.946,00	411.995.539.707,00
	Jumlah Utang Beban	964.471.263.302,00	424.561.718.638,00



Rincian utang beban masing-masing OPD data dilihat pada Lampiran 21.

Utang beban transfer merupakan hak Pemerintah Kabupaten/Kota atas bagi hasil pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Sumatera Utara Bab VI Pasal 41 ayat 10 menyatakan bahwa penyaluran dana belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilakukan per bulan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian utang beban transfer sebesar Rp957.208.603.946,00 dapat dilihat pada Lampiran 22. Rekap menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

	Penetapan Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil	Saldo Utang Bagi Hasil Tahun 2020
1. Kota Medan	717.386.194.653,00	283.526.119.916,00	433.860.074.737,00
2. Kota Binjai	38.884.889.923,00	26.300.293.687,00	12.584.596.236,00
3. Kota Tebing Tinggi	32.743.019.256,00	20.785.044.489,00	11.957.974.767,00
4. Kota Pematang Siantar	42.234.311.076,00	29.489.370.808,00	12.744.940.268,00
5. Kota Sibolga	20.237.294.757,00	15.393.362.911,00	4.843.931.846,00
6. Kota Tanjung Balai	27.370.127.772,00	20.800.590.093,00	6.569.537.679,00
7. Kab. Batubara	54.767.887.376,00	37.070.355.400,00	17.697.531.976,00
8. Kab. Asahan	86.434.162.664,00	54.885.792.544,00	31.548.370.120,00
9. Kab. Dairi	39.489.216.202,00	28.253.311.119,00	11.235.905.083,00
10. Kab. Deli Serdang	213.441.697.056,00	118.862.946.591,00	94.578.750.465,00
11. Kab. Serdang Bedagai	63.708.689.954,00	53.513.646.051,00	10.195.043.903,00
12. Kab. Karo	60.487.606.996,00	32.638.812.826,00	27.848.794.170,00
13. Kab. Labuhan Batu	62.711.663.560,00	49.717.023.753,00	12.994.639.807,00
14. Kab. Langkat	97.960.279.271,00	59.134.907.698,00	38.825.371.573,00
15. Kab. Mandailing Natal	57.714.808.735,00	36.039.435.260,00	21.675.373.475,00
16. Kab. Nias	20.597.996.633,00	15.108.944.548,00	5.489.052.085,00
17. Kab. Simalungun	94.459.000.324,00	51.384.967.527,00	43.074.032.797,00
18. Kab. Tapanuli Tengah	44.419.874.281,00	27.548.826.006,00	16.871.048.275,00
19. Kab. Tapanuli Selatan	44.918.076.185,00	36.108.854.228,00	8.809.221.957,00
20. Kab. Tapanuli Utara	42.313.268.535,00	33.956.902.978,00	8.356.365.557,00
21. Kab. Humbang Hasundutai	31.513.657.636,00	19.871.385.891,00	11.642.271.745,00
22. Kab. Toba Samosir	39.131.778.643,00	23.029.382.018,00	16.102.396.625,00
23. Kab. Samosir	23.411.547.767,00	16.132.679.985,00	7.278.867.782,00
24. Kota Padangsidempuan	34.294.276.687,00	22.387.806.241,00	11.906.470.446,00
25. Kab. Padang Lawas	39.648.268.107,00	31.565.028.632,00	8.083.239.475,00
26. Kab. Padang Lawas Utara	37.153.758.906,00	30.481.611.572,00	6.672.147.334,00
27. Kab. Pakpak Bharat	14.441.171.070,00	10.351.042.625,00	4.090.128.445,00
28. Kab. Nias Selatan	39.940.862.605,00	24.928.681.825,00	15.012.180.780,00
29. Kab. Labuhanbatu Utara	45.720.745.279,00	31.860.420.521,00	13.860.324.758,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

30. Kab. Labuhanbatu Selatan	47.850.487.465,00	33.096.212.121,00	14.754.275.344,00
31. Kab. Nias Utara	20.952.510.818,00	15.213.349.591,00	5.739.161.227,00
32. Kab. Nias Barat	16.136.727.607,00	11.855.154.688,00	4.281.572.919,00
33. Kota Gunungsitoli	23.300.476.464,00	17.275.466.174,00	6.025.010.290,00
Total	2.275.776.334.263,00	1.318.567.730.317,00	957.208.603.946,00

Utang beban transfer sebesar Rp957.208.603.946,00 tersebut telah dilunasi pada tahun 2021 sebelum Laporan Keuangan ini diterbitkan. Rincian pelunasan pada Lampiran 22.

4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp62.412.183.624,00	Rp55.907.266.276,30

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp62.412.183.624,00 dan Rp55.907.266.276,30 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang telah diuraikan di atas, dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.	Rumah Sakit Umum Haji Medan	738.930.433,00	10.608.548.435,00
b.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	6.207.078.342,00	6.207.078.342,00
c.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	0,00	259.816.128,30
d.	Biro Umum dan Perlengkapan - Sekretariat Daerah	532.497.260,00	532.497.260,00
e.	SKPKD	54.933.677.589,00	37.010.986.823,00
f.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0,00	1.288.339.288,00
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	62.412.183.624,00	55.907.266.276,30

a. Rumah Sakit Umum Haji Medan

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp738.930.433,00 merupakan uang muka pasien yang ada di Kas BLUD.

b. Dinas Bina Marga

Utang kontrak tahun jamak sebesar Rp6.207.078.342,00 merupakan nilai sisa kontrak dari proyek tahun jamak tahun 2007 s.d 2009 pada Dinas Bina Marga yang telah selesai dikerjakan, dengan uraian sebagai berikut:

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Binjai-Timbang Lawang di Kabupaten Langkat, kontrak Nomor 602/KPA-MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai kontrak induk Rp46.659.161.000,00. Sisa Kontrak yang belum dibayar sebesar Rp522.695.933,00.
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan di Kabupaten Samosir, kontrak Nomor 602/KPA-MY.PJ/147/2007 tanggal 5 Desember 2007



dengan nilai kontrak induk Rp44.092.376.692,00. Sisa kontrak yang belum dibayar sebesar Rp5.684.382.409,00

- c. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Utang atas pekerjaan belum selesai tahun 2019 sebesar Rp259.816.128,30 telah diselesaikan sehingga pada tahun 2020 bersaldo Rp0,00.
- d. Biro Umum dan Perlengkapan
Utang jangka pendek lainnya pada Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp532.497.260,00 terdiri dari:
- i. Koreksi BPK tahun 2018 atas penambahan utang jangka pendek lainnya yang merupakan pekerjaan pengadaan lift Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2016 yang sudah selesai tahun 2017 dan sudah digunakan per 31 Desember 2018 tetapi belum selesai dibayar sebesar Rp218.000.000,00
 - ii. Pekerjaan penataan kolam, taman dan tempat parkir Rumah Dinas Jabatan Jl. Sudirman no. 41 Medan. Sesuai kontrak nomor 027/02/57.02/SP/WAT/2018 sebesar Rp4.470.490.000,00 sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp3.801.704.696,00 belum terbayar Rp314.497.260,00
- e. SKPKD
Saldo utang Jangka Pendek lainnya SKPKD per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp49.820.144.502,00 dan Rp37.010.986.823,00 merupakan utang SKPKD yang terdiri atas (dalam Rupiah):

Utang SKPKD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
i. Utang dana BOS	42.149.844.872,00	30.818.180.181,00
ii. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan	12.783.832.717,00	6.192.806.642,00
<i>Jumlah</i>	<i>54.933.677.589,00</i>	<i>37.010.986.823,00</i>

i. Utang Dana Bos

Utang dana BOS per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp42.149.844.872,00 dan Rp30.818.180.181,00 merupakan sisa dana BOS pada Rekening Kas BUD yang belum disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.



Utang Dana Bos per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.149.844.872,00 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Saldo Awal Dana Bos TA. 2020:	30.818.180.181,00
- Dana BOS Reguler	30.732.485.181,00
- Dana BOS Afirmasi	1.000.000,00
- Dana BOS Kinerja	84.695.000,00
Pengembalian Dana Bos TA. 2020	11.331.664.691,00
<i>Sisa Dana Bos TA. 2020</i>	<i>42.149.844.872,00</i>

ii. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan sebesar Rp12.783.832.717,00 (Rincian lihat lampiran 9) merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 6/PK/2020 tanggal 29 September 2020 rincian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

1. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29	3.865.088.602,00
2. DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	2.050.035.868,00
<i>Total Lebih Salur DBH Pajak</i>	<i>5.915.124.470,00</i>
3. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	5.664.897.805,00
4. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	53.101.543,00
5. DBH Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi	1.104.625.500,00
6. DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	46.083.399,00
<i>Total Lebih Salur DBH SDA</i>	<i>6.868.708.247,00</i>
<i>Total Lebih Salur</i>	<i>12.783.832.717,00</i>

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan dimaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp536.058.148.881,00 dan Rp0,00.

4.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya sebesar Rp536.058.148.881,00 merupakan syarat formal pengajuan banding yang pernah disetor oleh PT. Inalum atas sengketa pajak Masa Pajak November 2013-Maret 2016 dengan rincian di bawah ini. Pencatatan ini menyesuaikan koreksi dari BPK RI. Sedangkan pelaksanaannya menunggu perintah eksekusi Pengadilan Pajak Jakarta. Hal ini sesuai dengan:

1. Pasal 195 Ayat (1) HIR Kewenangan Eksekusi ada pada Pengadilan Pajak Jakarta.



2. Pasal 196 HIR/207 RBG:

Ayat (1) Pemohon eksekusi (pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan agar Putusan dilaksanakan.

Ayat (2) Atas dasar Permohonan, pihak yang kalah akan dilakukan *Aanmaning* agar dilaksanakan putusan.

No	SKPD		Pembayaran Inalum	
	Masa Pajak	Nilai	Kewajiban Sidang 50%	Tanggal Diterima Kasda
1	November 2013	43.848.079.332	19.474.895.740	14 Desember 2015
2	Desember 2013	43.161.203.188	18.975.980.224	14 Desember 2015
3	Januari 2014	43.143.653.966	18.932.541.154	14 Desember 2015
4	Februari 2014	40.812.435.530	17.962.864.506	14 Desember 2015
5	Maret 2014	45.285.505.088	19.926.946.903	14 Desember 2015
6	April 2014	42.620.644.386	18.667.967.559	14 Desember 2015
7	Mei 2014	43.899.861.894	19.209.732.253	14 Desember 2015
8	Juni 2014	42.771.900.498	18.745.885.081	14 Desember 2015
9	Juli 2014	45.112.380.752	19.823.344.602	14 Desember 2015
10	Agustus 2014	44.365.824.954	19.462.966.916	14 Desember 2015
11	September 2014	42.641.609.822	18.691.301.612	14 Desember 2015
12	Oktober 2014	43.288.819.430	18.920.859.370	14 Desember 2015
13	November 2014	41.553.937.760	18.130.184.410	14 Desember 2015
14	Desember 2014	41.247.049.784	17.936.800.507	14 Desember 2015
15	Januari 2015	38.835.798.224	16.872.159.862	14 Desember 2015
16	Februari 2015	36.768.549.630	16.100.589.315	14 Desember 2015
17	Maret 2015	42.418.973.470	18.629.304.687	14 Desember 2015
18	April 2015	40.880.437.966	17.888.623.988	14 Desember 2015
19	Mei 2015	40.413.138.484	17.554.327.269	25 Januari 2016
20	Juni 2015	40.718.704.624	17.788.102.420	25 Januari 2016
21	Juli 2015	43.474.588.010	19.075.439.755	06 Juni 2016
22	Agustus 2015	43.291.518.988	18.968.102.459	06 Juni 2016
23	September 2015	41.445.999.772	18.135.498.851	06 Juni 2016
24	Oktober 2015	43.348.270.210	18.991.139.881	24 Juni 2016
25	November 2015	39.987.569.302	17.399.311.832	19 Juli 2016
26	Desember 2015	42.053.916.262	18.333.314.096	07 September 2016
27	Januari 2016	43.082.753.988	18.828.677.761	21 September 2016
28	Februari 2016	39.883.683.032	17.417.078.843	02 November 2016
29	Maret 2016	43.819.095.796	19.214.207.025	05 Januari 2017
<i>Jumlah</i>			<i>536.058.148.881</i>	



Rekap Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Jumlah Masa Pajak	Jumlah SKPD	Pembayaran Saat Keberatan	Pembayaran Saat Banding	Jumlah Pembayaran
1	Nop 2013 - Nop 2015	25 MP	1.055.336.455.050	65.403.356.376	462.264.871.156	527.668.227.532
2	Des 2015 - Mar 2016	4 MP	168.839.449.077	10.626.446.814	73.793.277.725	84.419.724.539
	Jumlah	29 MP	1.224.175.904.127	76.029.803.190	536.058.148.881	612.087.952.071

Dapat kami jelaskan bahwa putusan PK MA di dalam amar putusannya tidak terdapat perintah yang tegas kepada PemprovSU untuk membayar bunga kepada PT Inalum, dalam hal ini putusan MA sifatnya *Deklaratoir* (hanya menyatakan). Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka pihak yang menang yaitu PT Inalum harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Pajak Jakarta agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Atas dasar permohonan dimaksud, terhadap pihak yang kalah akan dilakukan *Aanmaning* (peringatan) agar dilaksanakan putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 195 Ayat (1) HIR Kewenangan Eksekusi ada pada Pengadilan Pajak Jakarta. Oleh karena itu terhadap bunga PAP PT Inalum belum dapat disajikan dalam laporan keuangan.

4.3.3 Ekuitas 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp16.130.504.414.781,72 **Rp18.134.943.216.807,23**
Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp16.130.504.414.781,72 dan Rp18.134.943.216.807,23 dengan uraian sebagai berikut:

	<u>Per 31 Desember 2020</u>	<u>Per 31 Desember 2019</u>
Ekuitas Awal	18.134.943.216.807,23	18.387.497.135.274,47
Penyesuaian		
- Surplus/Defisit LO	(317.143.898.316,36)	355.676.348.486,92
- Koreksi Ekuitas lainnya	(1.687.294.903.709,15)	(608.230.266.954,16)
<i>Ekuitas Akhir</i>	<u>16.130.504.414.781,72</u>	<u>18.134.943.216.807,23</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2020. Saldo Ekuitas akhir merupakan perhitungan dari ekuitas awal dikurangi Defisit LO ditambah koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan Ekuitas Akhir TA 2020 dengan TA 2019 terjadi penurunan sebesar Rp2.004.438.802.025,51 atau 11,05%.



4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4.4.1. Pendapatan – LO **TA 2020** Rp12.954.190.302.571,69 **TA 2019** Rp12.300.114.791.244,14

Pendapatan - LO merupakan jumlah pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan koreksi.

Pendapatan – LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp12.954.190.302.571,69 dan Rp12.300.114.791.244,14. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat kenaikan sebesar Rp654.075.511.327,60 atau 5,32% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Realisasi Pendapatan – LO TA 2020 dan TA 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	5.474.794.454.758,18	6.557.828.472.994,14	(1.083.034.018.235,96)	(16,52%)
Pendapatan Transfer – LO	7.386.823.300.126,00	5.691.899.955.809,00	1.694.923.344.317,00	29,78%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	92.572.547.687,51	50.386.362.441,00	42.186.185.246,51	83,73%
Jumlah	12.954.190.302.571,69	12.300.114.791.244,14	654.075.511.327,60	5,32%

4.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO **TA 2020** Rp5.474.794.454.758,18 **TA 2019** Rp6.557.828.472.994,14

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp5.474.794.454.758,18. Terdapat penurunan sebesar (1.083.034.018.235,96) atau 16,52% jika dibandingkan dengan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2020	Pendapatan - LO 2019
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	5.071.597.922.390,00	584.819.578.124,79	616.788.682.556,00	5.039.628.817.958,79	5.638.206.309.684,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	30.218.319.711,00	2.228.566.600,00	4.470.080.700,00	27.976.805.611,00	36.865.850.190,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	242.309.156.856,78	75.513.176.782,51	82.187.275.236,11	235.635.058.403,18	661.701.114.985,34
Lain-lain PAD	187.111.979.817,21	10.883.569.200,00	26.441.776.232,00	171.553.772.785,21	221.055.198.134,80



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2020	Pendapatan - LO 2019
		Penambahan	Pengurangan		
Yang Sah – LO					
Jumlah	5.531.237.378.774,99	673.444.890.707,30	729.887.814.724,11	5.474.794.454.758,18	6.557.828.472.994,14

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO	Rp5.039.628.817.958,79	Rp5.638.206.309.684,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp5.039.628.817.958,79. Terdapat penurunan sebesar (Rp. 598.577.491.725,21) atau 10,62% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari realisasi pendapatan pajak – LRA ditambah dengan piutang pajak tahun 2020 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2020	Pendapatan - LO 2019
		Penambahan	Pengurangan		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	2.129.303.940.098,00	0,00	0,00	2.129.303.940.098,00	1.995.480.813.304,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	1.000.119.789.912,00	0,00	0,00	1.000.119.789.912,00	1.315.420.245.168,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	812.843.402.651,00	81.055.733.610,79	85.847.939.239,00	808.051.197.022,79	889.351.191.466,00
Pajak Air Permukaan – LO	68.595.314.040,00	503.763.844.514,00	530.940.743.317,00	41.418.415.237,00	642.790.751.853,00
Pajak Rokok – LO	1.060.735.475.689,00	0,00	0,00	1.060.735.475.689,00	795.163.307.893,00
Jumlah	5.071.597.922.390,00	584.819.578.124,79	616.788.682.556,00	5.039.628.817.958,79	5.638.206.309.684,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) – LO

Nilai pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor – LO tahun anggaran 2020 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2020 ditambah dengan piutang pajak kendaraan bermotor tahun berjalan sebesar Rp81.055.733.610,79 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp85.847.939.239,00.

2. Pajak Air Permukaan – LO



Nilai pendapatan pajak air permukaan – LO tahun anggaran 2020 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2020 ditambah dengan piutang pajak air permukaan tahun berjalan sebesar Rp503.763.844.514,00 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp530.940.743.317,00. Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Rp27.976.805.611,00	Rp36.865.850.190,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp27.976.805.611,00. Terdapat penurunan sebesar Rp8.889.044.579,00 atau 24,11% jika dibandingkan dengan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2020	Pendapatan - LO 2019
		Penambahan	Pengurangan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	14.660.559.117,00	1.840.099.500,00	3.993.063.700,00	12.507.594.917,00	20.421.207.254,00
Retribusi Pemakaian Alat Berat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.124.450,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	249.012.500,00	0,00	0,00	249.012.500,00	303.282.500,00
Retribusi Retribusi Pengujian Mutu Barang - LO	638.135.000,00	0,00	0,00	638.135.000,00	443.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.690.759.194,00	388.467.100,00	477.017.000,00	4.602.209.294,00	5.569.773.435,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa – LO	1.609.320.000,00	0,00	0,00	1.609.320.000,00	2.379.605.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	479.655.250,00	0,00	0,00	479.665.250,00	159.065.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.989.150.320,00	0,00	0,00	2.989.150.320,00	2.705.185.522,00
Retribusi Izin Trayek - LO	254.510.000,00	0,00	0,00	254.510.000,00	322.940.000,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	2.646.450.630,00	0,00	0,00	2.646.450.630,00	2.151.613.102,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.572.627,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	2.000.757.700,00	0,00	0,00	2.000.757.700,00	1.761.481.300,00
Jumlah	30.218.319.711,00	2.228.566.600,00	4.470.080.700,00	27.976.805.611,00	36.865.850.190,00

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan retribusi – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang



retribusi tahun berjalan, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan pendapatan diterima di muka tahun berjalan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

Nilai retribusi pelayanan kesehatan – LO sebesar Rp12.507.594.917,00 diperoleh dari nilai retribusi pelayanan kesehatan – LRA sebesar Rp14.660.559.117,00 ditambah piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2020 sebesar Rp1.840.099.500,00 dan dikurangi pelunasan piutang tahun 2020 sebesar Rp3.993.063.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA TA. 2020	14.660.559.117,00
<u>Mutasi Tambah:</u>	
Piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2020:	
Dinas Kesehatan	384.005.100,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	1.456.094.400,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.840.099.500,00
<u>Mutasi Kurang:</u>	
Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2020:	
Dinas Kesehatan	989.496.700,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	3.003.567.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	3.993.063.700,00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO TA 2020	12.507.594.917,00

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

Nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO sebesar Rp4.602.209.294,00 diperoleh dari nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LRA sebesar Rp4.690.759.194,00 ditambah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 pada UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp156.824.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp231.643.100,00 dikurangi pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp391.757.000,00 dan pelunasan pendapatan diterima dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp85.260.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA TA. 2020	4.690.759.194,00
<u>Mutasi Tambah:</u>	
Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020:	
Dinas Lingkungan Hidup	156.824.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	231.643.100,00
Jumlah Mutasi Tambah	388.467.100,00
<u>Mutasi Kurang:</u>	
Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2020:	
Dinas Lingkungan Hidup	391.757.000,00



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85.260.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	477.017.000,00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO TA 2020	4.602.209.294,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.

	TA 2020	TA 2019
4.4.1.1.3. Pendapatan Hasil	Rp235.635.058.403,18	Rp661.701.114.985,34
Pengelolaan Kekayaan		
Daerah Yang		
Dipisahkan – LO		

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp235.635.058.403,18. Terdapat penurunan sebesar Rp.426.066.056.582,16 atau 64,39% dibandingkan dengan tahun 2019. Rincian pendapatan ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 60 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO Tahun 2020
(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2020	Pendapatan - LO 2019
		Penambahan	Pengurangan		
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD – LO:	237.617.983.349,00	70.537.075.377,01	77.563.818.554,33	230.591.240.171,68	638.416.355.519,34
PT. Perkebunan Sumatera Utara	0,00	0,00	14.870.213.304,14	(14.870.213.304,14)	21.226.423.387,87
PT. Bank Sumut	188.037.661.330,00	60.860.739.948,13	61.931.095.998,19	186.967.305.279,94	538.572.389.947,33
PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	0,00	0,00	762.509.252,00	(762.509.252,00)	247.779.540,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	1.118.597.653,00	3.266.636.167,88	0,00	4.385.233.820,88	7.169.422.262,14
PDAM Tirtanadi	48.461.724.366,00	6.409.699.261,00	0,00	54.871.423.627,00	71.200.340.382,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN – LO:	4.691.173.506,78	4.967.101.405,50	4.623.456.681,78	5.043.818.231,50	23.284.759.466,00
PT. Kawasan Industri Medan	4.623.456.681,78	4.976.101.405,50	4.623.456.681,78	4.976.101.405,50	23.115.163.785,00
PT. Asuransi Bangun Askrida	67.716.826,00	0,00	0,00	67.716.826,00	169.595.681,00
Jumlah	242.309.156.856,78	75.513.178.782,51	82.187.275.236,11	235.635.058.403,18	661.701.114.985,34



Nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO disajikan sebesar nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari penyesuaian atas nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada BUMD/BUMN sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos neraca atas investasi jangka panjang permanen.

	TA 2020	TA 2019
4.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah – LO	Rp171.553.772.785,21	Rp221.055.198.134,80

Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp171.553.772.785,21. Terdapat penurunan sebesar Rp49.501.425.349,59 atau 22,39% jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61 Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2020	Pendapatan - LO 2019
		Penambahan	Pengurangan		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	636.457.676,00	0,00	0,00	636.457.676,00	86.190.000,00
Penerimaan Jasa Giro – LO	22.202.305.234,00	0,00	0,00	22.202.305.234,00	33.154.847.351,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	503.299.375,00	0,00	0,00	503.299.375,00	2.269.050.882,82
Pendapatan Denda Pajak – LO	60.004.552.237,00	0,00	0,00	60.004.552.237,00	70.314.829.731,00
Pendapatan Dari Pengembalian - LO	53.919.401.008,21	0,00	11.331.664.691,00	42.587.736.317,21	50.131.532.629,49
Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan – LO	324.212.350,00	0,00	297.570.589,00	26.641.761,00	83.358.150,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	249.451.947,49
Pendapatan BLUD – LO	49.521.751.907,00	10.883.569.200,00	14.812.540.952,00	45.592.780.155,00	61.715.412.443,00
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.525.000,00
Jumlah	187.111.979.817,21	10.883.569.200,00	26.441.776.232,00	171.553.772.785,21	221.055.198.134,80

Nilai lain-lain PAD yang sah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan realisasi pendapatan diterima di muka tahun sebelumnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun



sebelumnya, pendapatan diterima di muka tahun berjalan dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Pengembalian – LO
Mutasi pengurang sebesar Rp11.331.664.691,00 merupakan pengembalian dana bos tahun 2020 dari Dinas Pendidikan.
2. Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO
Mutasi pengurang sebesar Rp297.570.589,00 merupakan pelunasan atas angsuran penjualan tanah ex-Dinas Perkebunan sebesar Rp102.014.000,00, pelunasan angsuran penjualan tanah ex-Dinas Perkebunan sebesar Rp164.719.300,00 dan pelunasan piutang TGR selama tahun 2020 sebesar Rp30.837.289,00.
3. Pendapatan BLUD – LO
Mutasi tambah sebesar Rp10.883.569.200,00 terdiri dari piutang dana talangan BSM 2019 yang dibayar tunai tahun 2020 pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp9.868.5263.400,00, uang muka perawatan tahun 2020 sebesar Rp740.025.035,00 pada Rumah Sakit Haji Medan, serta pelunasan piutang Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp275.020.765,00.
Sedangkan mutasi pengurang sebesar Rp14.812.540.952,00 terdiri dari pelunasan piutang pendapatan lainnya pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp14.073.610.519,00 dan uang muka perawatan tahun 2020 sebesar Rp738.930.433,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.

	TA 2020	TA 2019
4.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO	Rp7.386.823.300.126,00	Rp5.691.899.955.809,00

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp7.386.823.300.126,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.694.923.344.317,00 atau 29,78% jika dibandingkan dengan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2020	Pendapatan - LO 2019
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	7.347.748.112.410,00	68.548.109.081,00	29.472.921.365,00	7.386.823.300.126,00	5.691.899.955.809,00
Bagi Hasil Pajak – LO	426.453.173.226,00	68.213.420.387,00	10.791.176.657,00	483.875.416.956,00	407.907.035.307,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO	42.230.415.196,00	334.688.694,00	18.681.744.708,00	23.883.359.182,00	62.351.858.903,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2020	Pendapatan - LO 2019
		Penambahan	Pengurangan		
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	2.474.465.343.000,00	0,00	0,00	2.474.465.343.000,00	2.713.750.553.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	4.404.599.180.988,00	0,00	0,00	4.404.599.180.988,00	2.507.890.508.599,00
Jumlah	7.347.748.112.410,00	68.548.109.081,00	29.472.921.365,00	7.386.823.300.126,00	5.691.899.955.809,00

Nilai pendapatan transfer – LO disajikan sebesar nilai pendapatan transfer – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan koreksi tambah lainnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak – LO

Mutasi tambah sebesar Rp68.213.420.387,00 merupakan piutang kurang bayar bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp68.006.059.152,00 dan piutang kurang bayar bagi hasil pajak cukai hasil tembakau sebesar Rp207.361.235,00, sedangkan mutasi pengurangan sebesar Rp10.791.176.657,00 merupakan pelunasan piutang bagi hasil pajak 2019 berdasarkan PMK Nomor 180/PMK.07/2019 melalui PMK Nomor 20/PMK.07/2020 yang terdiri dari bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sebesar Rp9.407.731.492,00, bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan PPh 21 sebesar Rp1.179.543.268,00, bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp203.901.897,00 dengan rincian sebagai berikut :

Bagi Hasil Pajak - LRA TA. 2020	426.453.173.226,00
<u>Mutasi Tambah:</u>	
Piutang Kurang Bayar Bagi Hasil tahun 2020:	
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	68.006.059.152,00
Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	207.361.235,00
Jumlah Mutasi Tambah	68.213.420.387,00
<u>Mutasi Kurang:</u>	
Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2020 :	
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	9.407.731.492,00
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1.179.543.268,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	203.901.897,00
Jumlah Mutasi Kurang	10.791.176.657,00
Bagi Hasil Pajak - LO TA 2020	483.875.416.956,00

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO

Mutasi tambah sebesar Rp334.688.694,00 merupakan piutang kurang bayar bagi hasil SDA kehutanan sebesar Rp300.081.944,00 dan piutang bagi hasil SDA Panas Bumi sebesar Rp34.606.750,00, sedangkan mutasi pengurangan sebesar Rp18.681.744.708,00 merupakan hutang lebih bayar bagi hasil-pajak 2020 PERDIRJEN NO. 6/PK/2020 yang terdiri dari hutang lebih bayar bagi hasil SDA



Gas Bumi sebesar Rp1.104.625.500,00, hutang lebih bayar bagi hasil SDA kehutanan sebesar Rp5.448.897.805,00, hutang lebih bayar bagi hasil SDA Panas Bumi sebesar Rp37.502.770,00 dan pelunasan piutang bagi hasil pajak 2019 berdasarkan PMK Nomor 180/PMK.07/2019 melalui PMK Nomor 20/PMK.07/2020 yang terdiri dari pelunasan piutang bagi hasil SDA Gas Bumi sebesar Rp1.676.004.543,00, pelunasan piutang bagi hasil SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp9.060.125.499,00, pelunasan piutang bagi hasil SDA Kehutanan sebesar Rp1.354.588.591,00 dengan rincian sebagai berikut :

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LRA TA. 2020	42.230.415.196,00
<u>Mutasi Tambah:</u>	
Piutang Kurang Bayar Bagi Hasil tahun 2020:	
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	300.081.944,00
Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	34.606.750,00
Jumlah Mutasi Tambah	334.688.694,00
<u>Mutasi Kurang:</u>	
Hutang Lebih Bayar Bagi Hasil Pajak tahun 2020 :	
Bagi Hasil SDA Gas Bumi	1.104.625.500,00
Bagi Hasil SDA Gas Kehutanan	5.448.897.805,00
Bagi Hasil SDA Gas Panas Bumi	37.502.770,00
Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2020 :	
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	1.676.004.543,00
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi	9.060.125.499,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.354.588.591,00
Jumlah Mutasi Kurang	18.681.744.708,00
Bagi Hasil Pajak - LO TA 2020	23.883.359.182,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 23.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LO	Rp92.572.547.687,51	Rp50.386.362.441,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp92.572.547.687,51. Terdapat kenaikan sebesar 42.186.185.246,51 atau 83,73% jika dibandingkan dengan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2020	Pendapatan - LO 2019
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Hibah – LO	27.501.580.306,00	695.363.346.351,38	640.165.057.969,87	82.699.868.687,51	50.386.362.441,00
Dana Insentif Daerah	9.872.679.000,00	0,00	0,00	9.872.679.000,00	0,00
Jumlah	37.374.259.306,00	695.363.346.351,38	640.165.057.969,87	92.572.547.687,51	50.386.362.441,00



Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengelola pendapatan hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Instansi/Lembaga maupun dari Masyarakat.

Saldo pendapatan LO Tahun 2020 dari pos pendapatan hibah terealisasi sebesar Rp82.699.868.687,51 terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp72.795.523.071,00 yang dialokasikan kepada OPD yaitu :
 - 1.1. Dinas Kesehatan sebesar Rp50.732.562.871,00. Jumlah ini merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan berupa obat-obatan.
 - 1.2. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp57.348.000,00. Jumlah ini merupakan hibah dari :
 - 1.2.1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sesuai BAST No.176/PL.130/BMN/B/12/2019, tanggal 18 Desember 2019 berupa laptop.
 - 1.2.2. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian pertanian sesuai BAST No: B-19897.01/PL.030/I.1/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 berupa laptop.
 - 1.3. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp18.953.199.351,00. Jumlah ini merupakan hibah dari Bank Dunia untuk program ITDMIT.
 - 1.4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.285.776.800,00. Jumlah ini merupakan hibah dari BAWASLU berdasarkan BAST Nomor: 028/9618/2020 dan Nomor 0036/Bawaslu-Prov.SU/Set/PL.08XI/2020 Tanggal 18 Desember 2020 berupa rehab/ renovasi dan pembuatan Gedung/ bangunan/halaman serta instalasi listrik.
 - 1.5. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.766.636.049,00. Jumlah ini merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan ke sekolah-sekolah yang belum dicatatkan ke aplikasi, sesuai temuan LHP BPK RI TA.2019 berupa alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar serta komputer.
2. Saldo Pendapatan Hibah LO dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.123.564.661,51 yang dikelola oleh :
 - 2.1. Dinas Pendidikan sebesar Rp867.360.000,00 merupakan pendapatan hibah Tanah berdasarkan BAST Berupa Tanah Pada Pemerintah Kab. Toba, Nomor : 900/5469/BPKAD/2020 Tanggal 07 Agustus 2020 yaitu Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan, DESA LUMBAN PAE KEC. BALIGE KAB. TOBA, Luas 18.070 m2.
 - 2.2. Dinas Perhubungan sebesar Rp166.014.000,00, merupakan pendapatan hibah Gedung dan Bangunan tahun 2020 sesuai dengan BAST Aset Kios di Terminal Kabanjahe dari Pemerintah Kabupaten Karo kepada Pemprovsu



Nomor : 900/0372/BPKPAD/2020 dan Nomor : 028/1257/2020 Tanggal 10 Februari 2020.

- 2.3. Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp28.420.000,00 merupakan Hibah dari Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 028/677/KPTS/2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar Barang Pengguna Barang Sekdakab Tapsel TA 2020 Tanggal 7 Desember 2020 berupa tanah bangunan kantor pemerintah.
 - 2.4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp61.770.661,51. Merupakan hibah Tanah dari Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah sesuai dengan SK No. 593/5468 Tanggal 21 Juli 2020 berupa tanah bangunan terminal darat.
3. Saldo Pendapatan Hibah LO dari Instansi/ Lembaga PT. Jasa Raharja (Persero) yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp5.568.000.000,00 merupakan pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara.
 4. Saldo Pendapatan Hibah LO partisipasi pihak ketiga yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp232.400.000,00 dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.980.380.955,00.

Komponen penambah nilai realisasi pendapatan hibah ini berasal dari hibah aset dari Kementerian maupun kabupaten/ kota lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Penambahan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2020

(dalam Rupiah)

OPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH			
Dinas Kesehatan	Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa obat-obatan	Obat cair	76.318.800,00
		Obat-Obatan Lainnya	50.656.244.071,00
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Hibah dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sesuai BAST No.176/PL.130/BMN/B/12/2019, tanggal 18 Desember 2019	2 Unit Laptop (@Rp. 14.895.000,00)	29.790.000,00
	Hibah dari Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian pertanian sesuai BAST No: B-19897.01/PL.030/l.1/12/2019 tanggal 19 Desember 2019	3 Unit Laptop (@Rp. 9.186.000,00)	27.558.000,00
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Hibah ini merupakan hibah dari Bank Dunia untuk Program ITDMIT		18.953199.351,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Hibah dari BAWASLU Berdasarkan BAST Nomor: 028/9618/2020 dan Nomor 0036/Bawaslu- Prov.SU/Set/PL.08XI/2020 Tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 1.285.776.800,-	Rehab Gedung Sekretariat, Gedung Rpat dan Ruang Media Center	199.634.000,00
		Renovasi Ruang Arsip dan Ruang Gakkumdu	199.739.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

		Penataan Halaman, Pagar dan Pengecatan	199.745.000,00
		Instalasi Listrik dan Penambahan Daya	185.346.000,00
		Renovasi Ruang Sidang	137.951.000,00
		Pembuatan Partisi Ruang Kerja	129.982.500,00
		Renovasi Halaman Kantor/Pembuatan Taman	99.380.000,00
		Pembuatan Mushola Kantor	133.999.300,00
Dinas Pendidikan	Hibah dari Kementerian Pendidikan ke Sekolah-sekolah yang belum dicatatkan ke Aplikasi, sesuai temuan LHP BPK RI TA.2019	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.550.000,00
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	10.650.000,00
		Komputer	1.750.436.049,00
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA			
Dinas Pendidikan	Pendapatan Hibah (+) pada Tanah berdasarkan BAST Berupa Tanah Pada Pemerintah Kab. Toba, Nomor : 900/5469/BPKAD/2020 Tanggal 07 Agustus 2020	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan, DESA LUMBAN PAE KEC. BALIGE KAB. TOBA, Luas 18.070 m ²	867.360.000,00
Dinas Perhubungan	Pendapatan hibah pada Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp. 166.014.000,- sesuai dengan BAST Aset Kios di Terminal Kabanjahe dari Pemerintah Kabupaten Karo Kepada Pemprov Nomor : 900/0372/BPKPAD/2020 dan Nomor : 028/1257/2020 Tanggal 10 Februari 2020	Kios di Terminal Kabanjahe	166.014.000,00
Biro Umum dan Perlengkapan	Hibah dari Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 028/677/KPTS/2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar Barang Pengguna Barang Sekdakab Tapsel TA 2020 Tanggal 7 Desember 2020.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	28.420.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Hibah Tanah dari Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah sesuai dengan SK No. 593/5468 Tanggal 21 Juli 2020	Tanah Bangunan Terminal Darat	61.770.661,51
PENDAPATAN HIBAH DARI INTANSI/LEMBAGA LAINNYA			
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Hibah dari PT. Jasa Raharja (Persero)		5.568.000.000,00
PENDAPATAN HIBAH DARI PARTISIPASI PIHAK KETIGA			
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan Hibah LO partisipasi pihak ketiga yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit Mobil Ambulance (BK 1749 J)	232.400.000,00
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Pendapatan Hibah LO partisipasi pihak ketiga yang dikelola Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah		2.980.380.955,00
TOTAL NILAI PENAMBAHAN PENDAPATAN HIBAH 2020			82.699.868.687,51



Berdasarkan table diatas, Pendanaan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam bentuk persediaan dan aset tetap sebagai berikut :

A. Persediaan	50.732.562.871,0
Obat-obatan dari Kementerian Kesehatan untuk Dinas Kesehatan	
B. Aset Tetap	
1 unit mobil ambulans (BK 1749 J) dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	232.400.000,00
Total	50.964.962.871,00

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.4.2. Beban Daerah	Rp13.262.457.647.254,06	Rp11.923.139.267.046,22

Jumlah Beban Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp13.262.457.647.254,06. Realisasi beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.339.318.380.207,86 atau 11,23% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Realisasi Beban Daerah Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	12.535.907.993.281,06	9.735.053.673.996,05	2.800.854.319.285,19	28,77
Beban Transfer	2.263.177.234.239,00	2.188.085.593.050,17	75.091.641.188,83	3,43
Jumlah	13.262.457.647.254,06	11.923.139.267.046,22	1.339.318.380.207,86	11,23

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.4.2.1 Beban Operasi	Rp12.535.907.993.281,06	Rp9.735.053.673.996,05

Beban Operasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp12.535.907.993.281,06. Nilai realisasi beban operasi dicatat sebesar nilai belanja operasi yang disesuaikan dengan utang tahun 2019 dan tahun 2020, beban dibayar di muka, koreksi lebih/kurang catat tahun 2020, koreksi nilai aset serta kapitalisasi belanja barang dan jasa ke aset tetap tahun 2020. Realisasi beban operasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.800.854.319.285,19 atau 28,77% jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66 Realisasi Beban Operasi Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	3.364.061.487.288,00	3.527.798.632.319,00	(163.737.145.031,00)	(4,64)
Beban Persediaan	1.139.372.295.509,78	462.846.690.917,05	676.525.604.592,73	146,17
Beban Jasa	1.272.533.723.524,26	1.232.073.797.095,70	40.459.926.428,56	3,28



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan	107.829.982.590,60	164.364.293.022,35	(56.534.310.431,75)	(34,40)
Beban Perjalanan Dinas	295.303.833.158,00	475.081.329.063,00	(179.777.495.905,00)	(37,84)
Beban Hibah	3.066.759.068.400,00	1.229.654.153.181,00	1.837.104.915.219,00	149,40
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.624.884.864.222,22	1.296.024.588.020,45	328.860.276.201,77	25,37
Beban Penyisihan Piutang	24.133.902.327,67	1.243.720.577.609,08	(1.219.586.675.281,41)	(98,06)
Beban Lain-lain	104.401.255.994,53	103.489.612.768,42	911.643.226,11	0,88
Jumlah	12.535.907.993.281,06	9.735.053.673.996,05	2.800.854.319.285,19	28,77

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO	Rp3.364.061.487.288,00	Rp3.527.798.632.319,00

Jumlah Beban Pegawai Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.364.061.487.288,00. Realisasi beban pegawai ini mengalami penurunan sebesar Rp163.737.145.031,00 atau 4.64% jika dibandingkan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan	2.470.673.040.186,00	2.530.567.978.620,00	(59.894.938.434,00)	(2,37)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	745.181.990.113,00	790.281.124.528,00	(45.099.134.415,00)	(5,71)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	32.964.155.158,00	34.314.000.000,00	(1.349.844.842,00)	(3,93)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	8.310.030.969,00	87.499.789.372,00	(79.189.758.403,00)	(90,50)
Beban Honorarium PNS	81.283.552.970,00	69.901.886.718,00	11.381.666.252,00	16,28
Beban Honorarium Non PNS	25.368.067.892,00	14.443.553.081,00	10.924.514.811,00	75,64
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	280.650.000,00	790.300.000,00	(509.650.000,00)	(64,49)
Jumlah	3.364.061.487.288,00	3.527.798.632.319,00	(163.737.145.031,00)	(4,64)

Realisasi beban pegawai tahun anggaran 2020 disajikan sebesar belanja pegawai – LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan, dan komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu dan kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

Belanja pegawai - LRA TA. 2020 **3.337.750.984.292,00**

Mutasi Tambah:

1. Utang jasa pelayanan kesehatan kepada pegawai RSJ Prof. Muhammad Ildrem tahun 2020 728.047.200,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

2. Koreksi beban honorarium pns pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.444.950.586,00
3. Koreksi beban honorarium non pns pada Dinas Kesehatan	648.828.710,00
Jumlah Mutasi Tambah	27.193.827.144,00
Mutasi Kurang:	
1. Pelunasan utang beban pegawai pada RSJ Prof. Muhammad Ildrem	1.501.783.500,00
2. Kapitalisasi Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	9.540.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.511.323.500,00
Baban pegawai - LO TA. 2020	3.364.061.487.288,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24.

	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2019</u>
4.4.2.1.2 Beban Persediaan	Rp1.139.372.295.509,78	Rp462.846.690.917,05

Jumlah beban persediaan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.139.372.295.509,78. Realisasi persediaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp676.525.604.592,73 atau 146,17% jika dibandingkan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bahan Pakai Habis	78.699.564.966,00	82.482.074.967,50	(3.782.510.001,50)	(4,59)
Beban Persediaan Bahan/ Material	51.189.791.956,78	117.973.924.966,55	(66.784.133.009,77)	(56,61)
Beban Cetak dan Penggandaan	26.285.325.946,00	38.781.469.029,00	(12.496.143.083,00)	(32,22)
Beban Makanan dan Minuman	56.994.691.474,00	97.491.687.859,00	(40.496.996.385,00)	(41,54)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	4.346.774.136,00	8.511.295.510,00	(4.164.521.374,00)	(48,93)
Beban Pakaian Kerja	1.915.747.375,00	2.503.198.425,00	(587.451.050,00)	(23,47)
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.996.131.491,00	9.545.514.500,00	(6.549.383.009,00)	(68,61)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga	901.291.740.435,00	105.014.963.436,00	796.276.776.999,00	758,25
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.652.527.730,00	542.562.224,00	15.109.965.506,00	2.784,93
Jumlah	1.139.372.295.509,78	462.846.690.917,05	676.525.604.592,73	146,17

Nilai beban persediaan TA 2020 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh OPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2019 (dapat dilihat pada penjelasan pos-pos neraca atas persediaan).



Penyajian nilai beban ini juga memperhitungkan nilai utang tahun 2020 dan tahun 2019 serta kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan hutang pada persediaan bahan pakai habis (obat-obatan) tahun 2020 pada Rumah Sakit Haji sebesar Rp.4.108.369.705,00
1. Pelunasan hutang pada persediaan bahan/material tahun 2020 pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp8.144.621.319,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 24.

4.4.2.1.3 Beban Jasa **TA 2020** **Rp1.272.533.723.524,26** **TA 2019** **Rp1.232.073.797.095,70**

Jumlah beban jasa Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.272.533.723.524,26. Realisasi beban jasa ini mengalami kenaikan sebesar Rp40.459.926.428,56 atau 3,28% jika dibandingkan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69 Realisasi Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	186.960.660.894,24	150.284.568.774,70	36.676.092.119,54	24,40
Beban Premi Asuransi	136.223.415.227,00	93.678.269.965,00	42.545.145.262,00	45,42
Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir	24.635.898.855,66	48.917.298.597,00	(24.281.399.741,34)	(49,64)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.335.944.292,00	3.052.067.926,00	(716.123.634,00)	(23,46)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	215.163.906,00	25.291.403.180,00	(25.076.239.274,00)	(99,15)
Beban Jasa Konsultasi	20.469.963.770,00	39.978.692.716,00	(19.508.728.946,00)	(48,80)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	27.991.411.143,00	246.350.000,00	27.745.061.143,00	11.262,46
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	211.506.000,00	15.673.713.243,00	(15.462.207.243,00)	(98,65)
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.624.424.960,00	6.163.872.000,00	(3.539.447.040,00)	(57,42)
Beban jasa event organizer	520.800.700,00	4.213.423.500,00	(3.692.622.800,00)	(87,64)
Beban Barang dan Jasa BOS	389.202.569.720,00	370.979.268.794,00	18.223.300.926,00	4,91
Beban Hibah Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84.161.739.641,86	129.396.257.652,00	(45.234.518.010,14)	(34,96)
Beban Jasa Tenaga Pendukung	396.980.224.414,50	344.198.610.748,00	52.781.613.666,50	15,33
Jumlah	1.272.533.723.524,26	1.232.073.797.095,70	40.459.926.428,56	3,28

Realisasi beban jasa tahun anggaran 2020 disajikan sebesar realisasi belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan dan beban dibayar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	268.419.799.721,41	155.641.505.748,61	112.778.293.972,80	72,46%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	944.473.203.271,81	876.921.341.086,82	67.551.862.184,99	7,70%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.400.305.557,40	1.580.922.783,12	5.819.382.774,28	368,10%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.946.919.493,38	5.060.818.651,00	(1.113.899.157,62)	(22,01%)
Jumlah	1.624.884.864.222,22	1.296.024.588.020,45	328.860.276.201,77	25,37%

4.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang TA 2020 TA 2019
Rp24.133.902.327,67 **Rp1.243.720.577.609,08**

Jumlah beban penyisihan piutang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp24.133.902.327,67, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Daftar Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020
Beban Penyisihan Piutang Pajak - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	23.365.281.973,06
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Dinas Kesehatan	18.165.529,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	88.449.555,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Dinas Lingkungan Hidup	58.660.317,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Rumah Sakit Umum Haji Daerah	129.816.897,18
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	435.570,00
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	437.092.486,43
Jumlah	24.133.902.327,67

4.4.2.1.9 Beban Lain-lain TA 2020 TA 2019
Rp.104.401.255.994,53 **Rp 103.489.612.768,42**

Beban lain-lain Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.104.401.255.994,53, merupakan nilai aset tahun 2020 yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset (barang ekstrakomptabel) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Daftar Realisasi Beban Lain-lain per OPD Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No.	Aset Ekstrakomptabel	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin (KIB B)	28.051.977.433,61
2	Gedung dan Bangunan (KIB C)	248.004.500,00
3	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	76.101.274.060,92
	TOTAL	104.401.255.994,53



4.4.2.2 Beban Transfer **TA 2020** **Rp2.263.177.234.239,00** **TA 2019** **Rp2.188.085.593.050,17**
Jumlah Beban Transfer Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.263.177.234.239,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp75.091.641.188,83 atau 3,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Realisasi Beban Transfer Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	2.263.177.234.239,00	2.180.757.211.950,17	82.420.022.288,83	3,78%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	7.328.381.100,00	(7.328.381.100,00)	(100%)
Jumlah	2.263.177.234.239,00	2.188.085.593.050,17	75.091.641.188,83	3,43%

4.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional **TA 2020** **(Rp308.267.344.682,36)** **TA 2019** **Rp376.975.524.197,92**

Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp308.267.344.682,36 merupakan selisih antara pendapatan – LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan	%
Pendapatan – LO	12.954.190.302.571,69	12.300.114.791.244,14	1.239.960.250.530,24	10,08%
Beban – LO	13.262.457.647.254,06	11.923.139.267.046,22	368.127.177.056,78	3,09%
Jumlah	(308.267.344.682,36)	376.975.524.197,92	(685.242.868.880,29)	(181,77)

4.4.4. Kegiatan Non Operasional **TA 2020** **Rp0,00** **TA 2019** **Rp0,00**

Realisasi Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0,00.



	TA 2020	TA 2019
4.4.5. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp0,00	Rp0,00

Realisasi Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0,00.

	TA 2020	TA 2019
4.4.6. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(Rp308.267.344.682,36)	Rp376.975.524.197,92

Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 adalah sebesar (Rp308.267.344.682,36).

	TA 2020	TA 2019
4.4.7. Pos Luar Biasa	(Rp8.876.553.634,00)	(Rp21.299.175.711,00)

Realisasi Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp8.876.553.634,00 yang merupakan beban luar biasa. Terdapat penurunan sebesar Rp12.422.622.077,00 atau 58,32% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi beban luar biasa pada Laporan Operasional merupakan realisasi belanja tidak terduga sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Beban Luar Biasa sebesar Rp8.876.553.634,00 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020. Merupakan relokasi anggaran atau refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid – 19 di Provinsi Sumatera Utara, telah dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran pos Belanja Tak Terduga (4.1.2.3).

	TA 2020	TA 2019
4.4.8. Surplus/ Defisit LO	(Rp317.143.898.316,36)	Rp355.676.348.486,92

Realisasi Surplus/ Defisit LO Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp317.143.898.316,36. Terdapat penurunan sebesar (672.820.246.803,29) atau (189,17%) dari realisasi tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78 Surplus/Defisit LO Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(308.267.344.682,36)	376.975.524.197,92	(685.242.868.880,29)	(181,77)
Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	(8.876.553.634,00)	(21.299.175.711,00)	12.422.622.077,00	(58,32)
Surplus/Defisit LO	(317.143.898.316,36)	355.676.348.486,92	(672.820.246.803,29)	(189,17)

4.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan dari pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan,



perubahan kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dalam mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

Laporan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2020.

Selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar Rp241.509.328.719,94 yang berasal dari:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Saldo awal kas	235.273.302.585,25	975.840.502.146,19
Kenaikan/penurunan kas:		
Aktivitas operasi	1.591.663.737.253,01	878.522.952.194,46
Aktivitas investasi	(1.249.191.436.054,07)	(1.249.514.293.636,40)
Aktivitas pendanaan	(100.000.000.000,00)	(283.844.753.000,00)
Aktivitas transitoris	(962.972.479,00)	(85.731.105.119,00)
Kenaikan bersih	241.509.328.719,94	(740.567.199.560,94)
Saldo akhir kas	476.782.631.305,19	235.273.302.585,25

4.5.1 Saldo Awal Kas

Saldo awal kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp235.273.302.585,25 yang berasal dari saldo akhir kas per 31 Desember 2019.

4.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp9.425.646.021.447,99 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp7.833.982.284.194,98 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.591.663.737.253,01.

4.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp1.249.191.436.054,07. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.



4.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp100.000.000.000,00. Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran.

4.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas aktivitas transitoris adalah penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 yang merupakan realisasi penerimaan perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan penerimaan setara kas setelah dikurangi pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran setara kas.

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp962.972.479,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

4.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp499.350.054.431,19. Saldo akhir kas daerah tersebut terdiri dari saldo kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dan tersimpan di rekening Bank Sumut AC No.100.01.000623.0 sebesar Rp476.782.631.305,19 saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00, saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.095.612.036,00 (total kas di bendahara pengeluaran Rp1.106.640.436,00 dikurangi utang PFK Rp11.028.400,00), saldo kas di bendahara BLUD sebesar Rp3.278.113.187,00 serta saldo akhir kas di bendahara BOS sebesar Rp18.193.697.903,00. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp499.350.054.431,19.

4.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 79 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2020 (Unaudited)	2019 (Audited)
Ekuitas Awal	4.4.1	18.134.943.216.807,23	18.387.497.135.274,47
Surplus/Defisit - LO	4.4.2	(317.143.898.316,36)	355.676.348.486,92



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

Koreksi Ekuitas Lainnya	4.4.3	(1.687.294.903.709,15)	(608.230.266.954,16)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
Ekuitas Akhir		16.130.504.414.781,72	18.134.943.216.807,23

4.6.1. Ekuitas awal Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp18.134.943.216.807,23 **Rp18.387.497.135.274,47**
Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.134.943.216.807,23 yang merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019. Jika dibandingkan dengan TA. 2019 sebesar Rp18.387.497.135.274,47 maka terjadi penurunan sebesar Rp252.553.918.467,24 atau 1,37%.

4.6.2. Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
(Rp317.143.898.316,36) **Rp355.676.348.486,92**
Tahun Anggaran 2020 operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami defisit sebesar (Rp317.143.898.316,36) yang merupakan selisih antara pendapatan- LO dengan beban. Jika dibandingkan dengan TA. 2019 sebesar Rp355.676.348.486,92,- maka terjadi penurunan sebesar Rp 672.820.246.803,28 atau 189,17%.

4.6.3. Koreksi Ekuitas Lainnya Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
(Rp1.687.294.903.709,15) **(Rp608.230.266.954,16)**

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu bagian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, adalah sebesar (Rp1.687.294.903.709,15). Jika dibandingkan dengan TA 2019 sebesar (Rp608.230.266.954,16) maka terjadi kenaikan sebesar (Rp1.079.064.636.754,99) atau 177,41%. Angka tersebut diperoleh dari selisih uraian koreksi ekuitas lainnya pada setiap OPD yang dirangkum seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 80 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

(dalam Rupiah)

NO	Uraian Koreksi Ekuitas Lainnya Pada	Per 31 Desember 2020
1	Piutang Pajak Air Permukaan	(2.393.895.868.360,00)
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(4.963.035,00)
3	Piutang Bagi Hasil Pajak	(91.410.092.227,00)
4	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	(3.737.490.744,00)
5	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	(40.907.000,00)
6	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	(4.686.173.307,98)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

NO	Uraian Koreksi Ekuitas Lainnya Pada	Per 31 Desember 2020
7	Penyisihan Piutang	1.244.243.580.737,79
8	Persediaan Belanja Tak Terduga	96.924.356.108,00
9	Penyertaan Modal	125.760.761.336,05
10	Aset Tanah	(103.561.361.887,00)
11	Aset Peralatan dan Mesin	(68.800.340.525,28)
12	Gedung dan Bagunan	(14.343.723.746,15)
13	Jalan Irigasi Jaringan	(7.072.673.117,30)
14	Aset Tetap Lainnya	(15.279.165.842,99)
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.802.726.241,00
16	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	97.835.352.706,51
17	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13.195.896.938,92)
18	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	26.455.877.031,40
19	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.823.324.785,85)
20	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.923.874.948,36
21	Aset Lain-lain.....	(571.251.196.485,77)
22	Aset Tak Berwujud	79.749.971,14
23	Utang Jangka Panjang Lainnya	(536.058.148.881,00)
24	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	638.166.021.920,87
25	Penerimaan BUMD	(85.890.390,00)
26	Penyesuaian	(0,03)
27	Beban Luar Biasa	(115.239.987.436,00)
Jumlah		(1.687.294.903.709,15)

4.6.4. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp16.130.504.414.781,72 **Rp18.134.943.216.807,23**

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.130.504.414.781,72. Saldo Ekuitas akhir tersebut merupakan perhitungan dari ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit LO dikurang koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan dengan TA. 2019 sebesar Rp18.134.943.216.807,23 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.004.438.802.025,51 atau 11,05%.



BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good government*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 secara keseluruhan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI